

JADWAL

Tanggal Efektif	:	10 September 2018
Masa Penawaran Umum	:	12 – 13 September 2018
Tanggal Penjatahan	:	14 September 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	17 September 2018
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	17 September 2018
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 September 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
 Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia
 Telepon: +62 21 7241888
 Fax: +62 21 7241887
 Email: investor@arkadiacorp.com
 Website: www.arkadiacorp.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPSP”). Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, Perseroan akan melaksanakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Employee and Management Stock Option Program atau “EMSOP”) sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan EMSOP pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program EMSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Phillip Sekuritas Indonesia • PT Panin Sekuritas Tbk. • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT Reliance Sekuritas • PT NH Korindo Sekuritas Indonesia • PT Profindo Sekuritas Indonesia • PT Universal Broker Indonesia Sekuritas • PT Onix Sekuritas • PT Panca Global Sekuritas • PT Wanteg Sekuritas • PT Artha Sekuritas Indonesia • PT Shinhan Sekuritas Indonesia • PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia • PT NISP Sekuritas

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN BELANJA IKLAN YANG DAPAT MENYEBABKAN PENURUNAN SECARA SIGNIFIKAN PADA PENDAPATAN DAN HASIL USAHA YANG DIJALANKAN ENTITAS ANAK DALAM PERIODE TERTENTU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Arkadia Digital Media Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat 006/ADM/BOD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 28 Juni 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
RINGKASAN	9
I. PENAWARAN UMUM	18
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG	24
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ANAK PERUSAHAAN	58
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	58
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	59
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	61
D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN	61
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	65
F. ASURANSI	69
G. ASET TETAP	69
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	70
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	72
J. SUMBER DAYA MANUSIA	80
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN	84
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	84
M. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN	84
N. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	102
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	102
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	103
Q. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	116
X. EKUITAS	120
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	122
XII. PERPAJAKAN	123
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	124
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	127
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	130
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	146
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	153

XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	154
XIX.	LAPORAN KEUANGAN	155

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
AMN	:	Berarti PT Arkadia Media Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan (sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017).
Anggota Bursa	:	Berarti anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPSS	:	Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.

FPPS	:	Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
IAM	:	Berarti PT Integra Archipelago Media, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjataan	:	Berarti PT Danatama Makmur Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
<i>Employee & Management Stock Ownership Program</i> atau EMSOP	:	Berarti program opsi kepemilikan saham Perseroan oleh manajemen dan karyawan Perseroan.

MMN	:	Berarti PT Mata Media Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Bapepam-LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan I-A	:	Berarti pada Peraturan I-A – Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.
Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 Tahun 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 99 tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 13 tanggal 5 September 2018, beserta addendum perjanjian dan termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	:	Berarti PT Arkadia Digital Media Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.

Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir Peraturan No. IX.A.2 Lampiran 9.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham yang akan ditawarkan serta akan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama, yang akan ditawarkan serta akan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini, dengan jumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Baru, yang dilakukan menurut Perjanjian Penjamin Emisi Efek dan akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
UU ITE	:	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU Pers	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 1997 tentang Pers.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian ADM No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Bukit Irama", kemudian diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018. ("**Akta No.127/2018**").

Sejak tahun 2012, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No.127/2018, sehubungan dengan, antara lain, perubahan status Perseroan dari Perseroan terbatas tertutup menjadi Perseroan terbatas terbuka, dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yakni antara lain untuk disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kegiatan usaha utama Perseroan meliputi perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi dengan Entitas Anak di bidang portal web. Saat ini Perseroan memiliki 3 entitas anak yang semuanya memiliki kegiatan usaha dalam bidang portal web yaitu PT Arkadia Media Nusantara yang berdiri sejak tahun 2010, PT Mata Media Nusantara yang berdiri sejak 2013, dan PT Integra Archipelago Media yang berdiri sejak tahun 2013.

Media telah berevolusi dari media cetak, media elektronik dan media daring (*online*) yang melingkupi media sosial. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, media cetak dan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan media daring. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa pemberitaan media cetak dan elektronik tidak memiliki tingkat aktualitas yang tinggi namun dapat dipertanggungjawabkan. Sementara proses penyebaran informasi pada media daring bergerak sangat cepat namun tidak dapat terverifikasi dengan baik.

Berdasarkan data *We Are Social*, populasi pengguna internet di Indonesia diprediksi menembus 132 juta orang atau sekitar 51% dari total penduduk 262 Juta di tahun 2017. Jumlah pengguna internet ini meningkat 44 juta (sekitar 50%) dari jumlah pengguna internet 2016 yang tercatat sebesar 88,1 juta. Penetrasi internet terhadap total populasi di Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan signifikan dari 34% terhadap jumlah penduduk 2016 menjadi 51% di tahun 2017. Sedangkan pengguna media sosial aktif 106 juta (40%) dan yang aktif bermedia sosial di platform mobile sebanyak 92 juta orang. Sejalan dengan kondisi itu, industri media online terus tumbuh signifikan.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham, atau sebesar 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru.
Jumlah saham yang dicatatkan	: Sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham
Nilai Nominal	: Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham
Harga Penawaran	: Rp 200 (dua ratus Rupiah) per lembar saham
Nilai Emisi	: Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 12 - 13 September 2018
Tanggal Pencatatan di BEI	: 18 September 2018

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan perangkat keras di Anak Perusahaan (AMN dan MMN).
- Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan platform dan perangkat lunak di Anak Perusahaan (AMN dan MMN).
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN).

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 02/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	17,50%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	17,50%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%	26.250.000	2.625.000.000	8,09%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%	17.500.000	1.750.000.000	5,38%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,69%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,69%
Masyarakat				150.000.000	15.000.000.000	46,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%	325.000.000	32.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000		375.000.000	37.500.000.000	

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Employee and Management Stock Option Program* atau "EMSOP")

Berdasarkan Akta No.127/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 24 Agustus 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor ("**Akta No. 87/2018**"), pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program EMSOP.

Program EMSOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program EMSOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dengan level jabatan *department head* ke atas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perusahaan dan aktif sebagai karyawan tetap di Perseroan sebelum tanggal 30 April 2018. Peserta program EMSOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap. Program EMSOP ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang memberikan batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat

pengumuman RUPS, dengan ketentuan bahwa Program EMSOP tersebut dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS persetujuan pelaksanaan Program EMSOP tersebut dan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program EMSOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan EMSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	16,88%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	16,88%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%	26.250.000	2.625.000.000	7,79%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%	17.500.000	1.750.000.000	5,18%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,60%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,60%
Masyarakat				150.000.000	15.000.000.000	44,51%
Karyawan Perseroan melalui Program EMSOP				12.000.000	1.200.000.000	3,56%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%	337.000.000	33.700.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000		363.000.000	36.300.000.000	

Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Talupan Lumban Gaol, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0986) dan 2017 (2017 – Tidak Audit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31-Mar		31-Des	
	2018	2017	2016	2015
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404
Piutang usaha - pihak ketiga	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048
Piutang lain-lain				
Pihak Berelasi		5.021.200.000	4.321.200.000	-
Pihak Ketiga	11.000.000	118.750.000	171.360.000	600.000
Pajak dibayar dimuka	146.003.493	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	4.005.394.764	2.187.450.464	680.727.008	1.234.929.450
Pendapatan masih harus diterima	26.500.000			
Uang muka	237.192.435	119.288.566	73.167.830	522.625.350
Jumlah aset lancar	11.264.609.262	13.937.021.426	10.937.561.821	6.326.517.252
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - bersih	1.646.833.489	1.491.109.713	1.728.615.189	1.430.085.963
Aset lain-lain	167.600.000	157.600.000	77.600.000	77.600.000
Aset pajak tangguhan	444.018.598	541.086.023	511.882.505	247.647.759
Jumlah aset tidak lancar	2.258.452.087	2.189.795.736	2.318.097.694	1.755.333.722
JUMLAH ASET	13.523.061.349	16.126.817.162	13.255.659.515	8.081.850.974
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	208.138.569	5.715.942.358	4.475.602.243	2.404.280.254
Utang lain-lain				
Pihak Berelasi	-	321.199.000	-	12.099.644.618
Pihak Ketiga	-	701.593.330	697.758.330	667.798.330
Biaya yang masih harus dibayar	197.610.055	155.321.951	654.614.653	-
Utang pajak	672.200.093	1.467.873.894	619.389.452	627.430.589
Sewa pembiayaan	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.155.997.597	8.453.717.205	6.486.879.721	15.835.715.321
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Sewa pembiayaan				
Jatuh tempo lebih dari setahun	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000
Liabilitas imbalan kerja	1.554.211.272	1.942.480.970	2.047.530.021	990.591.037
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.554.211.272	1.957.516.970	2.066.301.932	1.058.946.037
Jumlah liabilitas	2.710.208.869	10.411.234.175	8.553.181.653	16.894.661.358
EKUITAS				
Modal dasar :				
Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 480.000 saham				
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 15.000 saham				
Nilai nominal Rp.100.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor :				
Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 126.000 saham				
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 6.000 saham	17.500.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	600.000.000
Tambahan modal disetor	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-
Komponen penghasilan komprehensif lain	259.241.052	218.979.811	(393.499.901)	(219.692.033)
Saldo Defisit	(7.038.516.715)	(7.187.362.341)	(7.640.085.615)	(9.106.712.247)
Total Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.810.724.337	5.721.617.470	4.656.414.484	(8.726.404.280)
Kepentingan-non pengendali	2.128.143	(6.034.483)	46.063.378	(86.406.104)
Jumlah ekuitas	10.812.852.480	5.715.582.987	4.702.477.862	(8.812.810.384)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13.523.061.349	16.126.817.162	13.255.659.515	8.081.850.974

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah penuh)

	31-Mar 2018	31-Mar 2017	2017	31-Des 2016	2015
Pendapatan	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Biaya Langsung	(3.470.680.473)	(3.814.975.144)	(17.002.508.196)	(23.075.169.345)	(18.381.239.466)
Laba kotor	3.339.013.843	2.638.989.554	10.871.179.094	9.625.045.542	5.527.213.160
Beban usaha	(2.820.917.297)	(2.481.403.360)	(9.928.065.951)	(7.647.044.780)	(5.968.153.297)
Laba (rugi) usaha	518.096.546	157.586.194	943.113.143	1.978.000.762	(440.940.137)
Pendapatan (beban) lain-lain	(3.152.739)	(11.129.399)	(173.640.273)	(31.572.668)	(35.112.450)
Laba (rugi) sebelum pajak	514.943.807	146.456.795	769.472.870	1.946.428.094	(476.052.587)
Taksiran pajak					
Pajak kini	(271.324.258)	(100.375.560)	(488.077.185)	(670.689.923)	(54.719.904)
Pajak tangguhan	(83.637.833)	46.373.580	235.129.748	205.713.578	117.113.097
	(354.962.091)	(54.001.981)	(252.947.437)	(464.976.345)	62.393.193
Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan	159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
Penghasilan komprehensif lain					
Keuntungan (kerugian) aktuarial					
dari program pensiun manfaat pasti	53.718.369	511.672.242	823.704.923	(234.084.671)	(295.881.525)
Manfaat pajak penghasilan terkait	(13.429.592)	(127.918.061)	(205.926.231)	58.521.168	73.970.381
	40.288.777	383.754.181	617.778.692	(175.563.503)	(221.911.144)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	160.003.690	92.784.758	518.927.827	1.466.626.632	(409.522.800)
Kepentingan nonpengendali	(21.974)	(329.943)	(2.402.394)	14.825.117	(4.136.594)
Jumlah	159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
Laba (rugi) komprehensif tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	200.289.143	476.538.907	1.136.707.225	1.292.818.764	(629.214.833)
Kepentingan nonpengendali	(18.650)	(329.911)	(2.403.100)	13.069.482	(6.355.705)
Jumlah	200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
laba (Rugi) per saham - Dasar	0,94	0,74	4,12	26,19	(68,25)

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah penuh)

	31 Maret		31 Desember		
	2018 (3 Bulan)	2017 (3 Bulan)	2017 (1 Tahun)	2016 (1 Tahun)	2015 (1 Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	8.043.153.759	6.994.100.648	25.129.127.256	33.252.854.971	22.600.629.477
Pembayaran kas kepada pemasok	(10.573.845.981)	(4.289.167.449)	(9.444.346.350)	(15.399.185.059)	(12.497.247.350)
Pembayaran karyawan	(3.161.127.270)	(3.000.668.105)	(12.089.230.664)	(7.989.361.095)	(7.776.983.813)
Penerimaan lainnya	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Pembayaran lainnya	(1.303.267.169)	(1.262.343.426)	(4.465.003.697)	(2.817.596.977)	(3.686.050.495)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(6.994.255.166)	(1.557.681.641)	(868.637.429)	7.066.250.984	(1.359.652.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(367.173.889)	(281.305.014)	(561.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
Perolehan aset lainnya	(10.000.000)	(100.000.000)	(80.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(377.173.889)	(381.305.014)	(641.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal saham	-	-	-	12.119.400.000	119.400.000
Tambahan modal disetor	4.900.000.000	-	-	90.000.000	-
Penerimaan utang lain-lain	-	521.199.000	325.034.000	29.960.000	2.457.617.900
Pembayaran utang lain-lain	(1.022.792.330)	(565.000)	-	(12.099.644.618)	(171.715.000)
Penerimaan piutang lain-lain	5.128.950.000	1.460.000	52.610.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	-	(700.000.000)	(700.000.000)	(4.491.960.000)	(600.000)
Pembayaran leasing	(26.582.998)	(34.070.085)	(113.274.654)	(99.796.020)	(73.932.973)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.979.574.672	(211.976.085)	(435.630.654)	(4.452.040.638)	2.330.769.927
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	1.608.145.617	(2.150.962.740)	(1.945.334.621)	1.675.384.615	327.450.510
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	813.930.398	2.759.265.019	2.759.265.019	1.083.880.404	756.429.894
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	2.422.076.015	608.302.279	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN	31-Mar		31-Des	
	2018	2017	2016	2015
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan Usaha	5,51%	-14,76%	36,77%	126,40%
Laba Kotor	26,53%	12,95%	74,14%	55,34%
Laba (rugi) usaha	228,77%	-52,32%	-548,59%	-94,83%
Laba (rugi) sebelum pajak	251,60%	-60,47%	-508,87%	-94,43%
Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan	73,04%	-65,13%	-458,13%	-95,21%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	-57,94%	-13,14%	-305,47%	-92,64%
Total Aset	-16,15%	21,66%	64,02%	77,94%
Total Liabilitas	-73,97%	21,72%	-49,37%	32,83%
Total Ekuitas	89,18%	21,54%	-153,36%	7,77%
RASIO SOLVABILITAS (%)				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (DAR)(%)	20,04%	64,56%	64,52%	209,04%
Rasio Total Kewajiban Terhadap modal(DER)(%)	25,06%	182,16%	181,89%	-191,71%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	0,72%	1,87%	1,24%	-1,19%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	79,96%	35,44%	35,48%	-109,04%
RASIO PROFITABILITAS (%)				
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> (%)	7,61%	3,38%	6,05%	-1,84%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> (%)	2,35%	1,85%	4,53%	-1,73%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	1,18%	3,20%	11,18%	-5,12%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,48%	9,04%	31,50%	4,69%
RASIO LIKUIDITAS (%)				
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i> (%)	209,52%	9,63%	42,54%	6,84%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i> (%)	592,52%	137,58%	156,99%	28,85%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i> (%)	974,45%	164,86%	168,61%	39,95%

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN YANG SIGNIFIKAN

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	PT Arkadia Media Nusantara	Bidang jasa portal web	Jakarta	99,99%	2013	Beroperasi	Langsung
2.	PT Mata Media Nusantara	Perdagangan dan Jasa	Jakarta	99,97%	2014	Beroperasi	Langsung
3.	PT Integra Archipelago Media	Pembangunan, perdagangan dan Jasa	Jakarta	99,90%	2018	Belum Beroperasi	Langsung

7. FAKTOR RISIKO

Faktor Risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah Penurunan Belanja Iklan yang dapat menyebabkan penurunan secara signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dalam periode tertentu. Adapun beberapa faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 1. Risiko Penurunan Belanja Iklan
- B. Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan
 1. Risiko Kesuksesan Perseroan Tergantung Sambutan Pembaca Pada Konten dan Platform
 2. Risiko Kesalahan Teknologi dan Gangguan Jaringan
 3. Risiko Mendapat Gugatan Hingga Pengadilan
 4. Risiko Kenaikan Biaya Produksi Program dan Konten
 5. Risiko Portal Perseroan Bersaing Dengan Aplikasi Agregator
 6. Risiko Ketergantungan pada Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga
 7. Risiko Kegagalan Strategi Usaha Saat Ekspansi
- C. Risiko Umum
 1. Peraturan dan Kebijakan yang Belum Sinkron
 2. Risiko Persaingan Usaha
- D. Risiko yang Berhubungan dengan Saham
 1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan di Kemudian Hari
 2. Likuiditas Saham Perseroan
 3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
 4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dimulai tahun buku 2018 yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Faktor-faktor yang menentukan pembagian dividen Perseroan bergantung kepada laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor – faktor tersebut pada akhirnya bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum dan hal-hal lain yang berlaku secara khusus terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 7241888
Fax: +62 21 7241887
Email: corsec@arkadiacorp.com
Website: www.arkadiacorp.com

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN BELANJA IKLAN YANG DAPAT MENYEBABKAN PENURUNAN SECARA SIGNIFIKAN PADA PENDAPATAN DAN HASIL USAHA YANG DIJALANKAN ENTITAS ANAK DALAM PERIODE TERTENTU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No. 127/2018**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000	

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	17,50%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	17,50%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%	26.250.000	2.625.000.000	8,09%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%	17.500.000	1.750.000.000	5,38%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,69%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,69%
Masyarakat				150.000.000	15.000.000.000	46,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%	325.000.000	32.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000		375.000.000	37.500.000.000	

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Employee and Management Stock Option Program atau "EMSOP"*)

Berdasarkan Akta No.127/2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 87/2018, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program EMSOP.

Program EMSOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program EMSOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang

tercatat dalam daftar karyawan tetap dengan level jabatan *department head* ke atas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Perseroan dan aktif sebagai karyawan tetap di Perseroan sebelum tanggal 30 April 2018. Peserta program EMSOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap. Program EMSOP ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang memberikan batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan bahwa Program EMSOP tersebut dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS persetujuan pelaksanaan Program EMSOP tersebut dan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum.

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program EMSOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan EMSOP. Pendistribusian hak opsi seluruhnya akan dilakukan dalam selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Setiap pemegang Hak Opsi, dapat mengeksekusi hak yang telah ditentukan sesuai dengan berakhirnya *vesting period* yang telah ditetapkan oleh Perseroan, untuk membeli saham Perseroan di harga pelaksanaan.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A. Pelaksanaan Program EMSOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS persetujuan EMSOP yaitu tanggal 25 Mei 2018 (option life).
- Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan.
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu maksimum (vesting period) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama. Selama vesting period, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya vesting period.
- Setelah berakhirnya vesting period, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (window exercise) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap window exercise akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut:
 - Peserta Program EMSOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 34% (empat puluh empat persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan mulai dari tanggal ulang tahun pertama sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI.
 - Peserta Program EMSOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 33% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan mulai dari tanggal ulang tahun kedua sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI.
 - Peserta Program EMSOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 33% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan mulai dari tanggal ulang tahun ketiga sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di BEI. Hak opsi yang telah melewati masa tunggu namun belum dilaksanakan tetap berlaku selama tidak melewati option life.
- Harga pelaksanaan (exercise price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.
- Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia pada saat pelaksanaan hak opsi dalam Program EMSOP.
- Peserta program yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya namun belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
- Peserta Program EMSOP tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana Option Life-nya berakhir.

Dilusi dalam hal seluruh Peserta Program EMSOP melaksanakan seluruh hak opsinya adalah sebesar 3,56%. Prosedur dan tata cara Program EMSOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program EMSOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan EMSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	16,88%
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%	56.875.000	5.687.500.000	16,88%
William Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%	26.250.000	2.625.000.000	7,79%
Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%	17.500.000	1.750.000.000	5,18%
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,60%
Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%	8.750.000	875.000.000	2,60%
Masyarakat				150.000.000	15.000.000.000	44,51%
Karyawan Perseroan melalui Program EMSOP				12.000.000	1.200.000.000	3,56%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%	337.000.000	33.700.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000		363.000.000	36.300.000.000	

Biaya EMSOP

Biaya EMSOP merupakan biaya remunerasi atas saham penghargaan yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Perseroan. Selanjutnya setelah periode lock-up berakhir dan Peserta dapat melakukan transaksi penjualan saham penghargaan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia, atas pelaksanaan penjualan saham tersebut akan dikenakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan akan mencadangkan biaya EMSOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang pendapatan berbasis saham dengan menggunakan metode Binomial Lattice dalam laporan keuangannya setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada Peserta EMSOP.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau setara dengan sebanyak 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar sebanyak 53,85% (lima puluh tiga koma delapan puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Saham Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini. Seluruh saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka Stephen K. Sulistyio, Iwa Sukresno Karunia, Wiliam Martaputra, Suwarjono, Aldrian Suwardi Chandra, dan Steven sebagai pemegang saham lama Perseroan, tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- a) Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan perangkat keras di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Infrastruktur dan perangkat keras yang akan dibeli sebagian besar berupa Server yang diperlukan untuk melayani pengunjung dari portal-portal baru yang telah didirikan oleh Anak Perusahaan. Penjual adalah pihak ketiga, Anak Perusahaan akan melakukan tender untuk pengadaan infrastruktur dan perangkat keras yang berlaku umum di Anak Perusahaan, dimana akan dipilih vendor yang mampu menyediakan perangkat tersebut dengan harga terbaik. Dana hasil Penawaran Umum yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
- b) Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan platform dan perangkat lunak untuk kegiatan usaha di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
- c) Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk modal kerja. Dimana dari jumlah tersebut, sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Perseroan dan sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum yang digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini belum dipergunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas adalah transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan IX.E.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 disebabkan transaksi tersebut dilaksanakan dengan Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada seluruh Anak Perusahaan tersebut dan transaksi tersebut diatas merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. kep-614/BL/2011 disebabkan transaksi tersebut dilaksanakan dengan Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada seluruh Anak Perusahaan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 11,33% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 1,50%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,26%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,75%;
- Biaya jasa penasihat keuangan: 2,82%;

-
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,49%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,83%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,37%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,29%;
 - Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,18%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
 - Biaya lain-lain 1,33%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 2.710.208.869. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam rupiah penuh)</i> Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha – pihak ketiga	208.138.569
Utang lain – lain	
Pihak Ketiga	-
Pihak Berelasi	-
Utang pajak	672.200.093
Uang muka dari pelanggan	-
Beban yang masih harus dibayar	197.610.055
Pendapatan diterima dimuka	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	78.048.880
Pinjaman Jangka Menengah	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.155.997.597
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bagi hasil	-
Liabilitas pajak tangguhan	-
Utang kepada pihak berelasi	-
Kewajiban imbalan pasca kerja	1.554.211.272
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang MTN/Surat Promes	-
Pinjaman Jangka Menengah	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.554.211.272
Jumlah Liabilitas	2.710.208.869

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 208 juta dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2018</u>
PT Indosis Intergrasi	108.000.000
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	48.924.000
CV Graha Mas	22.928.169
PT Prime Link Communication	17.820.000
PT Aplikanusa Lintasarta	8.646.000
PT Supra Primatama Nusantara	1.820.400
Jumlah	<u>208.138.569</u>

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 672 juta dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2018</u>
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	29.408.710
Pasal 23	11.099.035
Pasal 29	270.594.258
PP 46	530.000
Pajak pertambahan nilai	<u>360.568.090</u>
Jumlah	<u><u>672.200.093</u></u>

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 197 juta dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2018</u>
Biaya konsultan teknologi	81.382.121
Jamsostek	69.183.743
Biaya jasa profesional	32.296.388
Biaya gaji	14.747.803
Jumlah	<u><u>197.610.055</u></u>

Sewa Pembiayaan

Saldo sewa pembiayaan yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 78 juta dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2018</u>
PT. Toyota Astra Financial Service	<u>78.048.880</u>
	78.048.880
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	<u>78.048.880</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>-</u></u>

Liabilitas Jangka Panjang

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Saldo kewajiban imbalan pasca kerja yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 1.554 juta dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Maret 2018</u>
Saldo awal	(1.942.480.970)
Beban manfaat karyawan	(148.448.671)
Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	53.718.369
Pembayaran manfaat	<u>483.000.000</u>
Jumlah	<u><u>(1.554.211.272)</u></u>

Kontingensi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontingensi apapun yang dapat merugikan pihak manapun.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2018

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2018.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 Maret 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Talupan Lumban Gaol, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0986) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824). dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam rupiah penuh)

	31-Mar 2018	31-Mar 2017	2017	31-Des 2016	2015
Pendapatan	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Biaya Langsung	(3.470.680.473)	(3.814.975.144)	(17.002.508.196)	(23.075.169.345)	(18.381.239.466)
Laba kotor	3.339.013.843	2.638.989.554	10.871.179.094	9.625.045.542	5.527.213.160
Beban usaha	(2.820.917.297)	(2.481.403.360)	(9.928.065.951)	(7.647.044.780)	(5.968.153.297)
Laba (rugi) usaha	518.096.546	157.586.194	943.113.143	1.978.000.762	(440.940.137)
Pendapatan (beban) lain-lain	(3.152.739)	(11.129.399)	(173.640.273)	(31.572.668)	(35.112.450)
Laba (rugi) sebelum pajak	514.943.807	146.456.795	769.472.870	1.946.428.094	(476.052.587)
Taksiran pajak					
Pajak kini	(271.324.258)	(100.375.560)	(488.077.185)	(670.689.923)	(54.719.904)
Pajak tangguhan	(83.637.833)	46.373.580	235.129.748	205.713.578	117.113.097
	(354.962.091)	(54.001.981)	(252.947.437)	(464.976.345)	62.393.193
Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan	159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
Penghasilan komprehensif lain					
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	53.718.369	511.672.242	823.704.923	(234.084.671)	(295.881.525)
Manfaat pajak penghasilan terkait	(13.429.592)	(127.918.061)	(205.926.231)	58.521.168	73.970.381
	40.288.777	383.754.181	617.778.692	(175.563.503)	(221.911.144)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	160.003.690	92.784.758	518.927.827	1.466.626.632	(409.522.800)
Kepentingan nonpengendali	(21.974)	(329.943)	(2.402.394)	14.825.117	(4.136.594)
Jumlah	159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
Laba (rugi) komprehensif tahun yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	200.289.143	476.538.907	1.136.707.225	1.292.818.764	(629.214.833)
Kepentingan nonpengendali	(18.650)	(329.911)	(2.403.100)	13.069.482	(6.355.705)
Jumlah	200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
laba (Rugi) per saham - Dasar	0,94	0,74	4,12	26,19	(68,25)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam rupiah penuh)

KETERANGAN	31-Mar		31-Des	
	2018	2017	2016	2015
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404
Piutang usaha - pihak ketiga	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048
Piutang lain-lain				
Pihak Berelasi		5.021.200.000	4.321.200.000	-
Pihak Ketiga	11.000.000	118.750.000	171.360.000	600.000
Pajak dibayar dimuka	146.003.493	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	4.005.394.764	2.187.450.464	680.727.008	1.234.929.450
Pendapatan masih harus diterima	26.500.000			
Uang muka	237.192.435	119.288.566	73.167.830	522.625.350
Jumlah aset lancar	11.264.609.262	13.937.021.426	10.937.561.821	6.326.517.252
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - bersih	1.646.833.489	1.491.109.713	1.728.615.189	1.430.085.963
Aset lain-lain	167.600.000	157.600.000	77.600.000	77.600.000
Aset pajak tangguhan	444.018.598	541.086.023	511.882.505	247.647.759
Jumlah aset tidak lancar	2.258.452.087	2.189.795.736	2.318.097.694	1.755.333.722
JUMLAH ASET	13.523.061.349	16.126.817.162	13.255.659.515	8.081.850.974
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	208.138.569	5.715.942.358	4.475.602.243	2.404.280.254
Utang lain-lain				
Pihak Berelasi	-	321.199.000	-	12.099.644.618
Pihak Ketiga	-	701.593.330	697.758.330	667.798.330
Biaya yang masih harus dibayar	197.610.055	155.321.951	654.614.653	-
Utang pajak	672.200.093	1.467.873.894	619.389.452	627.430.589
Sewa pembiayaan	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.155.997.597	8.453.717.205	6.486.879.721	15.835.715.321
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Sewa pembiayaan				
Jatuh tempo lebih dari setahun	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000
Liabilitas imbalan kerja	1.554.211.272	1.942.480.970	2.047.530.021	990.591.037
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.554.211.272	1.957.516.970	2.066.301.932	1.058.946.037
Jumlah liabilitas	2.710.208.869	10.411.234.175	8.553.181.653	16.894.661.358
EKUITAS				
Modal dasar :				
Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 480.000 saham				
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 15.000 saham				
Nilai nominal Rp.100.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor :				
Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 126.000 saham				
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 6.000 saham				
	17.500.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	600.000.000
Tambahan modal disetor	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-
Komponen penghasilan komprehensif lain	259.241.052	218.979.811	(393.499.901)	(219.692.033)
Saldo Defisit	(7.038.516.715)	(7.187.362.341)	(7.640.085.615)	(9.106.712.247)
Total Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.810.724.337	5.721.617.470	4.656.414.484	(8.726.404.280)
Kepentingan-non pengendali	2.128.143	(6.034.483)	46.063.378	(86.406.104)
Jumlah ekuitas	10.812.852.480	5.715.582.987	4.702.477.862	(8.812.810.384)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	13.523.061.349	16.126.817.162	13.255.659.515	8.081.850.974

LAPORAN ARUS KAS

	31 Maret		31 Desember		
	2018 (3 Bulan)	2017 (3 Bulan)	2017 (1 Tahun)	2016 (1 Tahun)	2015 (1 Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	8.043.153.759	6.994.100.648	25.129.127.256	33.252.854.971	22.600.629.477
Pembayaran kas kepada pemasok	(10.573.845.981)	(4.289.167.449)	(9.444.346.350)	(15.399.185.059)	(12.497.247.350)
Pembayaran karyawan	(3.161.127.270)	(3.000.668.105)	(12.089.230.664)	(7.989.361.095)	(7.776.983.813)
Penerimaan lainnya	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Pembayaran lainnya	(1.303.267.169)	(1.262.343.426)	(4.465.003.697)	(2.817.596.977)	(3.686.050.495)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(6.994.255.166)	(1.557.681.641)	(868.637.429)	7.066.250.984	(1.359.652.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(367.173.889)	(281.305.014)	(561.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
Perolehan aset lainnya	(10.000.000)	(100.000.000)	(80.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(377.173.889)	(381.305.014)	(641.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal saham	-	-	-	12.119.400.000	119.400.000
Tambahan modal disetor	4.900.000.000	-	-	90.000.000	-
Penerimaan utang lain-lain	-	521.199.000	325.034.000	29.960.000	2.457.617.900
Pembayaran utang lain-lain	(1.022.792.330)	(565.000)	-	(12.099.644.618)	(171.715.000)
Penerimaan piutang lain-lain	5.128.950.000	1.460.000	52.610.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	-	(700.000.000)	(700.000.000)	(4.491.960.000)	(600.000)
Pembayaran leasing	(26.582.998)	(34.070.085)	(113.274.654)	(99.796.020)	(73.932.973)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.979.574.672	(211.976.085)	(435.630.654)	(4.452.040.638)	2.330.769.927
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	1.608.145.617	(2.150.962.740)	(1.945.334.621)	1.675.384.615	327.450.510
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	813.930.398	2.759.265.019	2.759.265.019	1.083.880.404	756.429.894
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	2.422.076.015	608.302.279	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31-Mar		31-Dec	
	2018	2017	2016	2015
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan Usaha	5,51%	-14,76%	36,77%	126,40%
Laba Kotor	26,53%	12,95%	74,14%	55,34%
Laba (rugi) usaha	228,77%	-52,32%	-548,59%	-94,83%
Laba (rugi) sebelum pajak	251,60%	-60,47%	-508,87%	-94,43%
Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan	73,04%	-65,13%	-458,13%	-95,21%
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	-57,94%	-13,14%	-305,47%	-92,64%
Total Aset	-16,15%	21,66%	64,02%	77,94%
Total Liabilitas	-73,97%	21,72%	-49,37%	32,83%
Total Ekuitas	89,18%	21,54%	-153,36%	7,77%
RASIO SOLVABILITAS (%)				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (DAR)(%)	20,04%	64,56%	64,52%	209,04%
Rasio Total Kewajiban Terhadap modal(DER)(%)	25,06%	182,16%	181,89%	-191,71%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas	0,72%	1,87%	1,24%	-1,19%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	79,96%	35,44%	35,48%	-109,04%
RASIO PROFITABILITAS (%)				
Margin Laba Usaha – <i>Operating Profit Margin</i> (%)	7,61%	3,38%	6,05%	-1,84%
Margin Laba Bersih – <i>Net Profit Margin</i> (%)	2,35%	1,85%	4,53%	-1,73%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	1,18%	3,20%	11,18%	-5,12%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,48%	9,04%	31,50%	4,69%
RASIO LIKUIDITAS (%)				
Rasio Kas – <i>Cash Ratio</i> (%)	209,52%	9,63%	42,54%	6,84%
Rasio Cepat – <i>Quick Ratio</i> (%)	592,52%	137,58%	156,99%	28,85%
Rasio Lancar – <i>Current Ratio</i> (%)	974,45%	164,86%	168,61%	39,95%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (2017 – Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 yang telah ditandatangani oleh Talupan Lumban Gaol, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0986) dan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian ADM No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Bukit Irama", kemudian diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No.127/2018**").

Sejak tahun 2012, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta No.127/2018, sehubungan dengan, antara lain, perubahan status Perseroan dari Perseroan terbatas tertutup menjadi Perseroan terbatas terbuka, dan perubahan seluruh ketentuan Anggaran

Dasar Perseroan yakni antara lain untuk disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi Perseroan yang material adalah sebagai berikut:

- Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

- Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat ekonomi masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

- Sewa

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Perseroan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika terdapat kepastian memadai bahwa Perseroan akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif secara garis lurus selama masa sewa.

- Imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya

dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

- Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari jasa diakui saat penyerahan jasa kepada pelanggan, sedangkan beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, naik menjadi 5,0% pada tahun 2016 dari 4,9% pada 2015, meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi. Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, turunnya angka pengangguran dan naiknya upah riil mengangkat kepercayaan konsumen dan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi melambat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi untuk 2016 secara keseluruhan.

Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan mencapai 5,3% pada 2018. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas. Dengan kondisi pertumbuhan tersebut berpotensi memberikan dampak positif kepada kinerja keuangan Perseroan, dimana akan semakin banyak potensi memasukkan Perseroan dari sisi iklan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

b. Tingkat Penetrasi Internet

Penetrasi internet di Indonesia lebih rendah daripada di Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dalam prosentase, Indonesia hanya lebih besar dari Timor Leste, Myanmar dan Laos. Namun jumlah ini masih di atas jumlah penetrasi rata-rata dunia yang 50%. Namun, jika dilihat dari jumlah riil, penetrasi 51% ini besar karena penduduknya banyak. Dengan penetrasi lebih dari 50%, maka orang yang menikmati internet di Indonesia bisa lebih dari 130 juta. Sebab, populasi Indonesia ditaksir 260 juta pada tahun ini. Bandingkan dengan populasi negara lainnya: Filipina 103,7 juta, Vietnam 95,4 juta, Thailand 68,2 juta, Myanmar 54,8 juta, Malaysia 31,1 juta, Kamboja 16 juta, Laos 7 juta, Singapura 5,7 juta, Timor Leste 1,2 juta, dan Brunei Darussalam 0,43 juta.

c. Perkembangan Industri Internet

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sebesar 143,2 juta pengguna atau sekitar 54,8% dari total penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa. Penetrasi pengguna internet ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2016 berjumlah 132,3 juta jiwa dan 81,1 juta pengguna pada tahun 2014. Pertumbuhan pengguna internet berkembang pesat ini diikuti oleh industri media. Hampir semua media, baik cetak radio televisi berbondong-bondong bertransformasi ke digital. Data Dewan Pers menyebutkan jumlah media online di Indonesia tahun 2017 mencapai 43 ribu. Dan baru sekitar 200 media yang terdata dan terverifikasi Dewan Pers. Transformasi media konvensional ke digital, selain kebutuhan pembaca juga karena bisnis media mulai bergeser ke digital.

d. Pengaruh Generasi Millenials

Adapun hal-hal lain yang mendukung tumbuhnya industri internet termasuk media digital di Indonesia. Terkait dengan penduduk, menurut AC Nielsen, Millenials (usia 21-34) memiliki proporsi tertinggi untuk melakukan browsing dan berbelanja online, diikuti oleh Generasi X (usia 35-49). Saat ini, sekitar 46% penduduk Indonesia,

atau 115 juta orang, berada dalam kelompok usia Millenials dan Generasi X. Hal ini tidak mengherankan bahwa Indonesia memiliki jumlah tertinggi keempat dari pengguna Facebook aktif di dunia sebanyak 64 juta, pengguna google+ terbesar ke lima sebanyak 612 ribu dan tertinggi kedua penetrasi account Twitter sebesar 19% di dunia. Menurut Euromonitor juga, komposisi penduduk yang berusia di bawah 30 tahun adalah sebanyak 50% dan merupakan salah satu negara dengan komposisi usia muda terbanyak di dunia. Pendapatan juga diperkirakan meningkat sebagai porsi penduduk berpendapatan kelas menengah yang naik dari 30% dari total populasi sekarang ke 52% pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi Boston Consulting Group.

e. Kebijakan Pemerintah

Seiring dengan banjirnya fake news dan hoax, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakin tinggi. Pemerintah sendiri dengan UU ITE telah berusaha secara ketat membendung hoax dan konten negatif di internet. Dengan demikian Perseroan sendiri harus selektif dalam pemberitaan yang dihimpun dari berbagai narasumber informasi dan konten yang ditampilkan di media digital Perseroan agar tidak melanggar batasan-batasan dalam UU ITE. Di sisi lainnya, dengan mematuhi rambu-rambu UU Pemerintah ini, platform media digital Perseroan akan menjadi sumber yang dapat dipercaya masyarakat luas, karena dengan banyaknya hoax dan fake news saat ini Publik masih membutuhkan sumber informasi yang terpercaya agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu atau pilkada. Sebagai portal berita yang tepercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, ini adalah kesempatan bagi media yang terverifikasi untuk menjawab kebutuhan itu.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

Pendapatan Usaha Perseroan pada 31 Maret 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Pendapatan dari Penyedia Konten, Portal Web, dan lain-lainnya. Penyedia Konten memberikan kontribusi sebesar 45,59% dari total Pendapatan Perseroan, Portal Web memberikan kontribusi sebesar 53,34% dari total Pendapatan Perseroan, dan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,07% dari total Pendapatan Perseroan. Pendapatan Usaha Perseroan pada periode Maret 2018 naik Rp 355.729.618 atau sekitar 5,51% dari periode Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada penghasilan di segmen Portal Web.

Beban Segmen

Beban Pokok Penghasilan Perseroan pada 31 Maret 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Beban dari Penyedia Konten, Portal Web, dan lain-lainnya. Penyedia Konten memberikan kontribusi sebesar 26,82% dari total Beban Pokok Perseroan, Portal Web memberikan kontribusi sebesar 71,86% dari total Beban Pokok Perseroan, dan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,31% dari total Beban Pokok Perseroan. Beban Pokok Penghasilan Perseroan pada periode Maret 2018 turun sebesar Rp 344.294.671 atau sekitar 9,02% dari periode Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada Beban Pokok Penghasilan Perseroan di segmen Penyedia Konten.

Profitabilitas

Laba Kotor Perseroan pada 31 Maret 2018 terbagi menjadi 3, yaitu Laba Kotor dari Penyedia Konten, Portal Web, dan lain-lainnya. Penyedia Konten memberikan kontribusi sebesar 65,10% dari total Beban Pokok Perseroan, Portal Web memberikan kontribusi sebesar 34,08% dari total Beban Pokok Perseroan, dan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 0,82% dari total Beban Pokok Perseroan. Laba Kotor Perseroan pada periode Maret 2018 pada naik sebesar Rp 700.024.289 atau sebesar 26,53% dari periode Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan dari rugi di segmen Portal Web pada periode Maret 2017 menjadi laba di segmen yang sama pada periode Maret 2018.

	31 Maret		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Penghasilan bersih					
Jasa penyedia konten	3.104.685.321	4.854.170.706	16.460.165.965	28.085.510.848	21.426.745.763
Portal web	3.632.008.995	1.599.793.992	11.393.521.325	4.614.704.039	2.481.706.863
Lain-lain	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Sub jumlah	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Beban pokok penghasilan					
Jasa penyedia konten	930.967.988	1.404.184.044	5.884.163.389	10.799.889.422	2.246.463.581
Portal web	2.494.087.985	2.410.791.100	11.105.844.807	12.275.279.923	16.134.775.885
Lain-lain	45.624.500	-	12.500.000	-	-
Sub jumlah	3.470.680.473	3.814.975.144	17.002.508.196	23.075.169.345	18.381.239.466
Laba Kotor					
Jasa penyedia konten	2.173.717.333	3.449.986.662	10.576.002.576	17.285.621.426	19.180.282.182
Portal web	1.137.921.010	(810.997.108)	287.676.518	(7.660.575.884)	(13.653.069.022)
Lain-lain	27.375.500	-	7.500.000	-	-
Jumlah	3.339.013.843	2.638.989.554	10.871.179.094	9.625.045.542	5.527.213.160

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

i. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

KETERANGAN	31-Mar		31-Des		
	2018	2017	2017	2016	2015
Jasa penyedia konten dan portal web	6.736.694.316	6.453.964.698	27.853.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Jasa <i>design</i>	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Jumlah	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626

Secara keseluruhan, peningkatan penjualan Perseroan terutama dikontribusikan oleh pendapatan dari portal web yang secara konsisten telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh penambahan jumlah pemasangan iklan oleh pelanggan Perseroan. Perseroan juga tidak melakukan perubahan tarif iklan sehingga tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 6.809.694.316, mengalami peningkatan sebesar Rp 355.729.618 atau sebesar 5,51% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 6.453.964.698. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jasa iklan berbasis website di suara.com dan jasa design.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 27.873.687.290, mengalami penurunan sebesar Rp 4.846.527.597 atau sebesar 14,76% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 32.700.214.887. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan disalah satu jasa yang diberikan yaitu Penyedia Konten sebesar 41,39%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 32.700.214.887, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.791.762.261 atau sebesar 36,77% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 23.908.452.626. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan terhadap jasa yang diberikan dibidang jasa Penyedia Konten sebesar 23,71%.

ii. Beban Usaha

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

KETERANGAN	31-Mar	31-Mar		31-Des	
	2018	2017	2017	2016	2015
Beban administrasi dan umum					
Gaji karyawan	1.185.217.552	1.260.280.604	5.077.476.879	3.311.393.605	3.188.563.363
Sewa	377.527.767	243.437.270	1.257.167.950	1.025.348.181	842.104.096
Imbalan kerja	148.448.671	185.494.318	718.655.872	822.854.313	468.452.385
Penyusutan	211.450.113	191.427.186	798.572.014	640.296.505	476.541.970
Listrik, telepon dan internet	118.644.081	127.121.564	534.103.807	490.265.169	447.262.665
Legal dan perizinan	129.188.461	186.083.575	298.960.575	49.726.000	4.250.000
Kantor dan perlengkapan	379.730.301	107.715.214	381.736.398	379.440.015	260.083.509
Beban penurunan nilai piutang	-	-	221.863.119	-	-
Jasa profesional	130.000.000	81.632.654	197.882.654	65.000.000	-
Makan dan minum	32.421.349	36.655.801	46.366.348	112.710.439	30.319.503
Transport dan perjalanan	12.756.147	17.793.653	60.066.124	43.145.111	28.109.011
Perbaikan dan pemeliharaan	36.674.110	12.286.296	93.673.771	15.753.587	52.463.043
Pendidikan dan pelatihan	-	-	12.632.000	16.390.000	67.329.207
Asuransi dan kesehatan	2.450.772	2.981.735	10.334.051	11.265.597	8.441.523
Beban portal web	-	-	-	-	-
Lain-lain	3.246.676	-	-	33.230.000	44.358.080
Sub jumlah	2.767.756.000	2.452.909.870	9.709.491.562	7.016.818.522	5.918.278.355
Beban pemasaran					
Perjalanan dinas	34.256.209	-	54.926.776	505.763.116	1.250.000
Kontribusi dan partnership	15.348.688	24.843.490	82.266.719	42.099.000	29.770.503
Jamuan	3.556.400	3.650.000	81.380.894	82.364.142	18.854.439
Sub jumlah	53.161.297	28.493.490	218.574.389	630.226.258	49.874.942
Jumlah	2.820.917.297	2.481.403.360	9.928.065.951	7.647.044.780	5.968.153.297

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 2.820.917.297, mengalami peningkatan sebesar Rp 339.513.937 atau sebesar 13,68% dari beban Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 2.481.403.360. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan perjalan dinas dan biaya jasa profesional dan biaya perlengkapan kantor untuk operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.928.065.951, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.281.021.171 atau sebesar 29,83% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.647.044.780. Hal ini terutama disebabkan oleh komponen yang terbesar dari beban usaha adalah jumlah gaji karyawan, beban penurunan nilai piutang dan peningkatan jasa profesional dan legal dan perizinan kantor seiring dengan berkembangnya Perseroan, maka Perseroan membutuhkan lebih banyak karyawan, profesional, fungsi administrasi dan Operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.647.044.780, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.678.891.483 atau sebesar 28,13% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.968.153.297. Hal ini terutama disebabkan oleh oleh berkembangnya perseroan sehingga membutuhkan karyawan dan perlengkapan kantor untuk menunjang perkembangan perseroan.

iii. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

KETERANGAN	31-Mar	31-Mar	31-Des		
	2018	2017	2017	2016	2015
Pendapatan lain-lain					
Pendapatan bunga	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Laba selisih kurs	1.303.805	-	6.031.022	4.026.757	-
Lain-lain	350.020	701	471.536	-	432.812
Sub jumlah	2.485.320	397.392	7.318.584	23.565.901	432.812
Beban lain-lain					
Beban administrasi					
Bank	2.567.500	4.425.530	8.359.277	23.747.744	26.551.402
Beban bunga	2.894.208	4.778.988	16.614.799	-	-
Rugi selisih kurs	-	2.190.533	-	-	5.069.525
Rugi pelepasan aset	-	-	150.174.735	-	-
Beban pajak	90.726	79.339	2.543.315	30.746.961	515.139
Lain-lain	85.625	52.401	3.266.731	643.864	3.409.196
Sub jumlah	5.638.059	11.526.791	180.958.857	55.138.569	35.545.262
Jumlah	(3.152.739)	(11.129.399)	(173.640.273)	(31.572.668)	(35.112.450)

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 3.152.739. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 11.129.399 atau turun sebesar 71,67%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bunga dan laba selisih kurs.

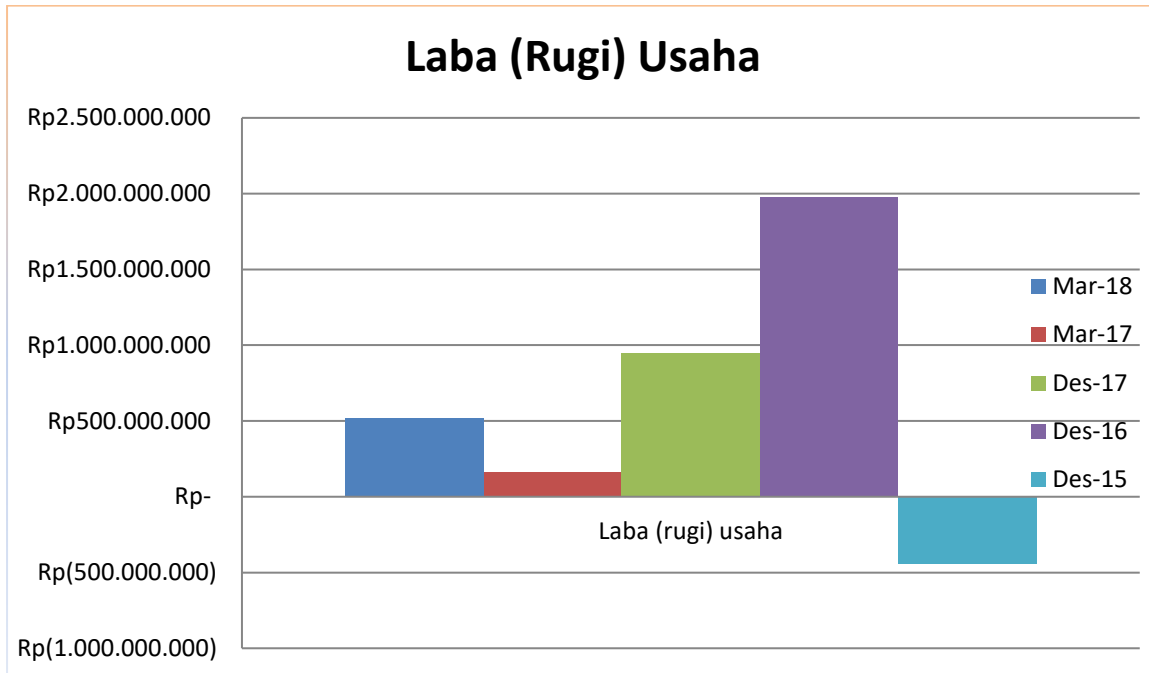
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 173.640.273. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 31.572.668 atau naik sebesar 449,97%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan signifikan terhadap rugi pelepasan aset dan beban bunga bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 31.572.668. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 35.112.450 atau turun sebesar 10,08%. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan bunga dan laba selisih kurs.

iv. Laba (Rugi) Usaha



Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 518.096.546, mengalami peningkatan sebesar Rp 360.510.352 atau sebesar 228,77% dari laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 157.586.194. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 943.113.143, mengalami penurunan sebesar Rp 1.034.887.619 atau sebesar 52,32% dari laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.978.000.762. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang sangat signifikan yaitu biaya-biaya yang untuk mendukung Operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.978.000.762, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.418.940.899 dari laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (440.940.137). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang sangat signifikan.

v. Laba Sebelum Pajak

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 514.943.807, mengalami peningkatan sebesar Rp 368.487.012 atau sebesar 251,60% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 146.456.795. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

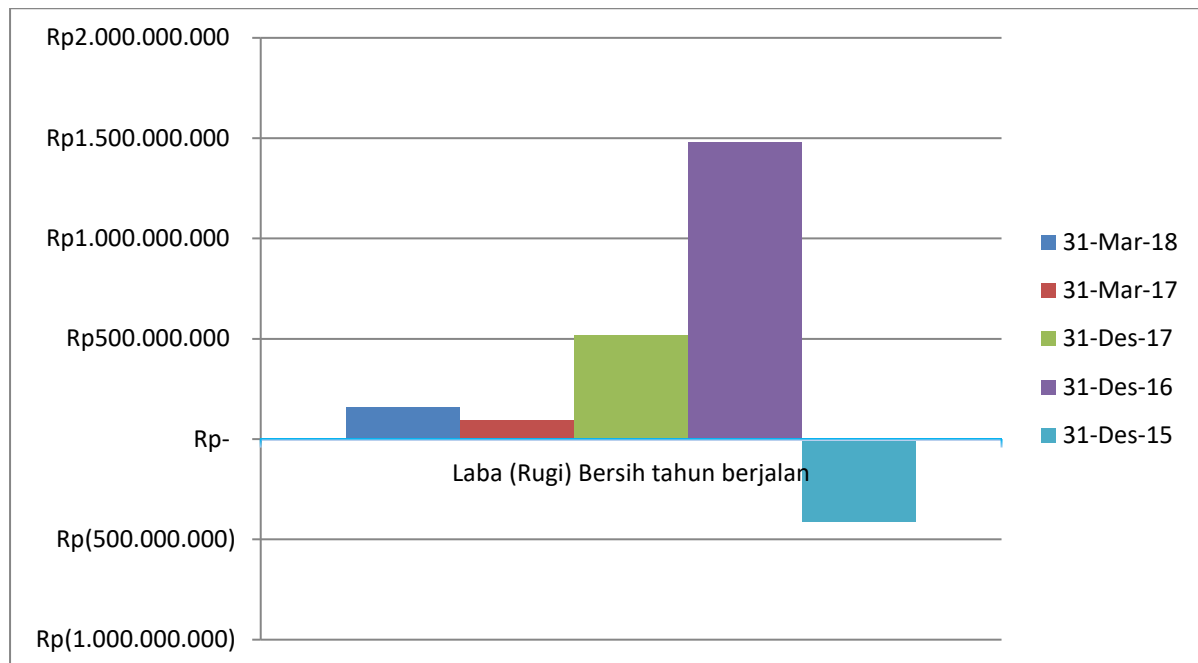
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 769.472.870, mengalami penurunan sebesar Rp 1.176.955.224 atau sebesar 60,47% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.946.428.094. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan meningkatnya beban usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.946.428.094, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.422.480.681 dari laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (476.052.587). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang sangat signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

vi. Laba Bersih Tahun Berjalan



Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 159.981.716, mengalami peningkatan sebesar Rp 67.526.901 atau sebesar 73,04% dari laba bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 92.454.815. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya biaya langsung serta biaya lain-lain perusahaan.

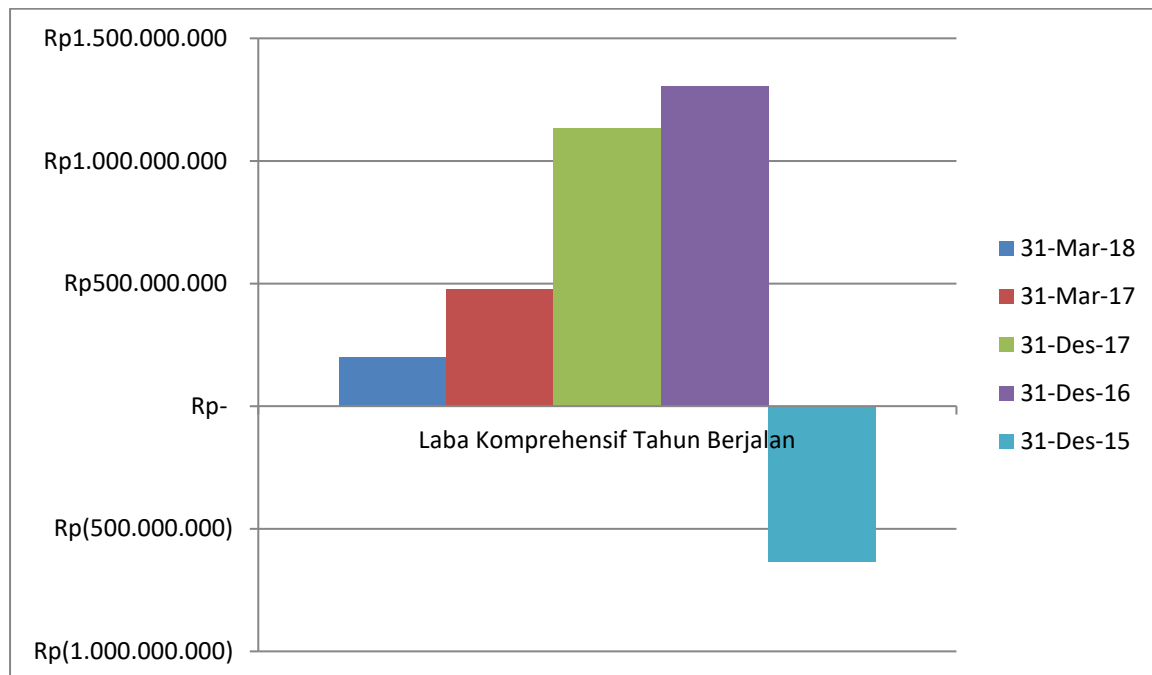
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 516.525.433, mengalami penurunan sebesar Rp 964.926.316 atau sebesar 65,13% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.481.451.749. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha dan turunnya pendapatan perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.481.451.749, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.895.111.143 dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (413.659.394). Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

vii. Laba Komprehensif Tahun Berjalan



Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 200.270.493, mengalami penurunan sebesar Rp 275.938.503 atau sebesar 57,94% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 476.208.996. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penghasilan komprehensif lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

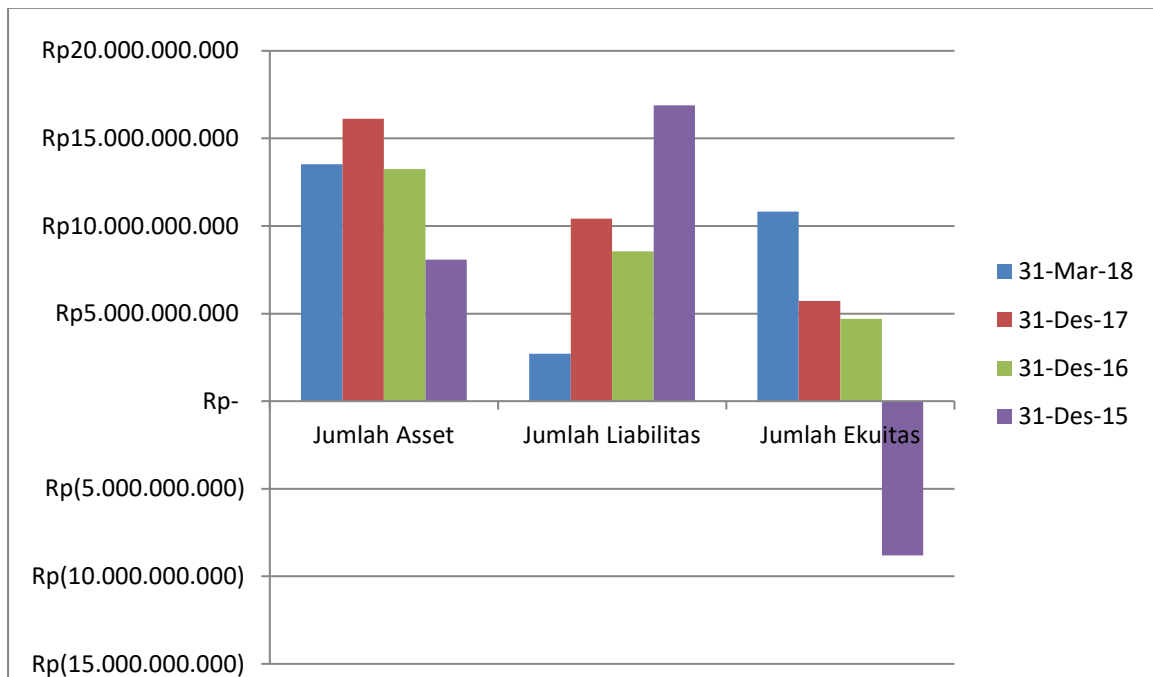
Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.134.304.125, mengalami penurunan sebesar Rp 171.584.121 atau sebesar 13,14% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.305.888.246. Hal ini disebabkan oleh turunnya laba bersih akibat turunnya pendapatan perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.305.888.246, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.941.458.784 dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (635.570.538). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perusahaan.

6. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:



6.1. ASET

KETERANGAN	31-Mar	31-Des		
	2018	2017	2016	2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404
Piutang usaha - pihak ketiga	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048
Piutang lain-lain				
Pihak Berelasi		5.021.200.000	4.321.200.000	-
Pihak Ketiga	11.000.000	118.750.000	171.360.000	600.000
Pajak dibayar dimuka	146.003.493	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	4.005.394.764	2.187.450.464	680.727.008	1.234.929.450
Pendapatan masih harus diterima	26.500.000			
Uang muka	237.192.435	119.288.566	73.167.830	522.625.350
Jumlah aset lancar	11.264.609.262	13.937.021.426	10.937.561.821	6.326.517.252
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - bersih	1.646.833.489	1.491.109.713	1.728.615.189	1.430.085.963
Aset lain-lain	167.600.000	157.600.000	77.600.000	77.600.000
Aset pajak tangguhan	444.018.598	541.086.023	511.882.505	247.647.759
Jumlah aset tidak lancar	2.258.452.087	2.189.795.736	2.318.097.694	1.755.333.722
JUMLAH ASET	13.523.061.349	16.126.817.162	13.255.659.515	8.081.850.974

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 13.523.061.349, menurun sebesar Rp 2.603.755.813 atau 16,15% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 16.126.817.162. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha kepada pihak ketiga dan penurunan piutang lain – lain.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 16.126.817.162, meningkat sebesar Rp 2.871.157.647 atau 21,66% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.255.659.515. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan bruto kepada pelanggan pihak ketiga sebesar Rp 2.744.560.034 atau 93,61%, piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp 700.000.000 atau sebesar 16,20%, dan meningkatnya saldo uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp 1.552.844.192 atau sebesar 205,98%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh piutang usaha – pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.255.659.515, meningkat sebesar Rp 5.173.808.541 atau 64,02% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 8.081.850.974. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp 1.675.384.615 atau sebesar 154,57%, piutang lain - lain pihak berelasi sebesar Rp 4.321.200.000, aset tetap bersih sebesar Rp 298.529.226 atau sebesar 20,87% dan aset pajak tangguhan sebesar Rp 264.234.746 atau sebesar 106,70%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh piutang lain - lain pihak berelasi.

a. Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 11.264.609.262, menurun sebesar Rp 2.672.412.164 atau 19,17% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 13.937.021.426. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp 1.259.959.443 atau sebesar 22,20% dan penurunan piutang lain –lain sebesar Rp 5.128.950.000 atau sebesar 99,79%.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 13.937.021.426, meningkat sebesar Rp 2.999.459.605 atau 27,42% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.937.561.821. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya tagihan bruto kepada pelanggan pihak ketiga sebesar Rp 2.744.560.034 atau 93,61%, piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp 700.000.000 atau sebesar 16,20%, dan meningkatnya saldo uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp 1.552.844.192 atau sebesar 205,98%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh tagihan kepada pelanggan – pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.937.561.821, meningkat sebesar Rp 4.611.044.569 atau 72,88% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.326.517.252. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp 1.675.384.615 atau sebesar 154,57% dan piutang lain - lain pihak berelasi sebesar Rp 4.321.200.000. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh piutang lain - lain pihak berelasi.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 2.258.452.087, meningkat sebesar Rp 68.656.351 atau 3,14% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.189.795.736. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Aset tetap – bersih sebesar Rp 155.723.776 atau sebesar 10,44%.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.189.795.736, turun sebesar Rp 128.301.958 atau sebesar 5,53% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.318.097.694. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Aktiva tetap bersih sebesar Rp 237.505.476 atau 13,74%. Penurunan yang terjadi didominasi oleh penurunan Aset tetap bersih.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.318.097.694, meningkat sebesar Rp 562.763.972 atau 32,06% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.755.333.722. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap – bersih sebesar Rp 298.529.226 atau 20,87%, Aset pajak tangguhan sebesar Rp 264.234.746 atau sebesar 106,70%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh Aset tetap bersih yang dimiliki perseroan diantaranya merupakan server.

6.2. LIABILITAS

KETERANGAN	31-Mar		31-Des	
	2018	2017	2016	2015
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	208.138.569	5.715.942.358	4.475.602.243	2.404.280.254
Utang lain-lain				
Pihak Berelasi	-	321.199.000	-	12.099.644.618
Pihak Ketiga	-	701.593.330	697.758.330	667.798.330
Biaya yang masih harus dibayar	197.610.055	155.321.951	654.614.653	-
Utang pajak	672.200.093	1.467.873.894	619.389.452	627.430.589
Sewa pembiayaan	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.155.997.597	8.453.717.205	6.486.879.721	15.835.715.321
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Sewa pembiayaan				
Jatuh tempo lebih dari setahun	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000
Liabilitas imbalan kerja	1.554.211.272	1.942.480.970	2.047.530.021	990.591.037
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.554.211.272	1.957.516.970	2.066.301.932	1.058.946.037
Jumlah liabilitas	2.710.208.869	10.411.234.175	8.553.181.653	16.894.661.358

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 2.710.208.869, menurun sebesar Rp 7.701.025.306 atau 73,97% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.411.234.175. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah utang usaha kepada pihak ketiga dan utang lain –lain pihak berelasi maupun pihak ketiga, turunnya utang pajak dan liabilitas imbalan kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.411.234.175, meningkat sebesar Rp 1.858.052.522 atau 21,72% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.553.181.653. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 1.240.340.115 atau 27,71%, Utang lain lain pihak berelasi sebesar Rp 321.199.000, Utang pajak sebesar Rp 848.484.442 atau sebesar 136,99%, dan sewa pembiayaan sebesar Rp 52.271.629 atau sebesar 132,28%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh utang usaha pihak ketiga dan utang pajak.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.553.181.653, penurunan sebesar Rp 8.341.479.705 atau 49,37% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 16.894.661.358. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lagi utang berelasi pada 31 Desember 2016, penurunan utang pajak sebesar Rp 8.041.137 atau sebesar 1,28%, sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari setahun sebesar Rp 49.583.089 atau sebesar 72,54%. Sebagian besar dari penurunan yang terjadi didominasi oleh tidak adanya lagi utang berelasi pada 31 Desember 2016.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 1.155.997.595, menurun sebesar Rp 7.297.719.608 atau 86,33% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.453.717.203. Penurunan ini terutama disebabkan adanya perubahan yang signifikan terhadap utang usaha pihak ketiga yang turun sebesar Rp 5.507.803.789 atau 96,36% dan turunnya utang lain – lain pihak ketiga sebesar Rp 701.593.330.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.453.717.203, meningkat sebesar Rp 1.966.837.482 atau 30,32% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.486.879.721. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 1.240.340.115 atau 27,71%, Utang pajak sebesar Rp 848.484.442 atau sebesar 136,99%, Utang lain lain pihak berelasi sebesar Rp 321.199.000 dan sewa pembiayaan sebesar Rp 52.271.629 atau sebesar 132,28%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh utang usaha pihak ketiga dan utang pajak.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 Rp 6.486.879.721, penurunan sebesar Rp 9.348.835.600 atau 59,04% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.835.715.321. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lagi utang berelasi pada 31 Desember 2016.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 1.554.211.272, menurun sebesar Rp 403.305.698 atau 20,60% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.957.516.970. Penurunan ini terutama disebabkan utang imbalan paska kerja yang turun sebesar Rp 388.269.698 atau 19,98% dan sewa pembiayaan sebesar Rp 15.036.000 atau 100%.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.957.516.970, penurunan sebesar Rp 108.784.962 atau 5,26% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.066.301.932. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp 3.735.911 atau 19,90%, Liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp 105.049.051 atau sebesar 5,13%, Sebagian besar dari penurunan yang terjadi didominasi oleh utang imbalan paska kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.066.301.932, meningkat sebesar Rp 1.007.355.895 atau 95,13% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.058.946.037. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp 1.056.938.984 atau 106,70%, Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh liabilitas imbalan paska kerja.

6.3. EKUITAS

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Komponen Ekuitas Lainnya	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Defisit	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2014	600.000.000	-	-	(8.697.189.447)	(8.097.189.447)	(80.050.399)	(8.177.239.846)
Jumlah laba (rugi) setelah penghasilan komprehensif lain	-	-	(219.692.033)	(409.522.800)	(629.214.833)	(6.355.705)	(635.570.538)
Saldo per 31 Desember 2015	600.000.000	-	(219.692.033)	(9.106.712.247)	(8.726.404.280)	(86.406.104)	(8.812.810.384)
Tambahan Modal disetor	12.000.000.000	-	-	-	12.000.000.000	119.400.000	12.119.400.000
Tambahan modal disetor lainnya	-	90.000.000	-	-	90.000.000	-	90.000.000
Jumlah laba (rugi) setelah penghasilan komprehensif lain	-	-	(173.807.868)	1.466.626.632	1.292.818.764	13.069.482	1.305.888.246
Saldo per 31 Desember 2016	12.600.000.000	90.000.000	(393.499.901)	(7.640.085.615)	4.656.414.484	46.063.378	4.702.477.862
Pengaruh perubahan kepemilikan non pengendali atas entitas anak	-	-	(5.299.686)	(66.204.553)	(71.504.239)	(49.694.761)	(121.199.000)
Jumlah laba (rugi) setelah penghasilan komprehensif lain	-	-	617.779.398	518.927.827	1.136.707.225	(2.403.100)	1.134.304.125
Saldo per 31 Desember 2017	12.600.000.000	90.000.000	218.979.811	(7.187.362.341)	5.721.617.470	(6.034.483)	5.715.582.987
Tambahan modal disetor	4.900.000.000	-	-	-	4.900.000.000	-	4.900.000.000
Pengaruh perubahan kepemilikan non pengendali atas entitas anak	-	-	(24.212)	(11.158.064)	(11.182.276)	8.181.276	(3.001.000)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	40.285.453	160.003.690	200.289.143	(18.650)	200.270.493
Saldo per 31 Maret 2018	17.500.000.000	90.000.000	259.241.052	(7.038.516.715)	10.810.724.337	2.128.143	10.812.852.480

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 10.812.852.480, meningkat sebesar Rp 5.097.269.493 atau 89,18% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.715.582.987. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor sebesar Rp 4.900.000.000, tambahan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 40.288.777.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.715.582.987, meningkat sebesar Rp 1.013.105.125 atau 21,54% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.702.477.862. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp 617.778.692. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh penghasilan komprehensif lainnya.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.702.477.862, meningkat sebesar Rp 13.515.288.246 dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (8.812.810.384). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Tambahan modal disetor sebesar Rp 12.000.000.000, tambahan modal disetor lainnya sebesar Rp 90.000.000, dan saldo defisit sebesar Rp 1.466.626.632. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh tambahan modal disetor.

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

	31 Maret		31 Desember		
	2018 (3 Bulan)	2017 (3 Bulan)	2017 (1 Tahun)	2016 (1 Tahun)	2015 (1 Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	8.043.153.759	6.994.100.648	25.129.127.256	33.252.854.971	22.600.629.477
Pembayaran kas kepada pemasok	(10.573.845.981)	(4.289.167.449)	(9.444.346.350)	(15.399.185.059)	(12.497.247.350)
Pembayaran karyawan	(3.161.127.270)	(3.000.668.105)	(12.089.230.664)	(7.989.361.095)	(7.776.983.813)
Penerimaan lainnya	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Pembayaran lainnya	(1.303.267.169)	(1.262.343.426)	(4.465.003.697)	(2.817.596.977)	(3.686.050.495)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(6.994.255.166)	(1.557.681.641)	(868.637.429)	7.066.250.984	(1.359.652.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(367.173.889)	(281.305.014)	(561.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
Perolehan aset lainnya	(10.000.000)	(100.000.000)	(80.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(377.173.889)	(381.305.014)	(641.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal saham	-	-	-	12.119.400.000	119.400.000
Tambahan modal disetor	4.900.000.000	-	-	90.000.000	-
Penerimaan utang lain-lain	-	521.199.000	325.034.000	29.960.000	2.457.617.900
Pembayaran utang lain-lain	(1.022.792.330)	(565.000)	-	(12.099.644.618)	(171.715.000)
Penerimaan piutang lain-lain	5.128.950.000	1.460.000	52.610.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	-	(700.000.000)	(700.000.000)	(4.491.960.000)	(600.000)
Pembayaran leasing	(26.582.998)	(34.070.085)	(113.274.654)	(99.796.020)	(73.932.973)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.979.574.672	(211.976.085)	(435.630.654)	(4.452.040.638)	2.330.769.927
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	1.608.145.617	(2.150.962.740)	(1.945.334.621)	1.675.384.615	327.450.510
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	813.930.398	2.759.265.019	2.759.265.019	1.083.880.404	756.429.894
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	2.422.076.015	608.302.279	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (6.994.255.166), menurun sebesar Rp 5.436.573.525 atau 349,02% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (1.557.681.641). Penurunan arus kas bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 6.284.678.532 atau 146,52%.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (377.173.889), naik sebesar Rp 4.131.125 atau 1,08% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (381.305.014). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset lainnya sebesar Rp 90.000.000 atau 90,00%.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 8.979.574.672 meningkat sebesar Rp 9.191.550.757 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (211.976.085). Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh tambahan modal disetor sebesar Rp 4.900.000.000.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (868.637.429), turun sebesar Rp 7.934.888.413 atau 112,29% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.066.250.984.

Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 8.123.727.715.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (641.066.538), naik sebesar Rp 297.759.193 atau 31,72% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (938.825.731) tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 377.759.193 atau 40,24%.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (435.630.654), naik sebesar Rp 4.016.409.984 atau 90,22% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (4.452.040.638). Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh penerimaan utang lain – lain sebesar Rp 12.099.644.618.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.066.250.984, meningkat sebesar Rp 8.425.903.165 atau 619,71% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (1.359.652.181) Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok Rp 2.901.937.709, pembayaran kepada karyawan Rp 212.377.282.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (938.825.731), menurun sebesar Rp 295.158.495 atau 45,86% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (643.667.236). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap sebesar Rp 295.158.495.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (4.452.040.638), menurun sebesar Rp 6.782.810.565 atau 291,01% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.330.769.927. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh tambahan modal disetor Rp 12.090.000.000.

8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset (%)	20,04%	64,56%	64,52%	209,04%
Rasio Utang Terhadap Modal (DER) (%)	25,06%	182,16%	181,89%	-191,71%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)	0,72%	1,87%	1,24%	-1,19%
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (%)	79,96%	35,44%	35,48%	-109,04%

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 20,04%, 64,56%, 64,52%, dan 209,04%. Peningkatan rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan terutama disebabkan oleh kewajiban di tahun 2017 sebesar Rp 10.411.234.173 akan ditutupi dengan Aset sejumlah Rp 16.126.817.162.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 25,06%, 182,16%, 181,89%, dan -191,71%. Peningkatan Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh utang 31 Desember 2015 sebesar Rp 16.894.661.358 lebih besar dibanding 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.553.181.653 dan 31 Desember 2017 Rp 10.411.234.173.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,72%, 1,87%, 1,24%, dan -1,19%. Peningkatan rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh penambahan sewa pembiayaan leasing di tahun 2017.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 79,96%, 35,44%, 35,48%, dan -109,04%. Peningkatan rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor pada tahun 2016 sebesar Rp 12.000.000.000.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Margin Laba Usaha (%)	7,61%	3,38%	6,05%	-1,84%
Margin Laba Bersih (%)	2,35%	1,85%	4,53%	-1,73%
Tingkat Pengembalian Aset (%)	1,18%	3,20%	11,18%	-5,12%
Tingkat Pengembalian Modal (%)	1,48%	9,04%	31,50%	4,69%

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 7,61%, 3,38%, 6,05%, dan -1,84%. Peningkatan rasio Margin laba usaha Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan di 31 Desember 2016 sebesar Rp 32.700.214.887 dan diimbangi dengan beban usaha sebesar Rp 7.647.044.780.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 2,35%, 1,85%, 4,53%, dan -1,73%. Peningkatan rasio Margin laba bersih Perseroan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan di 31 Desember 2016 sebesar Rp 32.700.214.887 dan diimbangi dengan biaya langsung sebesar Rp 23.075.169.345, beban usaha sebesar Rp 7.647.044.780, biaya lain-lain Rp 31.572.668 dan beban pajak Rp 354.962.091.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1,18%, 3,20%, 11,18%, dan -5,12%. Peningkatan rasio Tingkat pengembalian aset

Perseroan terutama disebabkan oleh Laba setelah pajak pada 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 1.895.111.144 dengan jumlah aset sebesar Rp 13.255.659.515.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1,48%, 9,04%, 31,50%, dan 4,69%. Peningkatan rasio Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh Laba setelah pajak pada 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 1.895.111.144 dengan jumlah ekuitas sebesar Rp 4.702.477.863.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i> (%)	209,52%	9,63%	42,54%	6,84%
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i> (%)	592,52%	137,58%	156,99%	28,85%
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i> (%)	974,45%	164,86%	168,61%	39,95%

Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 209,52%, 9,63%, 42,54%, dan 6,84%. Peningkatan rasio kas Perseroan terutama disebabkan oleh utang jangka pendek pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.486.879.721 ditutupi dengan kas dan setara kas sebesar Rp 2.759.265.019 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.835.715.321 ditutupi dengan kas dan setara kas sebesar Rp 1.083.880.404 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.453.717.203 ditutupi dengan kas dan setara kas sebesar Rp 813.930.398.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 592,52%, 137,58%, 156,99%, dan 28,85%. Peningkatan rasio cepat Perseroan terutama disebabkan oleh utang jangka pendek pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.453.717.203 akan ditutupi dengan kas dan piutang sebesar Rp 11.630.282.396 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.486.879.721 akan ditutupi dengan kas dan piutang sebesar Rp 10.183.666.983 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.835.715.321 akan ditutupi dengan kas dan piutang sebesar Rp 4.568.962.452.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 974,45%, 164,86%, 168,61%, dan 39,95%. Peningkatan rasio lancar Perseroan terutama disebabkan oleh utang jangka pendek pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.453.717.203 akan ditutupi dengan aktiva lancar sebesar Rp 13.937.021.426 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.486.879.721 akan ditutupi dengan aktiva lancar sebesar Rp 10.937.561.821 dan utang jangka pendek pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.835.715.321 akan ditutupi dengan aktiva lancar sebesar Rp 6.326.517.252.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari pendanaan dari non perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

9. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Maret 2018 dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Sewa Pembiayaan	78.048.880

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka pendek dan Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 masing-masing sebesar 81% dan 19% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

Perseroan memiliki saldo Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun, yang akan jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar 19% dari total pinjaman Perseroan yang masih terutang.

10. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk perangkat keras dan infrastruktur. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp 367.173.897 untuk periode 31 Maret 2018, dan Rp 549.430.901, Rp 938.825.731, dan Rp 503.778.524 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun 2017, 2016, dan 2015.

Keterangan	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Perolehan Aset Tetap	367.173.897	711.241.273	938.825.731	643.667.236

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN

Risiko Penurunan Belanja Iklan

Pendapatan terbesar media digital berasal dari pemasukan iklan yang tayang di media (online) maupun pendapatan terkait aktivitas perseroan (offline). Baik iklan yang didapat langsung oleh tim penjualan (direct sales), iklan berjaringan (ad network) maupun programatik. Cara kerja iklan ini berbeda-beda. Bila iklan langsung adalah iklan yang didapat Perseroan dari hasil kerja tim penjualan secara langsung, biasanya dari pemasang iklan atau biro iklan, maupun lembaga/perusahaan pemasang iklan. Iklan berjaringan atau ad network adalah iklan yang dipasang oleh biro iklan ke widget milik perseroan secara otomatis. Sedangkan iklan programatik mengotomatisasi iklan yang akan tayang mengikuti perilaku pengakses.

Selama ini pendapatan iklan yang diperoleh dari penjualan langsung (direct sales) lebih tinggi karena harga ditentukan Perseroan. Pihak pemasang iklan langsung bernegosiasi dengan tim penjualan untuk mendapat harga bagus. Namun, iklan yang diperoleh melalui tim penjualan langsung ini mendapat tantangan baru dengan banyaknya produk yang memasang iklan melalui ad network. Pemasang iklan memilih ad network karena harga dinilai lebih murah dan muncul di banyak website. Namun demikian, banyak juga perusahaan dan lembaga yang tetap memilih pasang iklan secara langsung, untuk mendapatkan hasil maksimal. Termasuk bisa memodifikasi iklan berdasarkan tema-tema tertentu hingga permintaan khusus.

Persaingan untuk mendapatkan iklan media digital juga mendapat tantangan dari perubahan pemasang iklan yang tidak hanya mengandalkan media online. Pemasang iklan juga banyak yang menggunakan media sosial, halaman pencarian, maupun platform digital lain. Ini berimbas persaingan iklan di media digital meluas tidak hanya media berita, namun juga masuk ranah media sosial.

Pendapatan lain berasal dari aktivitas langsung (offline activity), berupa kegiatan-kegiatan yang dibuat perseroan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut mendapat sponsor dari badan usaha, lembaga atau perusahaan.

Penurunan iklan juga bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi secara umum sedang seret atau turun. Memburuknya ekonomi yang diikuti kenaikan biaya produksi, akan mendorong pemasang iklan mengurangi biaya promosi. Atau alasan lain, yakni penurunan traffic yang berimbas pemasang tidak tertarik memasang iklan di website yang memiliki traffic rendah. Ini juga berlaku di ad network atau iklan berjaringan yang sangat tergantung pada besaran jumlah pengunjung website yang didapat oleh media tersebut. Bila pengunjung tinggi, iklan yang didapat akan besar, sedangkan bila pengunjung website rendah, maka pendapatan Perseroan juga turun.

Terhadap adanya risiko pengurangan iklan dari tim penjualan langsung digerogeti oleh iklan berjaringan, perseroan mengembangkan iklan konten kreatif, programatik, hingga iklan-iklan yang disajikan secara multimedia. Iklan konten kreatif bersumber pada artikel, video hingga grafis. Iklan programatik menawarkan program-program khusus yang dibuat oleh Perseroan. Sedangkan untuk multimedia, iklan yang masuk dalam tayangan video.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kesuksesan Perseroan Tergantung Sambutan Pembaca Pada Konten dan Platform

Bisnis informasi digital berisiko ditinggal pembaca atau pengakses karena saat ini informasi sangat mudah ditemui di internet dan pada dasarnya memproduksi informasi bisa dikerjakan banyak pihak. Meski tidak memiliki keahlian khusus, sekelompok orang dapat memproduksi konten sebanyak mungkin, dan mendistribusikan ke publik dengan beragam platform, baik website, aplikasi, blog, media sosial, mesin pencari, agregator hingga forum percakapan (chat). Tingkat kesulitan adalah memastikan informasi yang diproduksi tersebut mendapat sambutan pembaca, banyak diakses publik dan akhirnya respon publik terhadap media tinggi. Keberhasilan memproduksi dan mendistribusikan konten adalah ketika konten tersebut mendapat pengakses besar dan informasi tersebut berpengaruh ke banyak pihak, bahkan kemudian menjadi informasi viral. Bila jumlah pengunjung tinggi, pendapatan juga akan meningkat. Sebaliknya, kegagalan akan terjadi apabila konten tidak menarik, distribusi tidak tersebar luas ke beragam platform media dan ujungnya tidak mendapatkan traffic. Akibatnya, pendapatan sulit diperoleh dan keuntungan menurun. Konten kurang menarik sulit mendapatkan pengunjung, namun tidak semua konten yang bagus, berkualitas mendapat respon besar dari publik. Banyak juga konten berkualitas, namun tidak mendapat sambutan bagus dari pembaca. Cukup sulit memprediksi keinginan publik yang cepat berubah-ubah. Sebaliknya, juga bisa terjadi traffic kunjungan tinggi, banyak berita populer, mendapat sambutan pembaca cukup tinggi, yang diakibatkan konten tertentu, namun tidak mendapat sambutan dari pemasang iklan sehingga berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kesalahan Teknologi dan Gangguan Jaringan

Media digital memiliki ketergantungan terhadap penggunaan teknologi pemrograman (software) dan infrastruktur/jaringan (hardware). Saat ini teknologi pemrograman berkembang sangat cepat, dengan fitur-fitur baru, semakin canggih, keamanan tinggi, dan apabila tidak diikuti akan ditinggal para pengguna dan pengakses konten. Faktor keamanan dalam bahasa pemrograman dan jaringan sangat penting, karena sangat mungkin website Perseroan akan menghadapi serangan, hingga akses mati. Kebutuhan upgrade teknologi ini terus berkembang, dan ahli teknologi informasi yang dimiliki Perseroan harus terus mengikutinya. Baik dari unsur aplikasi, keamanan, fitur-fitur di tampilan versi mobile, desktop, hingga tampilan yang lebih fresh, kekinian dengan menyoar ke generasi millennial. Kebutuhan agar publik mendapat akses cepat, tersedia di semua platform pengguna menjadi keniscayaan. Selain itu, penggunaan teknologi, sistem jaringan atau infrastruktur mengambil peran penting karena Perseroan sangat tergantung pada akses atau jaringan internet. Semakin lancar bisa diakses, akan memudahkan pembaca dan bisa mendatangkan pengunjung tinggi. Sebaliknya semakin lambat, membuat pengguna semakin kesulitan akses dan website berisiko tidak mendapatkan pengunjung. Kegagalan perseroan mengantisipasi perkembangan teknologi dapat berdampak pada hilangnya kesempatan menarik pengakses potensial dan berpeluang pindah ke media lain. Ujungnya, ini akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan, menurunkan kemampuan Perseroan dalam mendapatkan laba. Teknologi dan jaringan ini menjadi kunci penting selain konten dan iklan. Seperti sisi mata uang, konten dan teknologi informasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

3. Risiko Mendapat Gugatan Hingga Pengadilan

Membuat konten yang berkualitas, informatif, akurat, sesuai kode etik jurnalistik bukan jaminan akan aman dari gugatan hukum. Setiap informasi yang disampaikan ke publik berpotensi mendapat gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas informasi yang disebarluaskan oleh perseroan. Ini bisa terjadi karena setiap informasi yang dibuat Perseroan, tidak selalu membuat senang pihak lain. Ada yang suka, ada juga yang keberatan. Baik itu pihak-pihak yang terkait maupun pembaca yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang beredar di masyarakat. UU ITE memungkinkan pembaca, atau pihak yang merasa nama baiknya dirugikan, menggugat narasumber berita dengan menyertakan Perseroan karena ikut menjadi tempat penyebarluasan. Sedangkan UU Pers sudah memberikan pagar, agar kasus perselisihan yang diakibatkan karena pemberitaan diselesaikan melalui Dewan Pers. Namun tetap masih banyak yang memanfaatkan celah hukum untuk mengajukan ke pengadilan, baik karena karya

jurnalistik yang dibuat para jurnalis maupun karya buatan pengguna (user generate content) yang ada pada kolom komentar, dan artikel kiriman publik. Selalu ada celah hukum yang dicari oleh pihak-pihak yang ingin berperkara atas sebuah kasus yang dinilai mengusik pembaca.

4. Risiko Kenaikan Biaya Produksi Program dan Konten

Salah satu komponen biaya paling mahal dalam bisnis Perseroan adalah memproduksi konten berkualitas, sebanyak mungkin, semenarik mungkin dan sebagus-bagusnya sesuai keinginan publik. Perubahan perilaku pengakses informasi yang ingin mendapat layanan informasi terbaik dalam sajian beragam platform, baik teks, foto, video dan infografis menyebabkan komponen produksi konten berbiaya tinggi. Risiko yang terjadi adalah ongkos produksi membengkak bila semua dikerjakan in-house. Pilihan lain adalah program-program dikerjakan oleh pihak di luar perseroan, namun berimbas akan mengurangi keuntungan atau profit. Sampai saat ini semua konten yang dimiliki perseroan dikerjakan in-house sehingga bisa mengontrol budget. Namun risiko pengeluaran bertambah dengan semakin meningkatnya produksi informasi, kreatifitas dan program-program baru yang diharapkan menjadi sumber pendapatan baru. Pengembangan konten lokal di sejumlah wilayah Indonesia juga menambah beban operasional Perseroan.

5. Risiko Portal Perseroan Bersaing Dengan Aplikasi Agregator

Risiko perseroan lainnya dan bisa berdampak serius terhadap bisnis konten adalah munculnya generasi baru pengakses internet yang lebih suka mengonsumsi informasi melalui aplikasi agregator. Pada saat netizen mengunduh dan menggunakan aplikasi ini, netizen akan mendapat informasi dari beragam media yang lengkap dan dikelola baik oleh agregator. Netizen tidak perlu mengunduh banyak aplikasi news, namun cukup dengan satu aplikasi news agregator yang dapat mengambil semua konten news dari beragam media. Agar tampil menarik dan mengikuti selera pengakses, agregator menyediakan kurator untuk memilih informasi yang dibutuhkan pembaca. Hanya dengan modal platform distribusi konten, agregator kemudian mengambil konten-konten milik media partner dan mendistribusikan pada platform yang mereka buat. Risiko paling serius pada model ini, bila jumlah pengguna aplikasi yang dimiliki Perseroan lebih kecil dibanding agregator, maka netizen cukup memilih menggunakan satu aplikasi agregator untuk mendapatkan berita atau informasi dari beragam media digital. Apalagi bila agregator juga memiliki browser, maka otomatis browser tersebut yang akan menjadi rujukan pertama para pengguna.

6. Risiko Ketergantungan pada Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga

Perseroan sangat tergantung kepada produk yang dilindungi oleh hak cipta atas konten pada kegiatan atau peristiwa tertentu. Kegagalan mendapat hak menayangkan bisa berakibat menurunnya jumlah pengakses. Produk yang dimiliki pihak lain ini bisa berupa artikel, data, foto hingga video. Sejumlah konten eksklusif buatan pihak ketiga, tidak bisa dimuat oleh perseroan karena terbentur hak cipta. Demikian juga untuk konten foto dan terakhir video, saat ini makin banyak dimiliki oleh pihak tertentu sehingga Perseroan tidak memiliki kewenangan memuatnya. Contoh perhelatan Piala Dunia, hanya televisi atau media yang memiliki hak siar yang menayangkan. Demikian juga karya-karya jurnalistik dan non jurnalistik dari berbagai belahan bumi lain yang tidak bisa digunakan karena kendala hak cipta, termasuk informasi yang diproduksi oleh berbagai kantor berita luar negeri, yang saat akses harus berlangganan.

7. Risiko Kegagalan Strategi Usaha Saat Ekspansi

Perseroan berencana ekspansi dengan mengembangkan portal vertikal, konten lokal di banyak kota besar seluruh Indonesia, multimedia berbasis video, komunitas hingga fasilitas jual beli. Tujuan ekspansi dengan memperbesar konten lokal, mengembangkan komunitas, dan portal vertikal adalah untuk memberikan layanan kepada pengunjung agar mendapat semua layanan semua yang dibutuhkan, layaknya belanja di sebuah supermarket. Untuk pengembangan media lokal, perseroan ingin menyediakan konten yang berkualitas di setiap kota dengan isu-isu lokal yang dekat dengan mereka. Agar publik seperti di Jambi, Medan, Ternate, Makassar, Surabaya atau Jayapura mendapatkan konten-konten lokal di mana mereka tinggal, bukan berita jalan macet di Jakarta. Ini juga bagian penting

menyambut datangnya akses internet murah di wilayah atau kota-kota besar seluruh Indonesia. Pengembangan usaha dan strategi usaha perseroan terdapat risiko gagal apabila tidak dilakukan dengan kajian yang matang, cermat dan penuh kehati-hatian.

C. RISIKO UMUM

1. Peraturan dan Kebijakan yang Belum Sinkron

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur konten media digital berpedoman ke UU Pers, UU ITE. Risiko terbesar datang dari UU ITE yang memungkinkan pemerintah mencabut atau menutup akses portal media apabila berita atau konten yang dibuat media digital melanggar peraturan. Konten yang berpotensi mendapat sanksi adalah terkait pornografi, perjudian, terorisme atau menganjurkan kekerasan, mengandung jual beli obat atau kesehatan yang dilarang, kekerasan terhadap anak hingga perdagangan manusia. Biasanya sanksi dimulai dari teguran, sanksi pemblokiran website hingga penutupan akses domain. Sedangkan untuk UU Pers, mulai berlaku pengetatan izin perusahaan media. Hanya media yang terverifikasi Dewan Pers yang akan dilindungi oleh UU Pers. Sedangkan media yang belum atau tidak terverifikasi Dewan Pers, bila ada kasus akan diserahkan ke mekanisme pidana. Untuk mendapatkan status verifikasi ini, media harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya pemimpin redaksi harus mempunyai sertifikat jurnalis tingkat utama, memiliki manajemen dan jurnalis yang liputan, serta berbagai peraturan perusahaan. Media yang tidak terverifikasi Dewan Pers sebagai pemilik mandat UU Pers, tidak masuk kategori pers yang akan dilindungi Dewan Pers sebagai produk pers. Dalam verifikasi media oleh Dewan Pers juga ada kendala teknis, terkait sisi bisnis media. Dewan Pers mensyaratkan akte pendirian harus menyebut perusahaan bergerak di bidang media. Risiko kebijakan yang tidak sinkron ini kurang menguntungkan perseroan dan berimplikasi akan mengurangi pendapatan atau laba.

2. Risiko Persaingan Usaha

Risiko yang diakibatkan karena persaingan usaha bidang media terbuka lebar. Bisnis media adalah bisnis adu gagasan, kreatifitas yang padat modal dan padat karya (pekerja). Beberapa pesaing perseroan yang memiliki akses sumber daya dan dana terus melakukan ekspansi besar-besaran. Stasiun televisi menambah divisi digital untuk memperluas pasar danantisipasi perubahan pemirsanya. Sebaliknya, pemilik media online juga merambah televisi untuk memperkuat konten dan penyebarannya. Promosi agresif dilakukan untuk mendongkrak popularitas Perseroan, hingga menjadi rujukan publik. Perseroan tidak bisa menjamin semua program akan berhasil dalam persaingan di masa yang akan datang. Juga tidak bisa menjamin menjadi pesaing untuk media sejenis lainnya. Namun perseroan bisa merumuskan bagaimana menghadapi persaingan, dengan strategi dan cara berbeda, yang bisa berisiko ke penurunan harga iklan, dan memberikan dampak negatif bagi perseroan. Untuk itu, kemampuan Perseroan mewujudkan strategi usaha, termasuk kreatifitas tim, meningkatkan jumlah konten, menyediakan beragam platform hingga mengeluarkan media-media baru. Dan untuk mewujudkan banyak ide gagasan, hingga implementasi gagasan, dibutuhkan investasi waktu, dana dan tenaga kerja yang besar. Setiap strategi ini mempunyai risiko, baik risiko gagal menghasilkan aliran kas dari ide dan gagasan baru, tidak menguntungkan atau tidak mendapatkan sumber pendapatan baru, termasuk saat Perseroan meluncurkan media-media atau produk baru tidak selalu menghasilkan arus kas sesuai harapan. Apalagi di media digital, pertarungan gagasan dan kreatifitas berkembang sangat cepat dan persaingan sangat ketat. Dalam bisnis media, ada nilai-nilai idealisme, semangat pembelaan minoritas dan tertindas, mengedepankan independensi yang dibungkus dalam etika, sehingga tidak murni bisnis semata. Namun karena persaingan yang tajam dalam bisnis media ini, tidak terhindarkan untuk menyampaikan informasi yang terdepan, cepat dan seringkali ada bumbu bombastis. Persaingan ini tidak terhindarkan karena kebutuhan informasi yang *up to date* dan berisiko pada Perseroan.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri multimedia secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena

itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Akta No. 87 tanggal 24 Agustus 2018 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk:

1. Menyetujui untuk merubah jumlah dan cara pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering (IPO) dan menyetujui untuk menegaskan kembali jumlah dan cara pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada karyawan serta manajemen Perseroan melalui program Employee and Management Stock Ownership Program (EMSOP).
2. Menyetujui rencana Perseroan melakukan IPO dengan pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (Portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai Rp 100 (seratus rupiah) setiap saham, atau sebesar 46,15% (empat puluh enam koma satu lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi kepemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perseroan melalui program Employee and Management Stock Ownership Program (EMSOP) dengan mengalokasikan sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar-besarnya 3,56 (tiga koma lima puluh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dan EMSOP dilakukan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN ANAK PERUSAHAAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian ADM No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Bukit Irama", kemudian diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi "PT Arkadia Digital Media Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No.127/2018**").

Sejak pendirian tahun 2012, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 20 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H, M.Kn., Notaris di Cianjur, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013239.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065947 tanggal 22 Juli 2016, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0085877.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016 ("**Akta No. 14/2016**"), ADM merubah ketentuan tentang permodalan.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 08 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 ("**Akta No. 02/2018**"), ADM merubah ketentuan tentang nama dan kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, susunan pemegang saham, permodalan, nominal saham dan susunan anggota direksi dan dewan komisaris.
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No.127/2018**"), ADM merubah ketentuan tentang nama Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, menyesuaikan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan OJK dan susunan anggota direksi dan dewan komisaris.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwa Sukresno Karunia	5.400	540.000.000	90,00%
2. Welly Yusuf	600	60.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000	900.000.000	

Tahun 2012 – 2015

Tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2016

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Bonifasius Sulistiyono Wibowo, S.H, M.Kn., Notaris di Cianjur, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064727 tanggal 15 Juli 2016, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0084037.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham dari:
 - Iwa Sukresno Karunia sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham kepada Aryana Pramana dan sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham kepada Stephen K Sulistyono;
 - Welly Yusuf sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham kepada Stephen K Sulistyono.

sehingga susunan kepemilikan saham ADM pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwa Sukresno Karunia	2.000	200.000.000	33,33%
2. Aryana Pramana	2.000	200.000.000	33,33%
3. Stephen K Sulistyono	2.000	200.000.000	33,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	9.000	900.000.000	

- Berdasarkan Akta No. 14/2016, para pemegang saham menyetujui kenaikan modal dasar dari semula Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) dan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham ADM pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	480.000	48.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Iwa Sukresno Karunia	42.000	4.200.000.000	33,33%
2. Aryana Pramana	42.000	4.200.000.000	33,33%
3. Stephen K Sulistyono	42.000	4.200.000.000	33,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	126.000	12.600.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	354.000	35.400.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 06 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Amastasia Dau, S.H, Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0109834 tanggal 21 Desember 2016, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0152105.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham dari Aryana Pramana sebanyak 42.000 (empat puluh dua ribu) lembar saham kepada Stephen K Sulistyoy:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	480.000	48.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Stephen K Sulistyoy	84.000	8.400.000.000	66,67%
2. Iwa Sukresno Karunia	42.000	4.200.000.000	33,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	126.000	12.600.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	354.000	35.400.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Amastasia Dau, S.H, Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126616 tanggal 12 April 2017, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048068.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 12 April 2017, terdapat jual beli saham dari:

- i. Stephen K Sulistyoy sebanyak 43.050 lembar saham dengan rincian 12.600 (dua belas ribu enam ratus) lembar saham kepada Aldrian Suwardi Chandra, 12.600 (dua belas ribu enam ratus) lembar saham kepada Steven, 12.600 (dua belas ribu enam ratus) lembar saham kepada Suwarjono dan 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar saham kepada Wiliam Martaputra;
- ii. Iwa Sukresno Karunia sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) lembar saham kepada Wiliam Martaputra.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	480.000	48.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Stephen K Sulistyoy	40.950	4.095.000.000	32,50%
2. Iwa Sukresno Karunia	40.950	4.095.000.000	32,50%
3. Aldrian Suwardi Chandra	12.600	1.260.000.000	10,00%
4. Steven	12.600	1.260.000.000	10,00%
5. Suwarjono	12.600	1.260.000.000	10,00%
6. Wiliam Martaputra	6.300	630.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	126.000	12.600.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	354.000	35.400.000.000	

Tahun 2018

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 02/2018.

Berdasarkan Akta No. 02/2018, para pemegang saham telah menyetujui kenaikan modal dasar dari semula Rp Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) menjadi Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) dan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp 12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), perubahan nominal saham menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) dan menyetujui pengalihan saham dari Aldrian Suwardi Chandra sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham kepada Wiliam Martaputra serta pengalihan saham dari Steven sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham kepada Wiliam Martaputra, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
2. Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
3. Wiliam Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%
4. Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%
5. Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%
6. Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000	

Rincian penambahan modal oleh para pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama	Nilai Nominal Saham Sebelum Penambahan <small>*Setelah pengalihan oleh Aldrian Suwardi Chandra dan Steven</small>	Jumlah Penambahan Saham	Setelah Penambahan
Stephen K. Sulistyio	4.095.000.000	1.592.500.000	5.687.500.000
Iwa Sukresno Karunia	4.095.000.000	1.592.500.000	5.687.500.000
Aldrian Suwardi Chandra	630.000.000	245.000.000	875.000.000
Steven	630.000.000	245.000.000	875.000.000
Suwarjono	1.260.000.000	490.000.000	1.750.000.000
Wiliam Martaputra	1.890.000.000	735.000.000	2.625.000.000

Perseroan tidak memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Maret 2012	Perseroan berdiri dengan nama PT Bukit Irama.
Maret 2012	Akta Pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-13641.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012.
Februari 2018	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Arkadia Digital Media.

D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
PT Arkadia Digital Media ("ADM")			
1.	TDP	Tanda Daftar Perseroan (TDP) No. 732/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	04 April 2022
2.	SKDP	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 115/27.1BU.1/31.71.07.1003/-071.562/e/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin	21 Maret 2023

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
3.	NPWP dan SKT	dengan alamat di Sahid Sudirman Center, Lt.19 Unit B-C Jl Jend. Sudirman No.86 RT/RW 10/11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.211.456.3-012.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-377/WPJ.06/KP.1003/2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu pada tanggal 20 Maret 2018.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-58PKP/WPJ.06/kp.1003/2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang tanggal 20 Maret 2018.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
5.	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 266/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha

PT Arkadia Media Nusantara ("AMN")

6.	TDP	Tanda Daftar Perseroan (TDP) No. 729/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Pusat, dengan alamat Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.19 Unit B-C, Jl.Jend.Sudirman No, 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.	6 Februari 2023
7.	SKDP	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 75/27.1BU.1/31.71.07.1003/-071.562/e/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin, dengan alamat Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C, Jl. Jend. Sudirman No.10/11, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	2 Maret 2023
8.	NPWP dan SKT	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.930.742.8-012.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Tanah Abang dengan Surat Keterangan Terdaftar No. S-379KT/WPJ.06/KP.1003/2018 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
		Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu pada tanggal 20 Maret 2018.	
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-57PKP/WPJ.06/KP/1003/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
10.	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 263/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
11.	Penetapan Kode Akses Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	Penetapan Kode Akses Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas No: 1151/kominfo/DJPPI/PI.02.03/8/2014 tanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penetapan Kode Akses 99156 dan 99155 diberikan kepada AMN untuk penyelenggaraan jasa penyediaan konten. AMN diwajibkan untuk melaporkan penggunaan Kode Akses 99156 dan 99155 setiap 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya kode akses tersebut.	-
12.	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten AMN No.289 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Izin ini diberikan sebagai izin prinsip penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan/atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
13.	Sertifikat Kompetensi Jurnalis	Sertifikat Kompetensi Jurnalis No.2437-AJI/WU/DP/II/2013/5/7/71 tanggal 26 Februari 2013 atas nama Suwarjono dalam jenjang Wartawan Utama.	Sepanjang menjalankan tugas jurnalistik
14.	Sertifikat Kompetensi Jurnalis	Sertifikat Kompetensi Jurnalis No.2348-AJI/WDya/DP/X/2017/01/01/86 tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Erick Tanjung dalam jenjang Wartawan Madya.	Sepanjang menjalankan tugas jurnalistik
15.	Sertifikat Kompetensi Jurnalis	Sertifikat Kompetensi Jurnalis No.5634-AJI/WDya/DP/V/2016/20/2/86 tanggal 6 Juni 2016 atas nama Pebriansyah Ariefana dalam jenjang Wartawan Madya.	Sepanjang menjalankan tugas jurnalistik

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
16.	Sertifikat Kompetensi Jurnalis	Sertifikat Kompetensi Jurnalis No.11101-AJI/WDa/DP/X/2017/06/06/91 tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Dwi Bowo Raharjo dalam jenjang Wartawan Muda.	Sepanjang menjalankan tugas jurnalistik

PT MATA MEDIA NUSANTARA ("MMN")

17.	TDP	Tanda Daftar Perseroan (TDP) No. 499/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	28 Maret 2023
18.	SKDP	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 80/27.1BU/31.71.07.1003/-071.562/e/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin dengan alamat di Sahid Sudirman Center, Lt.19 Jl Jend. Sudirman No.86 RT/RW 10/11, Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta Pusat.	5 Maret 2023
19.	NPWP dan SKT	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.343.972.0-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-400KT/WPJ.06/KP.1003/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
20.	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 498/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha

PT Integra Archipelago Media ("IAM")

21.	TDP	Tanda Daftar Perseroan (TDP) No. 509/24.3PT/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	11 April 2023
-----	-----	---	---------------

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Masa Berlaku
22.	SKDP	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 81/27.1bu/31.71.07.1003/-071.562/e/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin dengan alamat di Sahid Sudirman Center, Lt.19 Unit B-C Jl Jend. Sudirman No.86 RT/RW 10/11, Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta Pusat.	5 Maret 2023
23.	NPWP dan SKT	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.343.973.8-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-399KT/WPJ.06/KP.1003/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha
24.	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 507/24.1PM/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Sepanjang menjalankan kegiatan usaha

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian dengan pihak terafiliasi

PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga, sedangkan Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Penyediaan Konten antara PT Indosat Tbk dengan AMN, No Indosat: 071/B00-BOP/LGL/2014 dan No.CP: 001/PKS/AMN-IND/XI/2014 tanggal 26 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT Indosat Tbk dengan AMN tentang Layanan Penyediaan Konten tanggal 22 Mei 2017, No Amandemen: 086/AM0-AMB/LGL/2017.

AMN dan Indosat melakukan kerjasama penyediaan konten, dengan jangka waktu perjanjian sejak 26 Agustus 2014 dan akan tetap berlaku sampai diakhirinya perjanjian oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian, maka kewajiban AMN antara lain sebagai berikut:

- i. Membuat dan menyediakan konten yang dapat diakses melalui sebagian atau seluruh layanan konten (SMS, MMS, GPRS, WEB, WAP, UMB, STK dan IVR) oleh pelanggan, termasuk untuk instalasi,

-
- percobaan (*testing*) termasuk tes penerimaan, operasional dan perawatan atas layanan konten dalam setiap *platform*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Indosat.
- ii. AMN wajib melakukan pembayaran atas biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan kewajiban pelayanan *universal* terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan penyediaan konten milik AMN, tertanggal 26 Agustus 2014.
 - iii. AMN wajib memenuhi pendapatan minimum sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan perjanjian tersebut, pendapatan atas layanan konten akan dibagi oleh AMN dan Indosat berdasarkan pola *revenue sharing*. Selanjutnya AMN dan Indosat sepakat untuk melakukan review terhadap tarif dan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) setiap 6 (enam) bulan sekali, jika dibutuhkan. AMN dan Indosat akan mencatat dan menyediakan hasil pencatatan data trafik layanan konten yang akan menjadi perhitungan bagi hasil. Data yang menjadi acuan penagihan adalah data milik Indosat, dengan ketentuan jika terdapat selisih data trafik para pihak kurang dari 5% (lima persen).

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap Indosat, yang memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan Perseroan, dimana kontrak dari Indosat berkontribusi sebesar Rp 21.298.854.875 di tahun 2015 (89% dari total pendapatan konsolidasi), sebesar Rp 27.418.740.248 di tahun 2016 (84% dari total pendapatan konsolidasi), sebesar Rp 16.204.136.366 di tahun 2017 (58% dari total pendapatan konsolidasi), dan sebesar Rp 2.723.791.721 di Maret 2018 (40% dari total pendapatan konsolidasi).

Dalam hal AMN tidak dapat memenuhi kewajiban pendapatan minimum yang telah ditetapkan Indosat, maka Indosat berhak untuk mengakhiri perjanjian.

2. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Telekomunikasi XL untuk Penyediaan Konten AMN, No. XL: 1151/DS.I.1.1151/XL/III/2016 tanggal 1 Desember 2015 antara PT XL Axiata Tbk (“XL”) dengan AMN.

AMN dan XL melakukan kerjasama dimana AMN dapat menyediakan konten kepada pelanggan XL dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang dimiliki XL. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2015 dan akan tetap berlaku sampai diakhirinya perjanjian oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan perjanjian, maka kewajiban AMN antara lain sebagai berikut:

- i. Wajib mengikuti dan/atau mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam *Digital Merchant Policy* sebagaimana disampaikan oleh XL kepada AMN.
- ii. Wajib untuk menempatkan server aplikasi di lokasi pelayanan data center resmi sebagaimana tercantum dalam rincian perjanjian.
- iii. AMN wajib memiliki perijinan yang diperlukan sebagai penyedia konten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta wajib mematuhi segala persyaratan di dalamnya, termasuk memperoleh penetapan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas.
- iv. Wajib memiliki semua perizinan yang diperlukan atas setiap konten yang disediakan AMN kepada pelanggan XL sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- v. Wajib memiliki semua hak yang diperlukan untuk melakukan penawaran konten yang disediakan AMN kepada pelanggan XL termasuk namun tidak terbatas pada HAKI atas layanan nilai tambah tersebut.
- vi. AMN wajib untuk menjamin keberlakuan ijin-ijin yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada izin untuk menyelenggarakan konten sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- vii. AMN sepenuhnya bertanggung jawab atas konten dan apabila terdapat tuntutan dari pelanggan XL, organisasi, pemerintah dan/atau pihak lainnya ke XL yang berhubungan dengan konten maka AMN, dengan biaya AMN sendiri wajib untuk membebaskan atau melindungi XL dari segala bentuk kerugian

dan/atau biaya dan/atau kehilangan dan/atau tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan konten yang disediakan tersebut.

- viii. AMN wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan kewajiban pelayanan universal yang dibayarkan melalui XL, yang jumlahnya akan dipotong dari jumlah atas biaya jasa yang diperoleh AMN, yang dituangkan kedalam berita acara *settlement* sebagaimana tertera dalam rincian perjanjian.
- ix. AMN wajib tunduk kepada ketentuan terkait batas keluhan pelanggan XL (*Healty Index*) yang ditetapkan XL dan diinformasikan secara tertulis kepada AMN dari waktu ke waktu.

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan juga memiliki perjanjian sewa menyewa, yaitu:

1. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.12 tanggal 16 Desember 2016 antara Fuad Faisal dan AMN, yang dibuat dihadapan Amalia Susan, S.H., Notaris di Kota Depok.

Berdasarkan perjanjian ini, Fuad Faisal sebagai pemilik bangunan rumah bermaksud menyewakan bangunan tersebut kepada AMN dan AMN bersedia menyewa bangunan tersebut. Obyek sewa dalam perjanjian ini adalah sebuah rumah bertingkat beserta turutannya serta fasilitas sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No.935/Gunung, seluas 1.030 M², yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 8 Februari 1983, terletak di Jl. Sisingamangaraja No.21 Blok F/1 Persil No.80, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 hingga 30 April 2021. Harga sewa yang ditetapkan adalah sebesar Rp 4.400.000.000 untuk jangka waktu selama 48 bulan.

Berdasarkan perjanjian, maka kewajiban AMN adalah sebagai berikut:

- i. AMN berkewajiban untuk memelihara apa yang disewanya termasuk fasilitas-fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya sebagai penyewa yang jujur dan hanya boleh menggunakan apa yang disewakan tersebut menurut sifat dan peruntukannya.
- ii. Selama perjanjian sewa menyewa ini berlangsung, AMN wajib untuk menjalankan dengan baik sebagaimana mestinya atas beban dan biaya sendiri yaitu atas pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan kebersihan dari obyek sewa dan bagian-bagiannya yang disewanya tersebut di atas.
- iii. Jika terjadi kerusakan kecil maupun kerusakan besar yang disebabkan oleh kerusakan kecil yang tidak segera diperbaiki, maka AMN wajib memperbaiki kerusakan – kerusakan tersebut dan seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab oleh AMN sendiri.
- iv. Segala kerusakan yang timbul kesalahan maupun kekhilafan AMN ataupun pihak lainnya yang masih ada hubungannya dengan AMN, baik yang dikarenakan hubungan kerja, relasi maupun keluarga yang ikut berada di dalam obyek sewa tersebut, semuanya adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- v. Pihak kedua harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Fuad Faisal untuk segala perubahan-perubahan pada obyek sewa menurut akta ini kecuali untuk pengecatan dan perawatan.
- vi. Segala bentuk renovasi yang sudah menjadi bagian dari obyek sewa, tidak boleh dibongkar atau dipindahkan oleh AMN, sehingga mengakibatkan kerusakan pada obyek sewa tersebut, dan dengan demikian menjadi milik Fuad Faisal dan AMN tidak berkewajiban untuk menuntut penggantian kepada Fuad Faisal bekas biaya renovasi obyek sewa tersebut, sedangkan untuk pemasangan AC yang baru yang dilakukan oleh AMN, maka AMN berkewajiban untuk merapihkan kembali seperti keadaan semula bekas pembongkaran tersebut.
- vii. AMN berkewajiban serta mengikat diri pula untuk menyerahkan obyek sewa dalam keadaan baik (terpelihara) pada waktunya, jika perjanjian sewa menyewa ini berakhir, yaitu pada tanggal 30 April 2021.
- viii. Apabila setelah lewat 7 hari masa sewa berakhir, yaitu tanggal 7 Mei 2021, AMN lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian, maka AMN akan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 setiap harinya, sebagai keterlambatan penyerahan obyek

sewa tersebut kepada Fuad Faisal.

- ix. Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, yaitu tanggal 14 Mei 2021, AMN tidak mengosongkan seluruhnya atas obyek sewa tersebut, maka Fuad Faisal dengan ini diberikan kuasa oleh AMN untuk mengosongkan sendiri obyek sewa tersebut tanpa diwajibkan untuk menyediakan akomodasi penampungan berupa apapun juga untuk kepentingan AMN atau membayar ganti rugi kerugian berupa apapun dan berapapun jumlahnya kepada AMN.
- x. Untuk keperluan pengosongan tersebut di atas, maka Fuad Faisal (yang diberi kuasa) berhak untuk dan/atau tanpa bantuan dari pihak yang berwenang melakukan segala tindakan tanpa pengecualian.
- xi. Apabila AMN karena sesuatu hal mengakhiri perjanjian sewa menyewa ini secara sepihak sebelum masa sewa ini berakhir, maka AMN tidak dapat menuntut kembali kepada Fuad Faisal atas pengembalian sisa uang sewa yang belum dijalani, akan tetapi sisa uang sewa tersebut sepenuhnya menjadi milik Fuad Faisal.
- xii. AMN wajib mematuhi semua peraturan dari yang berwajib khususnya dibidang kesusilaan dan ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai apa yang disewanya dengan perjanjian ini, dan AMN menjamin bahwa mengenai hal itu Fuad Faisal tidak akan mendapat teguran dan tuntutan apapun juga serta untuk itu AMN dengan ini menjamin dan membebaskan Fuad Faisal sepenuhnya dari setiap tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang timbul dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan penggunaan obyek sewa selama jangka waktu sewa berlangsung.

2. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 13 Februari 2018 antara Retno Wahyu Ningsih dan MMN, yang dibuat dihadapan Melany, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan perjanjian ini, Retno Wahyu Ningsih sebagai pemilik bangunan rumah bermaksud menyewakan bangunan tersebut kepada MMN dan MMN bersedia menyewa bangunan tersebut. Obyek sewa dalam perjanjian ini adalah sebuah rumah toko (ruko) 3,5 lantai, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00130/Baciro, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 2000, terletak di Jl. Jl. Mawar No. 6 A, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta.

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018 hingga 12 Februari 2020. Harga sewa yang ditetapkan adalah sebesar Rp 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta Rupiah).

Berdasarkan perjanjian, maka kewajiban MMN adalah sebagai berikut:

- i. MMN wajib untuk memelihara apa yang disewanya;
- ii. Semua biaya untuk menyelesaikan pembangunan (finishing), pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena perbuatan atau kealalaian MMN atas bangunan yang disewanya tersebut selama pernjajian ini berlangsung menjadi tanggung jawab MMN untuk memperbaikinya;
- iii. Bilamana MMN akan memperbaiki/mengadakan perubahan terhadap bangunan yang disewanya, MMN wajib mendapat persetujuan dari Retno Wahyu Ningsih;
- iv. Segala perbaikan/perubahan yang telah dilakukan oleh MMN pada bangunan tersebut, menjadi milik Retno Wahyu Ningsih dan Retno Wahyu Ningsih tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada MMN atas perbaikan tersebut.

F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki asuransi sedangkan Perusahaan Anak telah memiliki asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi Karyawan

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	2000018812-00	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	AMN	144 orang, termasuk karyawan AMN dan suami/istri dan anak karyawan AMN.	Asuransi Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan Kumpulan	112.733.500	24 Desember 2017 s/d 23 Desember 2018.

2. Asuransi Kendaraan

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	TAGON 84532190 17	PT Asuransi Astra Buana	AMN	Toyota Avanza Grand New G 1.3 AT No.Rangka MHKM5EB3JHK009796.	Asuransi Kendaraan Bermotor (Comprehensive)	202.200.000	28 Februari 2017 – 28 Februari 2019

G. ASET TETAP

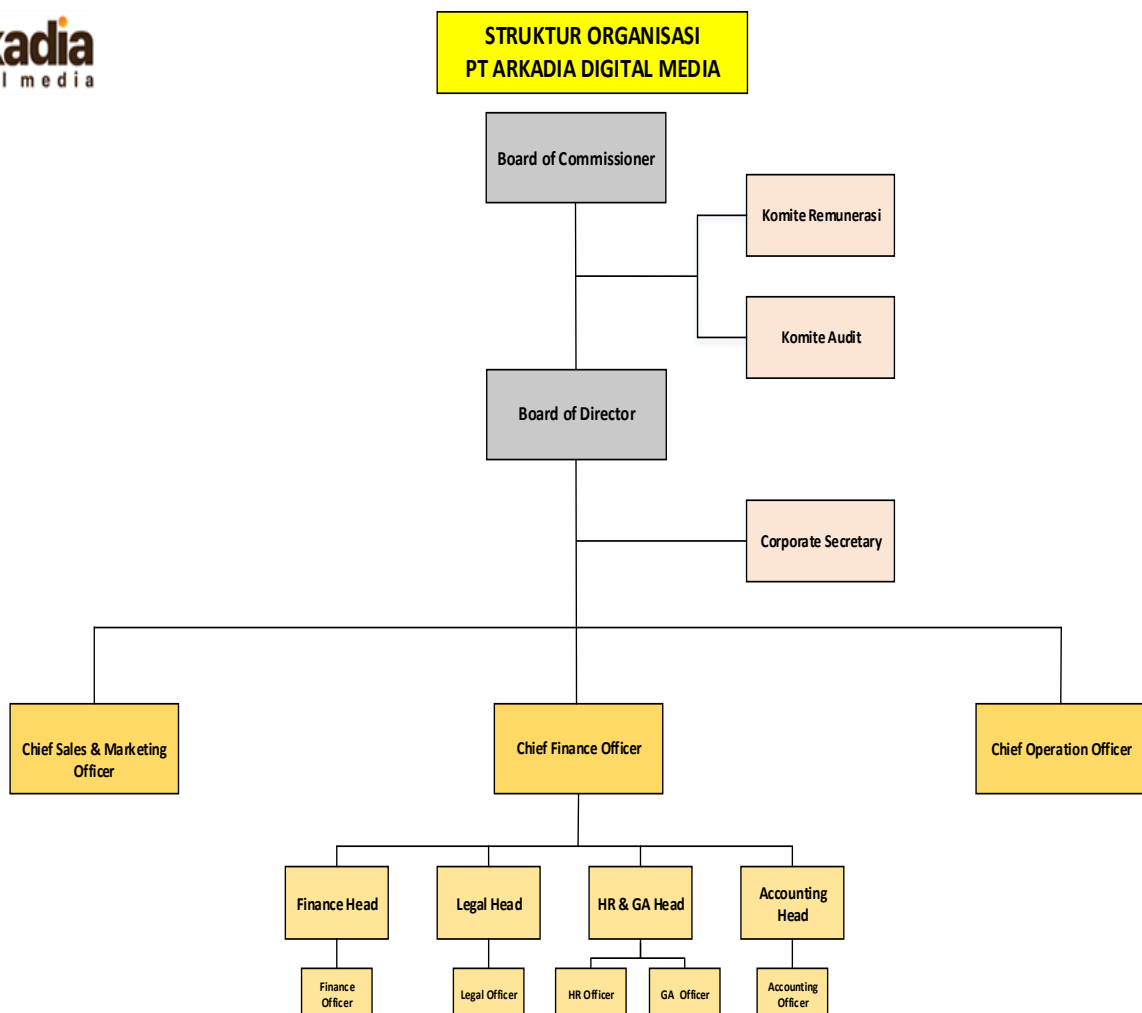
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki aset tetap.

H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

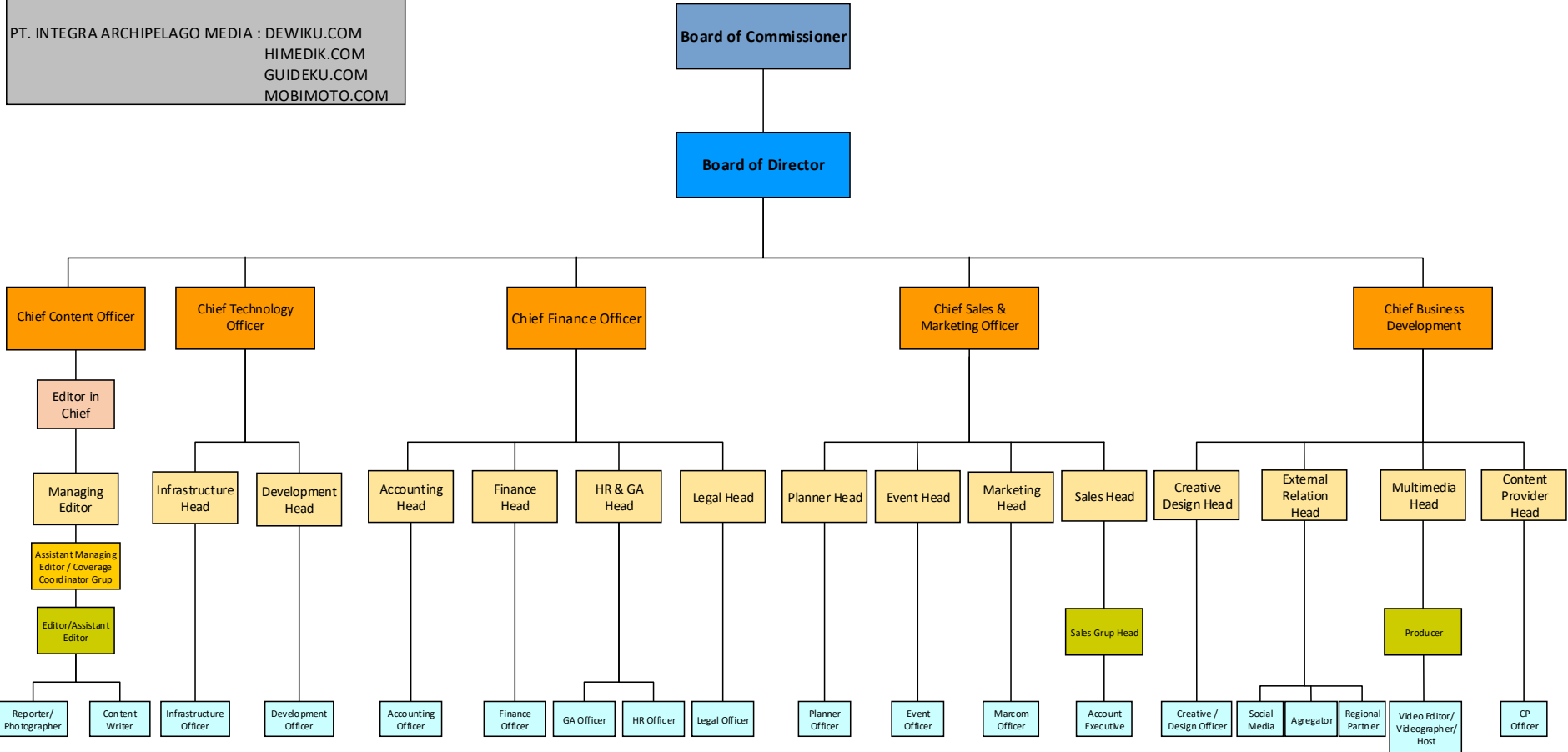
Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

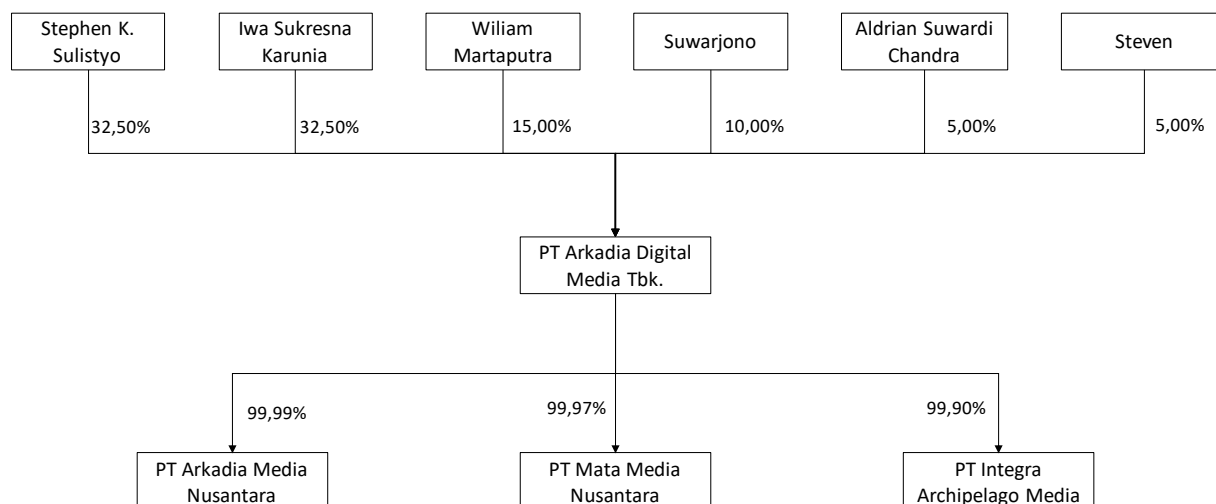
Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



PT. ARKADIA MEDIA NUSANTARA : SUARA.COM
 PT. MATA MEDIA NUSANTARA : MATA-MATA.COM
 HITEKNO.COM
 BOLATIMES.COM
 PT. INTEGRA ARCHIPELAGO MEDIA : DEWIKU.COM
 HIMEDIK.COM
 GUIDEKU.COM
 MOBIMOTO.COM

STRUKTUR ORGANISASI





Perseroan saat ini dikendalikan oleh Stephen K. Sulisty, selaku pemegang saham dari Perseroan.

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 127/2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulisty
 Komisaris : Iwa Sukresno Karunia
 Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

Direksi

Direktur Utama : Wiliam Martaputra
 Direktur : Suwarjono
 Direktur Independen : Fastabiqul Khair Algotot

Dewan Komisaris



Stephen K. Sulisty **Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar *Bachelor of Science Degree in Business Administration*, dari California State University, USA pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya adalah Komisaris Utama PT ACR Global Investments (2015 – sekarang), Komisaris PT Perdana Gapuraprima Tbk / GPRA.IJ. (2015 – 2018), *Senior Managing Director of Business Development & Investment* di PT Rajawali Corpora (2008-2015) dan beberapa posisi penting lainnya di anak-anak perusahaan Grup Rajawali, Komisaris PT BW Plantation Tbk / BWPT.IJ. (2014-2015) dan Komisaris Independen (2007-2013), Direktur Utama di PT Global Informasi Bermutu (2004-2008), Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk / MNCN.IJ (2004-2008), Komisaris PT MNC Sky Vision Tbk / MSKY.IJ (2004-2008), dan Direktur MNC Investama Tbk / BHIT.IJ (2003- 2008).



Iwa Sukresno Karunia

Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surabaya pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, ia menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Pemilik dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi tali kawat baja dan peralatan kelautan (1989 – sekarang), Penambangan dan peleburan Timah di kepulauan Bangka dan Belitung (2013 – sekarang), Pemasok avionik dan perawatan pesawat untuk Angkatan Udara Republik Indonesia (1992 - 1998).



Ariyo Ali Suprpto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, Saat ini berusia 39 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, jabatan lainnya adalah sebagai konsultan *Business Development* (2015-sekarang), *General Manager of Business Development* di PT Rajawali Corpora (2008-2015), Direktur di PT Karyabumi Papua (2010-20112), *Corporate Accounting Section Head* di PT Media Nusantara Citra Tbk / MNCN.IJ (2006-2008), Auditor Senior di Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan (sebelumnya Hans Tuanakotta Mustofa & Halim) anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (2002-2006).

Direksi



Wiliam Martaputra

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 36 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Business, majoring in Economics and Finance dari Royal Melbourne Institute of Technology pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya adalah Direktur PT ACR Global Investments (2015 – sekarang) dan beberapa posisi penting lainnya di anak-anak perusahaan Grup ACR, Director of Business Development di PT Rajawali Corpora (2008-2015) dan beberapa posisi penting lainnya di anak-anak perusahaan Group Rajawali, Head of Investor Relations di PT Express Transindo Utama Tbk / TAXI.IJ (2012-2015), Corporate Finance Manager di PT Global Mediacom Tbk / BMTR.IJ (2008-2008) dan Business Development Manager di PT Media Nusantara Citra Tbk / MNCN.IJ (2006-2008).



Suwarjono

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, jabatan lainnya adalah Pemimpin Redaksi di suara.com (2014 – sekarang) dan beberapa portal lainnya di dalam Grup Perseroan. Koordinator Redaksi di viva.co.id (2008-2014), Koordinator Redaksi di okezone.com (2006-2008), Koordinator Liputan di detik.com (2000-2006) dan berbagai posisi dalam Perusahaan Media Cetak lainnya. Ia juga aktif dalam Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang memiliki anggota lebih dari 2.000 orang Jurnalis di 36 kota di Indonesia sebagai Ketua Umum (2014-2017), Sekretaris Jenderal (2011-2014), dan Ketua Bidang Dana Usaha (2017-sekarang). Selain itu ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan di Asosiasi Media Siber Indonesia (2017-sekarang). Aktif menjadi jurnalis sejak kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.



Fastabiqul Khair Algotot

Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Indonesia pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, ia menjabat sebagai konsultan Business and Financial (2016-sekarang), Audit Committe di PT Express Transindo Utama Tbk / TAXI.IJ (2011-2016), Audit Committe di PT Golden Eagle Energy Tbk / BWPT.IJ (2015), General Manager of Finance and Accounting di PT NettoCyber Indonesia dan PT Rajawali Capital International (2009-2016), General Manager of Finance and Accounting di PT Global Informasi Bermutu (2006-2009), Manager of Finance and Accounting di PT JAS Aero Engineering Services, Audit Manager di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (1992-2004).

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Komisaris akan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi

juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Direksi perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 160.000.000.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang mulai berlaku sejak 30 Mei 2018, Perseroan telah menunjuk Erfan Suryono sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: (021) 724 1888
Faksimili: (021) 724 1887
Email: corsec@arkadiacorp.com

Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi *Unit Corporate Secretary* Perseroan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

- a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d) Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Pendidikan:

S1 Universitas Bina Nusantara, Jurusan Komputerisasi Akuntansi (2004)

S2 Universitas Mercu Buana, Jurusan Magister Manajemen (2008)

Pekerjaan:

Corporate Secretary PT Arkadia Digital Media (2018)

Legal Manager PT Arkadia Media Nusantara (2018)

Tax Assistant Manager PT Express Transindo Utama Tbk (2016-2018)

Tax Supervisor PT Express Transindo Utama Tbk (2012-2016)

Corporate Finance and Good Corporate Governance Supervisor PT Express Transindo Utama Tbk (2009-2012)

Act. Finance Section Head PT Ricobana Abadi (2008-2009)

Auditor Senior PT Bank Bumi Arta Tbk (2004-2008)

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/ADM/BOC/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Arkadia Digital Media Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Ariyo Ali Suprpto
Anggota : Oky Darmawan
Anggota : Nurrachman Hidayat

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Ariyo Ali Suprpto

- Warga Negara Indonesia
- Usia 39 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - *Corporate Accounting Section Head* di PT Media Nusantara Citra Tbk / MNCN.IJ (2006-2008)
 - Auditor Senior di Kantor Akuntan Publik Osman Ramli Satrio & Rekan (sebelumnya Hans Tuanakotta Mustofa & Halim) anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (2002-2006)

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat *General Manager of Business Development* di PT Rajawali Corpora (2008-2015), Direktur di PT Karyabumi Papua (2010-20112).

Anggota : Oky Darmawan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 41 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - *Accounting and Tax Manager* di PT Eagle High Plantation Tbk (2005-2010)
 - *Assistant Supervisor* di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2005)

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai *Head of Finance and Accounting* di PT Eagle High Plantation Tbk (2013-2015), *Senior Manager of Accounting and Tax* di PT Eagle High Plantation Tbk (2011-2013).

Anggota : Nurrachman Hidayat

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Accounting Section Head & Analyst di JAPFA Comfeed Group (2004-2008)
 - Entrepreneur (1996-2000)

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai *Business Development & Investment Manager* di PT Rajawali Corpora (2008-2015), Budget Control Section Head di PT Global Informasi Bermutu (2004-2008).

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 30 Mei 2018 sampai dengan paling lama 5 tahun, yaitu tanggal 30 Mei 2023, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan diangkat pada 30 Mei 2018, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 003/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan No. 003/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Fastabiqul Khair Algotot sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 30 Mei 2018 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

-
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan.
 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/ADM/BOC/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Ariyo Ali Suprpto
Anggota	:	Stephen K. Sulisty
Anggota	:	Iwa Sukresno Karunia

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 30 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.
2. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi ; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

-
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada 30 Mei 2018, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama Perseroan adalah Risiko Penurunan Belanja Iklan. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko Penurunan Belanja Iklan

Terhadap adanya risiko pengurangan iklan dari tim penjualan langsung digerogoti oleh iklan berjaringan, perseroan mengembangkan iklan konten kreatif, programatik, hingga iklan-iklan yang disajikan secara multimedia. Iklan konten kreatif bersumber pada artikel, video hingga grafis. Iklan programatik menawarkan program-program khusus yang dibuat oleh Perseroan. Sedangkan untuk multimedia, iklan yang masuk dalam tayangan video.

b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Kesuksesan Perseroan Tergantung Sambutan Pembaca Pada Konten dan Platform.

Untuk memitigasi risiko ini, strategi Perseroan adalah memproduksi konten berkualitas, sebanyak mungkin, semenarik mungkin dan sebagus-bagusnya sesuai keinginan publik, dan ditampilkan secara unik sehingga membedakan dengan informasi yang ditemui secara umum di internet.

Risiko Kesalahan Teknologi dan Gangguan Jaringan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan terus melakukan peningkatan dan pembaruan infrastruktur dan perangkat keras untuk tetap update dengan kebutuhan perkembangan teknologi. Salah satu tujuan penggunaan dana dari Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Risiko Mendapat Gugatan Hingga Pengadilan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan berupaya untuk selalu mengikuti kode etik jurnalistik dan mematuhi rambu-rambu dalam UU ITE dan UU Pers dalam penyampaian informasi di media digital, sehingga memperkecil potensi perkara hokum dan gugatan pengadilan.

Risiko Kenaikan Biaya Produksi Program dan Konten

Untuk memitigasi risiko ini, pembuatan kreatif konten menjadi andalan. Bagaimana membuat konten menarik, memiliki banyak pengakses, namun berbiaya lebih murah bisa diciptakan. Sumber konten kreatif saat ini sangat banyak berkebar di media digital, sehingga bila ada program-program berbiaya besar, bila tidak mendapatkan sponsor, dengan cepat akan diganti dengan memproduksi program berbiaya minimal.

Risiko Media Perseroan Bersaing dengan Aplikasi Agregator

Untuk memitigasi risiko persaingan dengan aplikasi agregator ini, Perseroan terus menerus berusaha memperkuat branding dari digital media Perseroan di publik untuk menciptakan citra informasi akurat terpercaya yang melekat pada pengguna informasi digital. Selain itu, Perseroan juga membangun agregator sendiri untuk memperkuat dan melengkapi platform media yang dimiliki Perseroan.

Risiko Ketergantungan pada Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga

Perseroan telah menjalin banyak kerjasama dengan pemilik konten, sehingga bila menemui kesulitan dengan konten yang dimiliki pihak ketiga, membuka diri untuk bersinergi dengan pemilik konten lain. Digital juga memberikan peluang untuk kerjasama antar media, kolaborasi, sehingga bila menemui kesulitan atas konten tertentu, bisa mengandalkan kolaborasi, untuk maju bersama-sama.

Risiko Kegagalan Strategi Usaha Saat Ekspansi

Untuk mengantisipasi risiko kegagalan dalam pengembangan dan ekspansi usaha, Perseroan selalu melakukan kajian yang matang, cermat dan penuh kehati-hatian sebelum mengambil keputusan atas ekspansi yang akan dilakukan.

c) RISIKO UMUM

Peraturan dan Kebijakan yang Belum Sinkron

Dalam memitigasi risiko terhadap Perseroan karena peraturan dan kebijakan yang belum sinkron ini, Perseroan sebisa mungkin akan mengikuti pedoman sesuai UU Pers dan UU ITE dalam penyampaian informasi dan konten digital, sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran yang berdampak pada sanksi bagi Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Salah satu keunggulan perseroan menghadapi persaingan usaha di bidang media adalah strategi penguatan konten, platform baru dan distribusi konten yang masih untuk generasi pembaca baru. Sejak berdiri tahun 2014 lalu, perseroan berhasil cepat melejit sejajar dengan media digital yang sudah berusia lama. Dengan prinsip *content is the king* dan *distribution is the queen*, perseroan tumbuh dengan cepat. Membuat konten bagus, konten profesional, independen, dan konten kreatif menjadi andalan. Kekuatan distribusi konten melalui saluran sosial media yang dimiliki perseroan, dengan konten-konten kreatif, dekat dengan pembaca generasi milenial. Ini menjadi andalan sehingga di tengah persaingan media besar yang tumbuh di Indonesia, perseroan cepat mendapat tempat di masyarakat.

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki 11 (sebelas) karyawan, AMN memiliki 83 (delapan puluh tiga) karyawan, dan MMN memiliki 10 (sepuluh) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018, 31 Maret 2017, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, dan status hubungan kerja:

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015		
	2018			2017			2016			2015		
	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	3	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
S1	68	6	9	72	-	-	62	-	-	45	-	-
Diploma	2	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-
SMU	10	3	1	6	-	-	4	-	-	2	-	-
jumlah	83	11	10	83	-	-	69	-	-	48	-	-

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015		
	2018			2017			2016			2015		
	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN
General Manager	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
Manager	9	4	-	11	-	-	10	-	-	3	-	-
SPV	20	-	1	20	-	-	14	-	-	16	-	-
Staff	54	7	9	50	-	-	43	-	-	27	-	-
Jumlah	83	11	10	83	-	-	69	-	-	48	-	-

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Usia

Keterangan	31 Maret 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015		
	2018			2017			2016			2015		
	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN
> 55 tahun					-	-		-	-		-	-
46 - 55 tahun	3	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
36 - 45 tahun	16	3	1	18	-	-	20	-	-	15	-	-
26 - 35 tahun	52	6	5	49	-	-	39	-	-	27	-	-
18 - 25 tahun	12	2	4	12	-	-	8	-	-	6	-	-
jumlah	83	11	10	83	-	-	69	-	-	48	-	-

Komposisi Karyawan di Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	31 Maret 2018			31 Desember 2017			31 Desember 2016			31 Desember 2015		
	2018			2017			2016			2015		
	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN	AMN	Perseroan	MMN
Pegawai Tetap	42	6	-	51	-	-	47	-	-	28	-	-
Pegawai Tidak Tetap	41	5	10	32	-	-	22	-	-	20	-	-
Jumlah	83	11	10	83	-	-	69	-	-	48	-	-

Total Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan di Perseroan dan Anak Perusahaan

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
S3	0	-	-	-
S2	4	1	2	1
S1	83	72	62	45
Diploma	3	4	1	-
SMU	14	6	4	2
jumlah	104	83	69	48

Total Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen di Perseroan dan Anak Perusahaan

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
General Manager	0	2	2	2
Manager	13	11	10	3
SPV	21	20	14	16
Staff	70	50	43	27
Jumlah	104	83	69	48

Total Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia di Perseroan dan Anak Perusahaan

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
> 55 tahun	0			
46 - 55 tahun	3	4	2	-
36 - 45 tahun	20	18	20	15
26 - 35 tahun	63	49	39	27
18 - 25 tahun	18	12	8	6
jumlah	104	83	69	48

Total Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja di Perseroan dan Anak Perusahaan

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Pegawai Tetap	48	51	47	28
Pegawai Tidak Tetap	56	32	22	20
Jumlah	104	83	69	48

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki karyawan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2017, dan hanya memiliki direksi.

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen fasilitas terdiri dari:

- Fasilitas Perawatan Kesehatan (Rawat Jalan dan Rawat Inap)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Bonus Kinerja
- Tunjangan Pernikahan, Kedukaan dan Melahirkan
- Fasilitas Pelatihan & Pengembangan
- Cuti Besar & Cuti Tahunan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia ("SDM"), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan "*technical and behavioral competencies*".

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan.

Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (*in-house training*)
2. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan

K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Stephen K. Sulistyio	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
2. Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
3. Wiliam Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%
4. Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%
5. Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%
6. Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000	

L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	AMN	MMN	IAM	Pemegang Saham			
					Perseroan	AMN	MMN	IAM
Wiliam Martaputra	DU	DU	DU	DU	15,00%	0,01%	0,03%	0,10%
Suwarjono	D	D	D	D	10,00%	-	-	-
Stephen K Sulistyio	KU	-	-	-	32,50%	-	-	-
Iwa Sukresno Karunia	K	-	-	-	32,50%	-	-	-
Steven	-	-	D	K	5,00%	-	-	-
Aldrian Suwardi Chandra	-	-	K	D	5,00%	-	-	-
David Jusuf	-	K	-	-	-	-	-	-
Fastabiqul Khair Algotot	DI	-	-	-	-	-	-	-
Ariyo Ali Suprpto	KI	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

DI : Direktur Independen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan tidak ada yang berbentuk badan hukum.

M. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

PT Arkadia Media Nusantara berkontribusi sebesar 98,93% terhadap Pendapatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018, PT Mata Media Nusantara belum berkontribusi terhadap Pendapatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018, dan PT Integra Archipelago Media belum berkontribusi terhadap Pendapatan Perseroan per tanggal 31 Maret 2018.

PT ARKADIA MEDIA NUSANTARA ("AMN")

AMN mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2014. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,99%.

Riwayat Singkat AMN

AMN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Arkadia Media Nusantara No. 1 tanggal 10 November 2010, dibuat dihadapan Mirawati Alam, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Perseroan

mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-55465.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0085816.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010.

Sejak tahun 2010, anggaran dasar AMN mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 21 Februari 2018, dibuat dihadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0004157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025799.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 dan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079305 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025799.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079306 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025799.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 ("**Akta No.04/2018**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha AMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AMN, maksud dan tujuan AMN adalah melakukan usaha di bidang Jasa Portal Web.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AMN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa portal web;
 - Penyedia konten dalam bidang media dan telekomunikasi.
- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi:
 - perdagangan alat-alat transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan usaha yang berkaitan.
 - Ekspor - impor dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, microwave dan lain-lain.
 - Ekspor - impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi diantaranya telephone seluler, wireless, mesin-mesin telegram, telex, telstex, faksimili baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait.
 - Ekspor - impor dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait.
- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:
 - Jasa instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan peripheral antara lain meliputi instalasi komputer dan jaringan, UPS, *panel kontrol*, komputer dan jaringan.
 - Jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal serta bidang usaha yang terkait.
 - Konsultasi bidang telekomunikasi antara lain jasa konsultasi telekomunikasi yang meliputi sentral telekomunikasi, sistem pemancar dan penerima radio dan televisi, sistem komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa pengembangan piranti lunak meliputi pembuatan aplikasi, *feasibility study*, otomasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (*maintenance*) sistem baik *software* maupun *hardware* terkait, modifikasi serta perkembangan sistem-sistem serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa pembuatan perangkat lunak (*software*) antara lain menjalankan usaha jasa pengembangan perangkat lunak (*software*) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (*Case Study dan Design*), pengembangan dan pengerjaan (*Development* dan Implementasi), pemeliharaan (*Maintenance*) serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan komunikasi pemasaran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AMN

Berdasarkan Akta No. 04/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AMN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	121.120.000	12.120.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT ARKADIA DIGITAL MEDIA	121.190.000	12.119.000.000	99,99%
2. WILIAM MARTAPUTRA	10.000	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	121.120.000	12.120.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan AMN

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham No.29 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0008548.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048094.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 dan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0126626 tanggal 12 April 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0048094.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 April 2017, ("**Akta No.29/2017**"), susunan manajemen AMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : David Jusuf

Direksi:

Direktur Utama : Wiliam Martaputra

Direktur : Suwarjono

Iktisar Data Keuangan Penting AMN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Jumlah Aset	11.897.105.514	15.987.544.345	12.875.512.252	7.576.734.818
Jumlah Liabilitas	4.913.460.082	9.600.141.844	7.855.988.322	16.047.148.028
Jumlah Ekuitas	6.983.645.432	6.387.402.501	5.019.523.930	(8.470.413.209)

Aset

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset AMN pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 11.897.105.513, menurun sebesar Rp 4.090.438.831 atau 25,58% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.987.544.345 Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha kepada pihak ketiga dan penurunan piutang lain – lain.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset AMN pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.987.544.345 meningkat sebesar Rp 3.112.032.093 atau 24,17% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 12.875.512.252 Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan bruto kepada pelanggan pihak ketiga sebesar Rp 2.724.560.034 atau 92,93%, piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp 647.390.000 atau sebesar 14,41%, dan

meningkatnya saldo uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp 1.566.733.096 atau sebesar 211,72%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh piutang usaha – pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset AMN pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 12.875.512.252, meningkat sebesar Rp 5.298.777.434 atau 69,93% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 7.576.734.818. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas sebesar Rp 1.637.844.615 atau sebesar 152,23%, piutang lain - lain pihak berelasi sebesar Rp 4.491.960.000, aset tetap bersih sebesar Rp 374.954.791 atau sebesar 33,76% dan aset pajak tangguhan sebesar Rp 264.234.746 atau sebesar 106,70%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh piutang lain - lain pihak berelasi.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas AMN pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 4.913.460.082, menurun sebesar Rp 4.686.681.762. atau 48,82% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.600.141.844. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah utang usaha kepada pihak ketiga dan utang lain –lain pihak ketiga, turunnya utang pajak dan liabilitas imbalan kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas AMN pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.600.141.844, meningkat sebesar Rp 1.744.153.521 atau 22,20% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.855.988.322. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 1.240.340.116 atau 27,71%, Utang lain lain pihak berelasi sebesar Rp 223.835.000, Utang pajak sebesar Rp 847.971.940 atau sebesar 136,90%, dan sewa pembiayaan sebesar Rp 52.271.629 atau sebesar 132,28%. Sebagian besar dari peningkatan yang terjadi didominasi oleh utang usaha pihak ketiga dan utang pajak.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas AMN pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.855.988.322, penurunan sebesar Rp 8.191.159.705 atau 51,04% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 16.047.148.028. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya lagi utang berelasi pada 31 Desember 2016, penurunan utang pajak sebesar Rp 8.041.137 atau sebesar 1,28%, sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari setahun sebesar Rp 49.583.089 atau sebesar 72,54%. Sebagian besar dari penurunan yang terjadi didominasi oleh tidak adanya lagi utang berelasi pada 31 Desember 2016.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha	6.736.694.316	27.853.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Beban Pokok Penjualan	3.425.055.973	16.990.008.196	23.075.169.345	18.381.239.466
Laba Kotor	3.311.638.343	10.863.679.094	9.625.045.542	5.527.213.160
Laba Bersih	555.954.154	750.099.879	1.734.021.811	(179.930.124)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	596.242.931	1.367.878.571	1.499.937.140	(475.811.649)

Pendapatan Usaha

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Pendapatan usaha AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 6.736.694.316, mengalami peningkatan sebesar Rp 282.729.618 atau sebesar 4,38% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 6.453.964.698. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jasa iklan berbasis website di suara.com dan jasa design.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 27.853.687.290, mengalami penurunan sebesar Rp 4.846.527.597 atau sebesar 14,82% dari pendapatan usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 32.700.214.887 Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan disalah satu jasa yang diberikan yaitu Penyedia Konten sebesar 41,39%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 32.700.214.887, mengalami peningkatan sebesar Rp 8.791.762.261 atau sebesar 36,77% dari pendapatan usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 23.908.452.626 Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan terhadap jasa yang diberikan dibidang jasa Penyedia Konten sebesar 31,08%.

Beban Pokok Penjualan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 2.395.714.122, mengalami penurunan sebesar Rp 52.693.959.atau sebesar 2,15% dari beban AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 2.448.408.081 Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada biaya kompensasi karyawan dan biaya jasa profesional serta biaya listrik dan telepon.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.837.926.256, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.383.870.368 atau sebesar 31,98% dari beban usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.454.055.887 Hal ini terutama disebabkan oleh komponen yang terbesar dari beban usaha adalah jumlah gaji karyawan dan peningkatan pembelian perlengkapan kantor seiring dengan berkembangnya AMN, maka AMN membutuhkan lebih banyak karyawan, profesional, fungsi administrasi dan Operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.454.055.887, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.645.661.479 atau sebesar 28,33% dari beban usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.808.394.408 Hal ini terutama disebabkan oleh oleh berkembangnya AMN sehingga membutuhkan karyawan dan perlengkapan kantor untuk menunjang perkembangan AMN.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha lainnya AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 3.206.140. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, AMN mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 10.964.399 atau turun sebesar 70,76%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bunga dan laba selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha lainnya AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 22.905.522. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, AMN mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 30.512.668 atau turun sebesar 24,93%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan signifikan terhadap beban pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha lainnya AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 30.512.668. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, AMN mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 35.112.450 atau turun sebesar 13,10%. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan bunga dan laba selisih kurs.

Laba (Rugi) Usaha

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba usaha AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 915.924.221, mengalami peningkatan sebesar Rp 725.342.748 atau sebesar 380,59% dari laba usaha AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 190.581.473. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.025.752.838, mengalami penurunan sebesar Rp 1.145.236.816 atau sebesar 52,75% dari laba usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.170.989.655. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang sangat signifikan yaitu biaya –biaya yang untuk mendukung Operasional AMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.170.989.655, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.452.170.902 dari laba usaha AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (281.181.248). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang sangat signifikan.

Laba Sebelum Pajak

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba sebelum pajak AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 912.718.081, mengalami peningkatan sebesar Rp 733.101.007 atau sebesar 408,15% dari laba sebelum pajak AMN

untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 190.581.473. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum pajak AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.002.847.316, mengalami penurunan sebesar Rp 1.137.629.671 atau sebesar 53,15% dari laba sebelum pajak AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.140.476.987. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan meningkatnya beban usaha perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.140.476.987, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.456.770.685 dari laba sebelum pajak AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (316.293.698). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan yang sangat signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba bersih AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 555.954.154, mengalami peningkatan sebesar Rp 430.339.060 dari laba bersih AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 125.615.094. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya biaya langsung serta biaya lain-lain perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba bersih AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 750.099.879, mengalami penurunan sebesar Rp 925.400.764 atau sebesar 55,23% dari laba bersih AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.675.500.643. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha dan turunnya pendapatan perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bersih AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.734.021.811, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.913.951.935 dari laba bersih AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (179.930.124). Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Laba komprehensif AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 596.242.931, mengalami peningkatan sebesar Rp 86.873.656 atau sebesar 17,06% dari laba komprehensif AMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 509.369.275 Hal ini disebabkan oleh menurunnya penghasilan komprehensif lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba komprehensif AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.367.878.571, mengalami penurunan sebesar Rp 132.058.569 atau sebesar 8,80% dari laba komprehensif AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.499.937.140. Hal ini disebabkan oleh turunnya laba bersih akibat turunnya pendapatan perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba komprehensif AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.499.937.140, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.975.748.789 dari laba komprehensif AMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (475.811.649). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perusahaan.

PT MATA MEDIA NUSANTARA

MMN mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2018. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,97%.

Riwayat Singkat MMN

MMN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mata Media Nusantara No. 2 tanggal 1 November 2013, dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta. MMN mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-58284.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 13 November 2013, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106562.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 November 2013.

Sejak tahun 2013, anggaran dasar MMN mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.01 tanggal 27 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0007126.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0044720.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 dan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0129172 tanggal 29 Maret 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan AHU-0044720.AH.01.11.Tahun 2018. tanggal 29 Maret 2018 ("**Akta No.01/2018**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MMN, maksud dan tujuan MMN bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi:
 - perdagangan alat-alat transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan usaha yang berkaitan;
 - ekspor - impor dan perdagangan peralatan elektronik, transmisi telekomunikasi, microwave dan lain-lain;
 - ekspor - impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi dan komputer diantaranya telepon seluler, *wireless*, mesin-mesin, telegram, telex, telstex, faksimili baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait;
 - ekspor - impor dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait.

- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:
- Jasa instalasi dan *maintenance* computer, jaringan computer, portal web dan peripheral antara lain meliputi instalasi komputer dan jaringan, UPS, *panel control*, komputer dan jaringan.
 - Jasa pengembangan piranti lunak meliputi pembuatan aplikasi, *feasibility study*, otomasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (*maintenance*) sistem baik *software* maupun *hardware* terkait, modifikasi serta perkembangan sistem-sistem serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa pembuatan perangkat lunak (*software*) antara lain menjalankan usaha jasa pengembangan perangkat lunak (*software*) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (*case study* dan *design*), pengembangan dan pengerjaan (*development* dan implementasi), pemeliharaan (*maintenance*) serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMN

Berdasarkan Akta No. 01/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	128.000.000	12.800.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT ARKADIA DIGITAL MEDIA	31.990.000	3.199.000.000	99,97%
2. WILIAM MARTAPUTRA	10.000	1.000.000	0,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	32.000.000	3.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	96.000.000	9.600.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan MMN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MMN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.05 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Menkumham No. AHU-0004156.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025795.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 dan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079296 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025795.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079297 tanggal 22 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025795.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan manajemen MMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Aldrian Suwardi Chandra

Direksi:

Direktur Utama : Wiliam Martaputra

Direktur : Suwarjono

Direktur : Steven

Iktisar Data Keuangan Penting MMN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
Jumlah Aset	1.888.650.233	113.692.817	354.007.263	497.116.156
Jumlah Liabilitas	887.596	697.193.330	697.193.330	667.313.330
Jumlah Ekuitas	1.887.762.637	(583.500.513)	(343.186.067)	(170.197.174)

Aset

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset MMN pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 1.888.650.233, meningkat sebesar Rp 1.774.957.415 atau 1.561% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 113.692.817. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Kas dan setara kas, piutang lain – lain pihak berelasi, Biaya dibayar dimuka, uang muka dan pembelian aset perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MMN pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 113.692.817, menurun sebesar Rp 240.314.446, atau 67,88% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 354.007.263. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya dibayar di muka sebesar Rp 13.888.904 atau sebesar 100%. Sebagian besar dari penurunan yang terjadi didominasi oleh aset tetap bersih sebesar Rp 226.425.542 atau sebesar 93,13%.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset MMN pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 354.007.263, menurun sebesar Rp 143.108.893 atau 28,79% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 497.116.156. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya dibayar dimuka sebesar Rp 86.083.328 atau sebesar 86,11% dan aset tetap bersih sebesar Rp 76.425.565 atau sebesar 23,92%.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas MMN pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 887.596, menurun sebesar Rp 696.305.734 atau 99,87% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 697.193.330. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah utang lain –lain pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas MMN pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 697.193.330, tidak ada peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 697.193.330.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas MMN pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 697.193.330, peningkatan sebesar Rp 29.880.000 atau 4,48% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 667.313.330 peningkatan ini terutama disebabkan oleh jumlah utang lain –lain pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(128.736.850)	(240.314.446)	(192.988.893)	(159.758.889)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(128.736.850)	(240.314.446)	(192.988.893)	(159.758.889)

Pendapatan Usaha

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Tidak ada Pendapatan usaha MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 maupun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Pendapatan usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Pendapatan usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Beban Pokok Penjualan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 128.758.205, mengalami peningkatan sebesar Rp 95.762.926 atau sebesar 290,23% dari beban MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 32.995.279. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban kantor biaya listrik, telepon, biaya sewa kantor, jasa profesional dan kompensasi karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 240.314.446, mengalami peningkatan sebesar Rp 47.325.553 atau sebesar 24,52% dari beban usaha MMN untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 192.988.893. Hal ini terutama disebabkan oleh komponen yang terbesar dari beban kantor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 192.988.893, mengalami peningkatan sebesar Rp 33.229.994 atau sebesar 20,80% dari beban usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 159.758.889. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya lain - lain MMN.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha lainnya MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 21.355, mengalami peningkatan sebesar Rp 21.355 atau sebesar 100% Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini disebabkan karena adanya pendapatan bunga bank MMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Beban usaha lainnya MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendapatan MMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Beban usaha lainnya MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendapatan MMN.

Laba (Rugi) Usaha

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Rugi usaha MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (128.758.205), peningkatan sebesar Rp 95.762.926 atau sebesar 290,23% dari beban MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 32.995.279. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban kantor biaya listrik, telepon, biaya sewa kantor, jasa profesional dan kompensasi karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Rugi usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (240.314.446), mengalami peningkatan sebesar Rp 47.325.553 atau sebesar 24,52% dari rugi usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (192.988.893). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban kantor MMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (192.988.893), mengalami peningkatan sebesar Rp 33.229.999 dari rugi usaha MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (281.181.248). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya lain –lain MMN.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Rugi sebelum pajak MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (128.736.850), mengalami peningkatan sebesar Rp (95.741.571) atau sebesar 290,17% dari rugi sebelum pajak MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (32.995.279). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban kantor biaya listrik, telepon, biaya sewa kantor, jasa profesional dan kompensasi karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Rugi sebelum pajak MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (240.314.446), mengalami penurunan sebesar Rp 111.577.596 atau sebesar 46,43% dari rugi sebelum pajak MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (192.988.893). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan meningkatnya beban usaha perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi sebelum pajak MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (192.988.893), mengalami peningkatan sebesar Rp (33.229.999) atau sebesar 20,80% dari rugi sebelum pajak MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (159.758.889). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada biaya lain – lain MMN.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Rugi bersih MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (128.736.850), mengalami peningkatan sebesar Rp (95.741.571) atau sebesar 290,17% dari rugi sebelum pajak MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (32.995.279). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban kantor biaya listrik, telepon, biaya sewa kantor, jasa profesional dan kompensasi karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Rugi bersih MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (240.314.446), mengalami peningkatan sebesar Rp 47.325.553 atau sebesar 24,52% dari rugi bersih MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (192.988.893). Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban kantor MMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi bersih MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (192.988.893), mengalami peningkatan sebesar Rp 33.230.004 atau sebesar 20,80% dari rugi bersih MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (159.758.889). Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban lain - lain MMN.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Rugi komprehensif MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (128.736.850), mengalami peningkatan sebesar Rp (95.741.571) atau sebesar 290,17% dari rugi komprehensif MMN untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp (32.995.279). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban kantor biaya listrik, telepon, biaya sewa kantor, jasa profesional dan kompensasi karyawan dan tidak adanya penghasilan komprehensif lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Rugi komprehensif MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (240.314.446), mengalami peningkatan sebesar Rp 47.325.553 atau sebesar 24,52% dari rugi komprehensif MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp (192.988.893). Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban kantor MMN.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi komprehensif MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (192.988.893), mengalami peningkatan sebesar Rp 33.230.004 atau sebesar 20,80% dari rugi komprehensif MMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp (159.758.889). Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban lain - lain MMN.

PT INTEGRA ARCHIPELAGO MEDIA (IAM)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,90%.

Riwayat Singkat IAM

IAM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Archipelago Media No. 39 tanggal 23 Oktober 2013, dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta. IAM mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-61327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112125.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013.

Sejak tahun 2013, anggaran dasar IAM mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Notaris No. 2 tgl 27 Maret 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-0007142.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0044835.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0129254 tanggal 29 Maret 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0044835.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0129255 tanggal 29 Maret 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0044835.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 (“**Akta No. 2/2018**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha IAM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar **IAM**, maksud dan tujuan **IAM** adalah melakukan usaha di bidang Pembangunan, Perdagangan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, **IAM** dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan yang meliputi:
 - pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air conditioner (AC), sprinkler, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, dan mesin.
 - pemborongan bidang telekomunikasi meliputi jasa teknologi, informasi, komunikasi, multimedia, telekomunikasi, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait.

- b. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum yang meliputi:
 - perdagangan alat-alat transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan usaha yang berkaitan.
 - Eksport - import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, microwave dan lain-lain.
 - Eksport - import dan perdagangan peralatan telekomunikasi diantaranya telephone seluler, wireless, mesin-mesin telegram, telex, telstex, facsimile baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait.
 - Eksport - import dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait.

- c. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:
 - Jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan peripheral antara lain meliputi instalasi UPS, Panel Kontrol, komputer dan jaringan.
 - Jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik dan mekanikal serta bidang usaha yang terkait.
 - Konsultasi bidang telekomunikasi antara lain jasa konsultasi telekomunikasi yang meliputi sentral telekomunikasi, sistem pemancar dan penerima radio dan televisi, sistem komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa pengembangan piranti lunak meliputi pembuatan aplikasi, *feasibility study*, otomasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (maintenance) sistem baik *software* maupun *hardware* terkait, modifikasi serta perkembangan sistem-sistem serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa pembuatan perangkat lunak (*software*) antara lain menjalankan usaha jasa pengembangan perangkat lunak (*software*) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (*Case Study dan Design*), pengembangan dan pengerjaan (Development dan Implementasi), pemeliharaan (*Maintenance*) serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait.
 - Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan komunikasi pemasaran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IAM

Berdasarkan Akta No. 2/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IAM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase (%)
Modal Dasar	40.000.000	4.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT ARKADIA DIGITAL MEDIA	9.990.000	999.000.000	99,90%
2. WILIAM MARTAPUTRA	10.000	1.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000.000	1.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan IAM

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IAM sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004158.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Februari, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025804.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0079312 tanggal 22 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0025804.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Steven

Direksi:

Direktur Utama : Wiliam Martaputra

Direktur : Suwarjono

Direktur : Aldrian Suwardi Chandra

Iktisar Data Keuangan Penting IAM

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Jumlah Aset	972.885.495	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Jumlah Liabilitas	500.000	-	-	-
Jumlah Ekuitas	972.385.495	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Aset

Jumlah aset IAM pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 972.885.495, meningkat sebesar Rp 372.885.495 atau 62,15% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 600.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain – lain pihak berelasi perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset IAM pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 600.000.000, dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000. Sehingga tidak ada penambahan maupun penurunan jumlah aset perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset IAM pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 600.000.000. Sehingga tidak ada penambahan maupun penurunan jumlah aset perseroan.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas IAM pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 500.000, meningkat sebesar Rp 500.000 atau 100% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang pajak perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016

Tidak terdapat jumlah liabilitas IAM pada tanggal 31 Desember 2017 maupun jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sehingga tidak ada penurunan maupun peningkatan liabilitas pada periode tersebut.

Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015

Tidak terdapat jumlah liabilitas IAM pada tanggal 31 Desember 2016 maupun jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga tidak ada penurunan maupun peningkatan liabilitas pada periode tersebut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(27.500.000)	-	-	-
Laba (Rugi) bersih	(27.614.505)	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(27.614.505)	-	-	-

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Tidak ada Pendapatan usaha IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 maupun untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Pendapatan usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Pendapatan usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan diperiode tersebut.

Beban Pokok Penjualan

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 27.500.000, mengalami peningkatan sebesar Rp 27.500.000 atau sebesar 100% dari beban IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Beban usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak ada kegiatan usaha IAM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Beban usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak ada kegiatan usaha IAM.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Beban usaha lainnya IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp 114.505, peningkatan sebesar Rp 114.505 atau sebesar 100% Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya administrasi bank IAM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Beban usaha lainnya IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan IAM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Beban usaha lainnya IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan IAM.

Laba (Rugi) Usaha

Periode 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 31 Maret 2017

Rugi usaha IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp (27.614.505), peningkatan sebesar Rp (27.614.505) atau sebesar 100% dari beban IAM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban jasa profesional dan biaya administrasi bank IAM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Tidak ada Laba (Rugi) usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan IAM.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tidak ada Laba (Rugi) usaha IAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maupun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan IAM.

N. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengajukan permohonan atas Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

PT Arkadia Media Nusantara ("AMN")						
No.	Jenis Permohonan	Kelas Barang/Jasa	Nama Merek	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan
1.	Merek Dagang	38	SUARA.com	Indonesia	J002015053043	20 November 2015
2.	Merek Jasa Non UMKM	41	SUARA.com	Indonesia	JID2018007478	13 Februari 2018
3.	Merek Jasa Non UMKM	42	SUARA.com	Indonesia	JID2018007357	13 Februari 2018
4.	Merek Jasa Non UMKM	35	SUARA.com	Indonesia	JID2018007396	13 Februari 2018
5.	Merek Dagang Non UMKM	42	Arkadia + Logo	Indonesia	DID2018007374	13 Februari 2018
6.	Merek Dagang Non UMKM	41	Arkadia + Logo	Indonesia	DID2018007355	13 Februari 2018
7.	Merek Dagang Non UMKM	38	Arkadia + Logo	Indonesia	DID2018007346	13 Februari 2018
8.	Merek Dagang Non UMKM	35	Arkadia + Logo	Indonesia	DID2018007337	13 Februari 2018

PT Mata Media Nusantara ("MMN")						
No.	Jenis Permohonan	Kelas Barang/Jasa	Nama Merek	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Permohonan
1.	Merek Jasa Non UMKM	35	Matamata + Gambar	Indonesia	JID2018010693	05 Maret 2018
2.	Merek Jasa Non UMKM	38	Matamata + Gambar	Indonesia	JID2018010735	05 Maret 2018
3.	Merek Jasa Non UMKM	41	Matamata + Gambar	Indonesia	JID2018010739	05 Maret 2018
4.	Merek Jasa Non UMKM	42	Matamata + Gambar	Indonesia	JID2018010740	05 Maret 2018
5.	Merek Jasa Non UMKM	35	Bolatimes.com	Indonesia	JID2018016788	05 April 2018
6.	Merek Jasa Non UMKM	38	Bolatimes.com	Indonesia	JID2018016789	05 April 2018
7.	Merek Jasa Non UMKM	41	Bolatimes.com	Indonesia	JID2018016791	05 April 2018
8.	Merek Jasa Non UMKM	42	Bolatimes.com	Indonesia	JID2018016811	05 April 2018
9.	Merek Jasa Non UMKM	35	Hitekno.com	Indonesia	JID2018016882	05 April 2018
10.	Merek Jasa Non UMKM	38	Hitekno.com	Indonesia	JID2018016825	05 April 2018
11.	Merek Jasa Non UMKM	41	Hitekno.com	Indonesia	JID2018016812	05 April 2018
12.	Merek Jasa Non UMKM	42	Hitekno.com	Indonesia	JID2018016883	05 April 2018

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan di atas masih dalam proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Menkumham.

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anak Perusahaan dan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk

kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar terakhir Perseroan yakni Akta No.127/2018, maksud dan tujuan Perseroan adalah Perdagangan Umum, Pembangunan, Perindustrian, Percetakan, Multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, Jasa dan Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Kegiatan usaha utama:
 - (i) Menjalankan perdagangan umum baik atas perhitungan sendiri atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agen tunggal, leveransir, supplier dan frossier dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
 - (i) Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
 - (ii) Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;
 - (iii) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, kartu nama dan sejenisnya, baik dengan menggunakan mesin biasa maupun offset;
 - (iv) Menjalankan usaha dalam jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
 - (v) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan; dan
 - (vi) Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, telekomunikasi, hiburan, real estate, arsitektur, pembangunan (*developer*), percetakan, usaha pers (yang meliputi kegiatan jurnalistik, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau media online, yang bertujuan untuk menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat), usaha dibidang pemberian jasa (kecuali jasa hukum dan perpajakan), dengan memperhatikan izin-izin yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C, Jl Jendral Sudirman Kav 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

2. PRODUK DAN KEGIATAN

USAHA PERSEROAN

Produk dan Jasa Perseroan

Seluruh produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dikelola langsung oleh Anak Perusahaan.

Produk yang ditawarkan oleh Perseroan adalah portal-portal yang masing-masing menyuguhkan berbagai macam informasi. Gambaran portal – portal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suara.com, media *online* berisi berita umum (*general news*) dengan pemberitaan cepat, akurat, viral, unik, mendalam, berimbang dan independen. Kekuatan *general news* adalah mendatangkan *traffic* sebesar mungkin dengan konten yang beragam. Dengan segmen pembaca terbesar di usia 18-35 tahun, atau 70% pembaca digital saat ini, potensi untuk menggaet lebih besar lagi pengakses digital sangat kuat.
- b. Matamata.com mengupas tuntas berbagai aktivitas para selebriti Tanah Air dan berbagai belahan dunia lain seperti K-Pop, Amerika Eropa hingga India. Beragam pola di dunia hiburan selalu menarik pembaca, apalagi dengan dukungan liputan multimedia, menjadi portal ini menjadi rujukan pembaca. Dari media ini diharapkan akan mendapat *traffic* cukup bagus dan pengembangan bisnis ke berbagai aktivitas *entertainment*. Dari penjualan tiket *show*, manajemen artis hingga mengelola beragam aktivitas *offline*.
- c. Bolatimes.com mengupas tuntas dunia sepakbola yang penuh dinamika, khususnya saat *event* besar. Dari liga Indonesia, Inggris, Italia hingga Spanyol, Champions hingga Piala Dunia plus sepakterjang "permainan" di luar lapangan. Data dan fakta terkait berbagai laga layak disajikan dalam format terpadu. Sebagai panduan dan bacaan bagi publik yang haus info-info seputar sepakbola, maka bolatimes memiliki keunggulan memberikan info yang informatif, mendalam disertai data dan fakta.
- d. Hitekno.com memberikan referensi bagi pecinta *gadget* agar tidak salah pilih handphone dan mengikuti isu perkembangan di industri internet ini. Kedalaman dan analisis konten diselingi dengan berita ringan akan banyak mewarnai portal *gadget* ini. Update perkembangan terbaru di era *digital* tentu tidak hanya membahas *gadget*, namun beragam aplikasi yang menyertai juga dikupas tuntas. Seperti game, sosial media hingga sains dan teknologi. Menarik dari portal ini adalah, adanya fasilitas untuk jual beli barang yang review atau menjadi tema pembahasan.
- e. Dewiku.com membahas seputar gaya hidup dan konten-konten untuk perempuan, dari perawatan hingga tips-tips menarik mulai ujung kaki hingga rambut. Semua sisi kewanitaan dikupas habis dalam tampilan multimedia. Keunggulan media ini adalah memberikan panduan perempuan Indonesia untuk memilih berbagai produk sesuai kebutuhan. Konsep padu padan hingga urusan lokasi tempat untuk belanja murah dengan barang-barang yang sudah punya "brand" akan jadi andalan.
- f. Mobimoto.com akan mengupas berbagai produk otomotif hingga pernak-pernik yang menambah komplet isi dan bidang otomotif. Tidak hanya mobil, namun juga sepeda motor. Usulan mobil-mobil baru dari berbagai varian hingga *test drive* dengan mengajak pembaca untuk mencoba langsung akan menarik.
- g. Guideku.com merupakan panduan pecinta wisata dan kuliner. Para *traveler* akan mendapat pengalaman menakjubkan dari para penulis atau pelapor. Akan melibatkan *user generate* konten para blogger hingga para chef ahli kuliner. Seiring dengan kemajuan perekonomian nasional, kebutuhan masyarakat untuk bepergian semakin tinggi. Bahkan tidak hanya dalam negeri, namun hingga luar negeri. Panduan menikmati alam berbagai negara dengan semua keunikan yang dimiliki menjadi daya tarik. Apalagi bila dilengkapi dengan konten multimedia, video, foto hingga panduan menjelajah hingga detail.

- h. Himedik.com seputar isu kesehatan baik gaya hidup sehat, kebugaran hingga tips-tips menarik menjaga agar badan tetap fit dan sehat. Salah satu kekuatan di himedik ini adalah konsultasi dokter hingga ahli nutrisi untuk menjaga kesehatan badan. Isu kesehatan ini makin banyak dicari di mesin pencari karena sangat spesifik. Selain memberikan banyak tips hidup sehat, dan mengantisipasi berbagai penyakit, portal kesehatan sekaligus melawan maraknya *hoax* dan *fake news* yang bertebaran di situs-situs kesehatan.
- i. Apps agregator untuk menguatkan posisi portal partner dan untuk kalangan internal. Apps akan menarik bagi para partner konten daerah/kota-kota besar di luar Jakarta dan konten vertikal yang berisi lebih niche market atau sangat spesifik. Untuk konten lokal ini bekerjasama dengan para penerbit media online lokal yang mempunyai konten menarik, namun kurang maksimal dalam distribusi konten sehingga tingkat keterbacaan kecil. Peran agregator sangat penting untuk membantu media darah meningkatkan *traffic* atau pengunjung. Agregator yang baik adalah mengkurasi konten dengan baik sesuai kebutuhan pembaca. Tentu untuk pembaca yang lebih luas pengalamannya membutuhkan berita-berita pilihan yang menarik dan sesuai dengan keinginannya. Untuk itulah, peran kurator yang memilihkan informasi sebelum *publish* jadi sangat penting.

3. SUMBER PENDAPATAN PERSEROAN

Perseroan saat ini memiliki 3 sumber pendapatan sebagai berikut:

	31 Maret		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Penghasilan bersih					
Jasa penyedia konten	3.104.685.321	4.854.170.706	16.460.165.965	28.085.510.848	21.426.745.763
Portal web	3.632.008.995	1.599.793.992	11.393.521.325	4.614.704.039	2.481.706.863
Lain-lain	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Jumlah	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626

4. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Kompetitor yang dihadapi oleh Perseroan adalah portal-portal yang juga menampilkan berita-berita di halamannya. Beberapa kompetitor utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah:

- Tribunnews.com
- Detik.com
- Kompas.com
- Tempo.co
- Liputan6.com
- Viva.co.id
- Okezone.com

Perseroan bersaing dengan kompetitor utama dalam hal menarik orang untuk dapat mengakses halaman di *website* Perseroan ataupun *website* kompetitor. Semakin banyak pengunjung di *website* Perseroan, maka Perseroan dapat menarik lebih banyak pihak yang hendak menaruh iklan di *website* Perseroan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan pendapatan dari Perseroan.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

Memimpin untuk news and entertainment

Meski sebagai pendatang baru di portal berita, dibanding dengan portal *news* lain yang lebih lama, Suara.com berkembang pesat. Hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk masuk papan atas media berita *online* di Tanah Air dan pada tahun ke empat sudah berada di 10 besar media berita *online* di Indonesia. Pencapaian ini terbilang sukses mengingat pesaing merupakan media lama yang sudah beroperasi belasan hingga puluhan tahun. Pencapaian ini

karena terlaksana karena langkah yang tepat untuk mengarahkan tim konten hingga tim *delivery content*. Ujung tombak tim konten adalah pada liputan *news* atau peristiwa hangat yang terjadi di berbagai belahan bumi dan liputan *entertainment*. *News* dan *entertainment* mendorong *traffic* sangat kuat, sehingga Suara.com saat ini dikenal baik di publik sebagai publisher media digital berbasis peristiwa atau *news*, baik peristiwa umum maupun peristiwa terkait dunia hiburan Tanah Air. Keberhasilan mengangkat *news* dan *entertainment* ini kemudian diambil oleh berbagai media percakapan, *agregator*, *search engine* hingga media berita lainnya di berbagai daerah.

Berita viral target milenial

Generasi baru pengakses internet yang disebut sebagai generasi (GEN) X, mereka yang lahir tahun 1983 ke atas dan generasi (GEN) Y atau sering disebut milenial, generasi yang lahir tahun 1994 ke atas memiliki karakter berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lahir ketika internet berkembang pesat, kehadiran *gadget* menjadi kebutuhan utama dan semua aktivitas dilakukan dengan digital. Kebutuhan informasi cepat, menghibur, dan mudah untuk disebarluaskan menjadi penting. Aktivitas yang tinggi di media sosial yang mereka miliki, membuat generasi ini membutuhkan informasi yang mendukung aktivitasnya, termasuk dalam beraktivitas di media sosial. Maka, bila ada informasi yang menarik, ringan, melibatkan emosi banyak orang, dengan cepat akan dibagikan kepada teman, kerabat termasuk orang-orang yang tidak dia kenal. Untuk kebutuhan ini, tren berita ringan, namun berbobot untuk generasi "jaman now" menjadi salah satu kekuatan tim. Sejak dibentuk tim kreatif konten, banyak artikel, video, foto hingga grafis yang tersebar ke publik karena share link atau viral baik melalui media sosial maupun grup-grup percakapan. Konten viral yang diproduksi selama ini berisi tips, unik, menarik, isu-isu yang sangat dekat dengan publik, ketokohan hingga gosip kalangan selebritas. Konten berita yang ditargetkan untuk viral ini dibuat oleh para jurnalis muda, untuk pembaca muda dan gaya bahasa anak milenial.

Akun media sosial dengan jutaan pengikut

Peran media sosial sebagai alat untuk penyebaran konten milik Perseroan (*distribution channel*) berperan sangat besar. Pembaca media digital saat ini tidak masuk langsung ke halaman depan (*home*) portal berita, namun mereka mendapatkan konten dari time line yang ada di berbagai media sosial dan media percakapan yang mereka ikuti. Dengan jumlah member like di laman facebook mencapai 3 juta lebih yang terbagi dalam 5 akun, instagram lebih dari 200 ribu di tiga akun dan twitter puluhan ribu sangat kuat untuk mendistribusikan konten-konten milik Perseroan. Jumlah ini kedepan akan terus naik karena dikelola oleh tim media sosial yang berpengalaman mengembangkan media digital. Konten dan distribusi (media sosial) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan untuk mencapai keuntungan bisnis usaha Perseroan.

Independensi ruang redaksi

Sejumlah media arus utama memiliki afiliasi dengan partai politik. Keberpihakan sering terlihat di layar terkait dengan konten dan program, apabila terkait dengan aktivitas pemilik media yang juga sekaligus pemilik partai politik. Suara.com sebagai media massa, berusaha untuk tetap menjadi penjaga marwah jurnalisme, etik dan profesi. Di era masa pemilu hingga pilkada, independensi ruang redaksi menjadi tolok ukur bagi publik untuk menilai layak konsumsi dan tidaknya media tersebut.

Platform konten multimedia

Memadukan hasil liputan dalam kemasan yang beragam, baik artikel atau teks, foto, grafis dan video dilakukan sejak awal agar pembaca puas dan menikmatinya.

SDM dan manajemen yang berpengalaman

Membangun tim yang solid, kuat dan visioner sudah menjadi komitmen sejak Perseroan didirikan. Untuk keperluan itulah, rekrutmen awal hingga saat ini selalu mencari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Baik itu untuk tim manajemen, hingga tim teknis seperti menggarap video, teks artikel, editor video, foto visual lain-lain. Dalam bisnis informasi, kekuatan utama di konten, maka rekrutmen jajaran redaksi menjadi penting. Tim diisi oleh para jurnalis kaya pengalaman dari media televisi, online hingga cetak yang mempunyai keahlian dan kapasitas mumpuni. Demikian juga dengan tim IT yang menjadi tulang punggung distribusi konten, rekrutmen dilakukan dengan mencari

tim yang berpengalaman mengerjakan berbagai media online besar. Sumber daya manusia ini menjadi tulang punggung Perseroan. Dengan strategi jitu, didukung tim solid akan tercapai semua tujuan bisnis. Pembekalan kepada para jurnalis, di mana setiap individu harus mempunyai kemampuan multitasking, bisa menjadi foto, kameramen, jurnalis, grafis hingga edit gambar dan video melalui smart phone.

Efisiensi dengan sinergi antar media dan platform

Perseroan mempunyai tim IT, sales, marketing hingga support team yang berpengalaman. Dengan pengembangan banyak portal vertikal, dan kanal-kanal baru, tim melakukan sinergi antar media di dalam grup ataupun sinergi dengan kanal-kanal di Suara.com. Dengan sinergi dan dibawah satu tim, seluruh biaya perseroan bisa ditekan, karena sudah disupport oleh grup head. Dari sales hingga support team satu sinergi untuk menjual semua produk. Kerja efisien, dan mampu banyak Sehingga terjadi Produksi konten banyak.

6. STRATEGI PERSEROAN

Kebijakan Perseroan sejalan dengan tren, budaya dan perkembangan masyarakat dalam mencari informasi, khususnya mencari informasi melalui teknologi. Pemanfaatan platform media digital menjadi titik utama. Untuk itu, sejumlah strategi bermuara pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber pengembangan Perseroan. Mengakses informasi melalui internet, efisien, lengkap, cepat, murah dan mendapatkan informasi selengkap mungkin, baik dari teks, foto, video hingga grafis. Tidak hanya sekedar penyedia informasi, pelibatan publik atau pembaca dalam aktivitas portal media juga sangat penting. Baik saat memberikan reaksi atas informasi yang diperoleh, berkomentar hingga berpendapat. Bahkan termasuk mengirim informasi dan berharap agar informasi tersebut dimuat dalam laman portal.

Keunggulan teknologi berbasis digital inilah yang akan dimaksimalkan Perseroan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya di bisnis informasi. Menyajikan informasi yang beragam, berkualitas, mencerdaskan dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, dengan sajian menarik, interaktif, dan bertenaga. Perlu inovasi tiada henti untuk mendapatkan produk berkualitas dan menjadi rujukan publik.

Untuk menjalankan usaha di atas, Perseroan memfokuskan memproduksi dan menyebarkan informasi pada sejumlah tema yang selama ini cukup menarik perhatian publik. News, entertainment, olahraga khususnya sepakbola, sains teknologi dan gadget, gaya hidup khususnya perempuan, kesehatan, travel dan food serta panduan bagi pecinta mobil dan motor. Platform berbasis komunitas, konten buatan pengguna (*user generate content*) dan sistem reward bagi anggota. Sejumlah langkah dilakukan perseroan untuk memperkuat usaha, antara lain berdasarkan usaian di bawah ini.

1. Meningkatkan kualitas konten untuk memperkuat posisi sebagai media rujukan

Tantangan media di era disrupsi digital adalah memastikan agar publik mendapat informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pilihan ini diambil untuk membedakan media massa dengan media abal-abal yang sajikan hoaks, fake news dan juga informasi dari media sosial yang belum terverifikasi. Kerja jurnalis adalah melakukan verifikasi atas banyaknya informasi yang berkembang di lautan digital, mengemas ke berbagai platform dan kemudian menyebarluaskan. Menangkap isu, cepat merespon dengan cara mencari fakta, hingga mengolahnya menjadi informasi terpercaya, akurat dan kredibel sehingga menjadi tempat rujukan publik. Peran ini dikerjakan sendiri, dan berkolaborasi dengan media lain untuk menambah kekuatan verifikasi. Sedangkan distribusi bisa dikembalikan ke media sosial maupun alat-alat lain untuk memastikan informasi yang dibuat sampai ke publik dan sekaligus menangkal informasi dan/atau pemberitaan palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keakuratannya yang beredar luas.

2. Fokus menggarap iklan kreatif untuk menaikkan pendapatan perseroan.

Iklan adalah sumber pendapatan terbesar di bisnis media daring saat ini. Seperti halnya di media konvensional, pemasang iklan atau brand sebagian besar masih menggunakan standar media-media besar, dengan jumlah pengunjung tinggi, pembaca banyak dan masuk dalam peringkat media online yang banyak dikunjungi publik.

Besaran pengunjung (*traffic*) ini kemudian di monetisasi ke harga iklan. Baik iklan langsung ke para sales ataupun iklan berjejaringan (*ads networks*) yang tersedia dan ditawarkan banyak agency. Yang menarik, tidak semua traffic tinggi otomatis pendapatan juga tinggi. Ada beberapa media yang mempunyai traffic tinggi, namun pendapatan rendah. Sebaliknya ada media *traffic* rendah namun pendapatan sangat tinggi. Begitulah bila iklan masih mengandalkan iklan konvensional, berbentuk teks dan gambar yang selama ini dengan bentuk iklan display berupa banner yang dipasang di halaman portal dengan posisi tertentu. Kecenderungan Perseroan yang ingin menaikkan brand awares saat ini memilih memasang iklan di ads networks. Karena ads networks mengambil posisi iklan banner yang selama ini sudah disediakan media digital. Bagi Perseroan, tren baru iklan banner yang dikuasai oleh ads networks ini sangat tidak menguntungkan, karena harganya tidak sebanding dengan direct sales atau iklan-iklan yang diperoleh secara langsung. Iklan *banner* pun mulai dikurangi, dan mencari format baru iklan untuk portal online. Bentuk-bentuk iklan baru tersebut antara lain:

- a. Iklan konten kreatif. Iklan ini akan dikembangkan untuk portal vertikal dengan pasar spesifik atau niche market. Seperti portal khusus tekno dan gadget, portal otomotif, portal kesehatan, portal wanita hingga portal wisata dan kuliner. Iklan ini memasukkan pesan produk melalui iklan teks, video maupun grafis. Melalui konten kreatif, pesan sponsor disampaikan dengan beragam bentuk, di sela-sela konten yang diproduksi tim konten. Bentuk iklan bisa dalam bentuk sponsored post advertorial, video based content maupun content marketing.
- b. Iklan menasar komunitas. Iklan untuk komunitas dengan basis pengguna (user) atau pembaca (reader) ini menerapkan aktivitas online dan offline, pengiklan membiayai kegiatan online dan bisa juga hingga offline, baik berbentuk sponsor kegiatan, sponsor forum, hingga aktivitas online berbentuk lomba, game dan lain-lain. Iklan ini menawarkan community engagement lebih bagus, bisa menyampaikan juga berbagai produk saat bertemu komunitas yang sangat spesifik sesuai dengan produk yang dijual.

3. Pengembangan portal vertikal

Empat tahun Suara.com beroperasi, peluang dan tantangan bisnis makin berkembang. Kemunculan beragam media online berbasis pemberitaan semakin banyak, membuat persaingan di ranah portal news makin kuat. Pola juga makin beragam, meski tradisi pemberitaan berbasis berita tetap sama. Adu cepat informasi, liputan mendalam (*in-depth reporting*), konten unik dan viral, melengkapi dengan liputan multimedia, hingga jurnalisme data. Tujuan sama, mendapat simpati pembaca pada umumnya dan traffic terus naik. Yang menarik, model bisnis di media digital mulai bergeser ke konten-konten segmented. Portal online, yang membahas tuntas satu isu besar saja, dan tidak masuk ke general news. Ini sesuai dengan karakter dan keinginan para pembaca digital, dengan waktu sempit yang mereka miliki, pembaca hanya ingin informasi yang ia sukai saja. Perseroan melihat tantangan ini sebagai peluang, yang kemudian mengelompokkan segmentasi pembaca baru ini ke dalam wadah yang sama. Perseroan kemudian mengeluarkan sejumlah media online vertikal yang niche market, menggagas tema-tema khusus. Adapun portal tersebut adalah:

- a. Suara.com, media online berisi berita umum (general news) dengan pemberitaan cepat, akurat, viral, unik, mendalam, berimbang dan independen. Kekuatan general news adalah mendatangkan traffic sebesar mungkin dengan konten yang beragam. Dengan segmen pembaca terbesar di usia 18-35 tahun, atau 70 persen pembaca digital saat ini, potensi untuk menggaet lebih besar lagi pengakses digital sangat kuat.
- b. Matamata.com mengupas tuntas berbagai aktivitas para selebriti Tanah Air dan berbagai belahan dunia lain seperti K-Pop, Amerika Eropa hingga India. Beragam polah di dunia hiburan selalu menarik pembaca, apalagi dengan dukungan liputan multimedia, menjadi portal ini menjadi rujukan pembaca. Dari media ini diharapkan akan mendapat traffic cukup bagus dan pengembangan bisnis ke berbagai aktivitas entertainment. Dari penjualan tiket show, manajemen artis hingga mengelola beragam aktivitas offline.
- c. Bolatimes.com mengupas tuntas dunia sepakbola yang penuh dinamika, khususnya saat event besar. Dari liga Indonesia, Inggris, Italia hingga Spanyol, Champions hingga Piala Dunia plus sepakterjang "permainan" di luar lapangan. Data dan fakta terkait berbagai laga layak disajikan dalam format terpadu. Sebagai panduan dan bacaan bagi publik yang haus info-info seputar sepakbola, maka bolatimes memiliki keunggulan memberikan info yang informatif, mendalam disertai data dan fakta.

-
- d. Hitekno.com memberikan referensi bagi pecinta gadget agar tidak salah pilih handphone dan mengikuti isu perkembangan di industri internet ini. Kedalaman dan analisis konten diselingi dengan berita ringan akan banyak mewarnai portal gadget ini. Update perkembangan terbaru di era digital tentu tidak hanya membahas gadget, namun beragam aplikasi yang menyertai juga dikupas tuntas. Seperti game, sosial media hingga sains dan teknologi. Menarik dari portal ini adalah, adanya fasilitas untuk jual beli barang yang review atau menjadi tema pembahasan.
 - e. Dewiku.com membahas seputar gaya hidup dan konten-konten untuk perempuan, dari perawatan hingga tips-tips menarik mulai ujung kaki hingga rambut. Semua sisi kewanitaan dikupas habis dalam tampilan multimedia. Keunggulan media ini adalah memberikan panduan perempuan Indonesia untuk memilih berbagai produk sesuai kebutuhan. Konsep padu padan hingga urusan lokasi tempat untuk belanja murah dengan barang-barang yang sudah punya "brand" akan jadi andalan.
 - f. Mobimoto.com akan mengupas berbagai produk otomotif hingga pernak-pernik yang menambah komplet isi dan bidang otomotif. Tidak hanya mobil, namun juga sepeda motor. Usulan mobil-mobil baru dari berbagai varian hingga test drive dengan mengajak pembaca untuk mencoba langsung akan menarik.
 - g. Guideku.com merupakan panduan pecinta wisata dan kuliner. Para traveler akan mendapat pengalaman menakjubkan dari para penulis atau pelapor. Akan melibatkan user generate konten para blogger hingga para chef ahli kuliner. Seiring dengan kemajuan perekonomian nasional, kebutuhan masyarakat untuk bepergian semakin tinggi. Bahkan tidak hanya dalam negeri, namun hingga luar negeri. Panduan menikmati alam berbagai negara dengan semua keunikan yang dimiliki menjadi daya tarik. Apalagi bila dilengkapi dengan konten multimedia, video, foto hingga panduan menjelajah hingga detail.
 - h. Himedik.com seputar isu kesehatan baik gaya hidup sehat, kebugaran hingga tips-tips menarik menjaga agar badan tetap fit dan sehat. Salah satu kekuatan di himedik ini adalah konsultasi dokter hingga ahli nutrisi untuk menjaga kesehatan badan. Isu kesehatan ini makin banyak dicari di mesin pencari karena sangat spesifik. Selain memberikan banyak tips hidup sehat, dan mengantisipasi berbagai penyakit, portal kesehatan sekaligus melawan maraknya hoax dan fake news yang bertebaran di situs-situs kesehatan.
 - i. Apps agregator untuk menguatkan posisi portal partner dan untuk kalangan internal. Apps akan menarik bagi para partner konten daerah/kota-kota besar di luar Jakarta dan konten vertikal yang berisi lebih niche market atau sangat spesifik. Untuk konten lokal ini bekerjasama dengan para penerbit media online lokal yang mempunyai konten menarik, namun kurang maksimal dalam distribusi konten sehingga tingkat keterbacaan kecil. Peran agregator sangat penting untuk membantu media dalam meningkatkan traffic atau pengunjung.

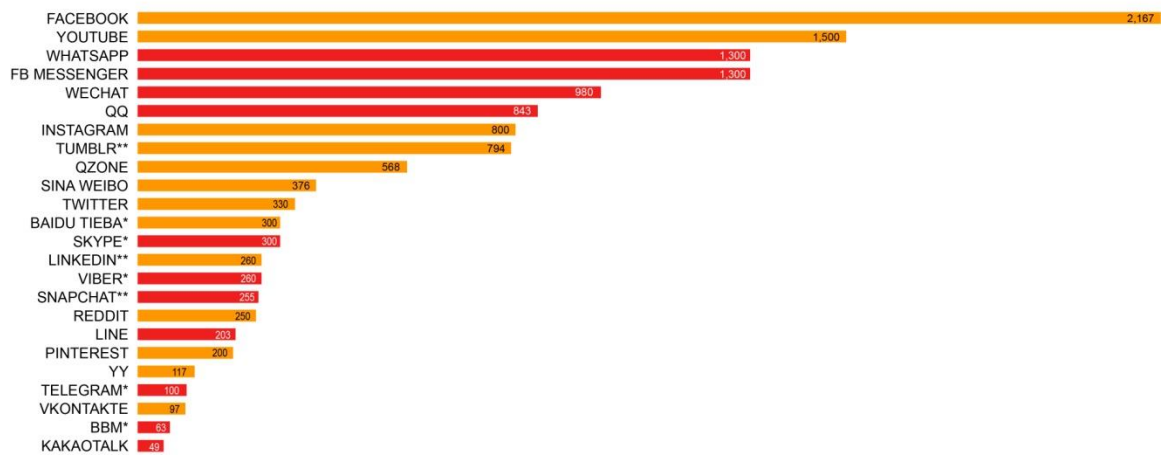
Agregator yang baik adalah mengkurasi konten dengan baik sesuai kebutuhan pembaca. Tentu untuk pembaca yang lebih luas pengalamannya membutuhkan berita-berita pilihan yang menarik dan sesuai dengan keinginannya. Untuk itulah, peran kurator yang memilahkan informasi sebelum publik jadi sangat penting.

4. Pengembangan Multimedia

Tren akses konten berbasis video, foto dan grafis terus meningkat seiring dengan semakin terjangkau tarif internet dan infrastruktur semakin merata di seluruh Indonesia. Data We Are Social tahun 2018 menunjukkan bahwa pengguna sosial media paling banyak Facebook, disusul youtube, whatsapp, FB Messenger disusul Wechat. Facebook meningkat tajam dibanding tahun 2017 karena fitur video yang mereka andalkan sebagai produk baru dan mendapatkan sambutan besar dari warganet.

ACTIVE USERS OF KEY GLOBAL SOCIAL PLATFORMS

BASED ON THE MOST RECENTLY PUBLISHED MONTHLY ACTIVE USER ACCOUNTS FOR EACH PLATFORM, IN MILLIONS



SOURCES : KEPIOS ANALYSIS; LATEST COMPANY EARNINGS RELEASES, PRESS RELEASES OR MEDIA STATEMENTS; REPORTS IN REPUTABLE MEDIA; ALL AS OF JANUARY 2018 *ADVISORY: PLATFORMS IDENTIFIED BY [*] HAVE NOT PUBLISHED UPDATED USER FIGURES IN THE PAST 12 MONTHS, SO FIGURES MAY BE LESS RELIABLE. **NOTES: THESE PLATFORMS DO NOT PUBLISH MAU DATA. TUMBLR FIGURE IS FOR MONTHLY UNIQUE VISITORS IN DEC 2017, VIA SIMILARWEB. SNAPCHAT FIGURE VIA TECHCRUNCH, JUN 2017. LINKEDIN DATA VIA FORTUNE / APPTOPIA, APR 2017

Berdasarkan data di atas, dan traffic yang juga terjadi selama ini, konten-konten yang disampaikan melalui video, termasuk video grafis lebih banyak diminati. Untuk pengembangan ini, produk-produk video telah dibuat. Baik untuk siaran langsung (*live*), rekaman hingga membuat program-program pendek.

5. Media Lokal dengan konten lokal

Bila tahun 2005 lalu pembaca media digital 70% masih didominasi Jabotabek, kini telah berubah. Penetrasi gadget dan jaringan internet yang makin tersebar di berbagai daerah, membuat pembaca daerah terus meningkat. Data Google Analytic, pembaca Jakarta kini tinggal 40% dan 60% tersebar ke seluruh Indonesia. Problem yang terjadi saat ini, konten portal online masih didominasi Jakarta sehingga konten juga sangat Jakarta Centris. Padahal, kebutuhan di daerah juga konten-konten lokal yang lebih dekat dengan kota mereka. Atas dasar itulah, membangun konten berbasis daerah sangat penting. Sasaran utama adalah kota besar seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Palembang dan Yogyakarta. Setelah itu, menyusul kota-kota besar lain di Indonesia.

6. Membership, komunitas dan artificial intelligence (kecerdasan buatan)

Mengikat pembaca agar loyal, membangun komunitas dan penggunaan kecerdasan buatan di sistem adalah satu paket media masa depan. Pembaca tidak sekedar datang untuk menyantap informasi, namun juga bertukar sapa dan pikiran, berkenalan dalam satu komunitas yang didukung aplikasi, menjadi satu paket penting. Pengunjung datang untuk menjadi member, kemudian bisa ikut interaktif, termasuk bisa terlibat dalam content yang akan didisampaikan ke publik. Dengan sistem user generate content (UGC), pembaca juga menjadi pelaku, tidak sekedar pasif.

7. Pengembangan bisnis berbasis komunitas

Pengunjung yang tersegmentasi dan membangun komunitas berdasarkan kesamaan hobi, dan difasilitasi portal media yang spesifik, memudahkan pembaca dalam mengonsumsi media. Pada konten niche market ini, target pembaca terbagi langsung ke orang-orang yang menyukai tema tertentu. Mobimoto.com misalnya, pembaca yang menyukai otomotif, baik motor atau mobil, dari isu-isu terkini, trend hingga menasar aktivitas komunitas. Hitekno.com menasar perkembangan gadget hingga komunitas yang ada seperti komunitas android, linux ataupun komunitas game. Dengan menasar komunitas sebagai bagian dari aktivitas media, model bisnis juga banyak melibatkan komunitas. Ini sejalan dengan banyak brand yang menjadikan komunitas sebagai partner, baik untuk survey produk, research atau penelitian, survey konsumen hingga FGD. Dengan komunitas juga lebih kuat bagi brand untuk menerapkan model bisnis community engagement maupun community insight.

7. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sejarah perkembangan internet di Indonesia, pada awalnya merupakan aktivitas para penggemar jaringan teknologi komputer yang dimotori sejumlah pegiat teknologi computer di kampus. Koneksi pertama Internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UINet di kampus Universitas Indonesia. Joseph lalu mengembangkan University Network (Uninet) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983, dengan membangun jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas, tidak hanya menjangkau Universitas Indonesia, namun juga Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanudin, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Hingga pertengahan 1990an perkembangan Internet merupakan cerita tentang aktivitas para radio hobbyist yang antusias mengembangkan jaringan komputer menggunakan radio. Dari tangan akademisi dan hobbyist, Internet di Indonesia kemudian memasuki ranah komersial ketika Indonet, Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia, berdiri tahun 1994. Indonet adalah pijakan penting dalam sejarah Internet di Indonesia. Melalui jaringan Indonet, pengguna Internet di Indonesia mulai bertumbuh. Seiring dengan hadirnya Indonet, perkembangan konten Internet menggeliat pada pertengahan tahun 1990an. Pada tahun-tahun itu media-media cetak mulai menampilkan isi media mereka ke Internet. Media pertama yang tercatat hadir di Internet adalah Republika (www.republika.co.id) yang tayang perdana 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Setelah itu diikuti Kompas Online, Tempo Interaktif (tempointeraktif.com), Bisnis Indonesia (bisnis.com), dan Harian Waspada (waspada.co.id) di Medan, Sumatera Utara. Majalah Tempo yang dibredel tahun 1994 bertransformasi menjadi tempointeraktif pada 6 Maret 1996. Generasi pertama media online ini hanya memindahkan edisi cetak mereka ke Internet (Margianto & Syaefullah, 2012).

Selanjutnya, kehadiran detik.com pada Juli 1998 menandai perubahan wajah media online secara signifikan dari sisi konten. Detik hadir dengan langgam jurnalisme yang khas, yang kemudian menjadi kiblat bagi kelahiran “jurnalisme baru” di Indonesia yang berbeda dengan pakem jurnalisme tradisional. Kehadiran detik lantas diikuti kehadiran media-media lain yang tumbuh subur pada tahun 2000 seperti astaga.com atau satune.com, sebelum akhirnya kolaps pada tahun 2002. Atau yang dikenal dengan Nasdaq Crash.

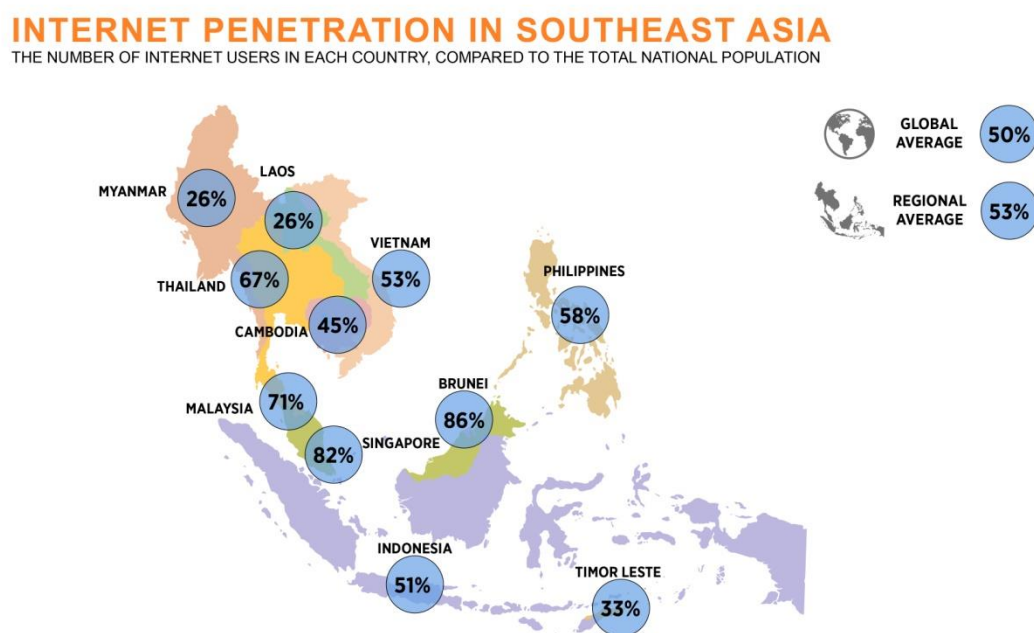
Sejarah mencatat, media-media baru selalu hadir seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan media erat terkait dengan perkembangan teknologi. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg melahirkan media cetak pada abad ke 18. Pada tahun 1920an munculnya teknologi radio melahirkan jurnalisme radio. Begitu pula kehadiran televisi pada pertengahan abad ke 20 melahirkan jurnalisme broadcasting.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sebesar 143,2 juta pengguna atau sekitar 54,8% dari total penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa. Penetrasi pengguna internet ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2016 berjumlah 132,3 juta jiwa dan 81,1 juta pengguna pada tahun 2014. Penyebaran pengguna internet masih didominasi Pulau Jawa sebanyak 58%, disusul Sumatera sebesar 19%, Kalimantan 7,9% dan Sulawesi 6,7%. Sedangkan berdasarkan data We Are Social menyebutkan pengguna media sosial aktif sebanyak 106 juta dan yang aktif sebanyak 92 juta diantaranya akses melalui mobile.

Pertumbuhan pengguna internet berkembang pesat ini diikuti oleh industri media. Hampir semua media, baik cetak radio televisi berbondong-bondong bertransformasi ke digital. Data Dewan Pers menyebutkan jumlah media online di Indonesia tahun 2017 mencapai 43 ribu. Dan baru sekitar 200 media yang terdata dan terverifikasi Dewan Pers. Transformasi media konvensional ke digital, selain kebutuhan pembaca juga karena bisnis media mulai bergeser ke digital. Keberadaan media digital yang tumbuh berkembang pesat ini melahirkan generasi baru yang disebut oleh Winograd dan Hais (2008) sebagai generasi milenial. Generasi ini adalah orang yang lahir tahun 1984 ke atas, dengan perilaku yang berbeda dalam mengakses informasi. Mereka mengandalkan teknologi internet untuk berbagai aktivitas, termasuk mencari informasi, baik melalui media berita maupun media sosial. Harga internet yang semakin murah dan penetrasi perangkat mobile phone yang membuat perpindahan cara masyarakat mencari informasi berubah drastis. Media sosial termasuk yang menjadi rujukan karena jumlah kenaikan sangat signifikan.

Berdasarkan data dari We Are Social menyebutkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berpotensi berkembang pesat mengingat baru sekitar 50% hingga 55% masyarakat Indonesia yang mengakses internet. Masih ada 45% lebih yang berpotensi untuk menjadi pengakses baru. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia bila dibandingkan dengan negara tetangga, penetrasi internet sedang, namun kalah dengan Brunei, Singapura, Malaysia dan lainnya.

Grafis 1.3
Penetrasi Internet di Asia Tenggara



Bahan: wearesocial.com

Data di atas adalah prosentasi pengguna internet, bukan jumlah pengakses internet. Prosentase ini terlihat bahwa penetrasi internet di Indonesia lebih rendah dari Singapura yang mencapai 82%, Malaysia sebanyak 71%, Brunei sebesar 86%, Vietnam sebanyak 53%, Filipina sebesar 58%, dan Thailand 67%. Dalam prosentase, Indonesia hanya lebih besar dari Timor Leste, Myanmar dan Laos. Namun jumlah ini masih di atas jumlah penetrasi rata-rata dunia yang 50%.

Namun, jika dilihat dari jumlah riil, penetrasi 51% ini besar karena penduduknya banyak. Dengan penetrasi lebih dari 50% an, maka orang yang menikmati internet di Indonesia bisa lebih dari 140 juta. Sebab, populasi Indonesia ditaksir 262 juta pada tahun ini. Bandingkan dengan populasi negara lainnya: Filipina 103,7 juta, Vietnam 95,4 juta, Thailand 68,2 juta, Myanmar 54,8 juta, Malaysia 31,1 juta, Kamboja 16 juta, Laos 7 juta, Singapura 5,7 juta, Timor Leste 1,2 juta, dan Brunei Darussalam 0,43 juta.¹

Tabel I.6
Pengguna Media Sosial dan Penetrasinya di Indonesia 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengguna Medsos (dalam jutaan)	55,9	64,5	72,3	82,0	92,1	100,8	109,8
% Perubahan	29,9%	15,4%	12,1%	13,5%	12,3%	9,4%	8,9%
% Pengguna internet	76,7%	77,0%	77,4%	79,8%	81,9%	82,0%	82,2%
% Penduduk	22,3%	25,4%	28,2%	31,8%	35,4%	38,4%	41,4%

Bahan: Diolah dari emarketer.com

Dengan komposisi penetrasi internet semacam ini, Indonesia memimpin dalam potensi digital. Jika kita melihat pemanfaatan media sosial, seperti facebook dan twitter misalnya, Indonesia juga berada di peringkat paling atas. Pengguna Facebook Indonesia dua kali lebih banyak dari Filipina, dan 8 kali lebih banyak dari Malaysia. Dalam penggunaan twitter, Indonesia juga berada di posisi paling puncak. Dengan pengguna ditaksir mendekati 19 juta, maka jumlahnya dua kali dari pengguna twitter di Filipina atau tiga kali dari Vietnam, atau hampir 9 kali lebih banyak dari Malaysia. Dengan jumlah ini, meski secara prosentase lebih kecil, namun jumlah pengakses internet lebih besar.

Tabel I.7
Peringkat Pengguna Facebook dan Twitter Asia Tenggara 2017

	Penduduk	Facebook	Twitter
Indonesia	263,5	87,8	18,9
Filipina	103,7	46,6	8,5
Vietnam	95,4	36,0	6,1
Thailand	68,2	20,3	3,7
Malaysia	31,1	11,5	2,1
Singapura	5,7	3,2	0,5

Bahan: Diolah dari emarketer.com

Dengan potensi digital yang sangat besar, tak mengherankan jika prediksi soal pertumbuhan iklan digital Indonesia juga tergolong besar. Situs emarketer.com memprediksi perolehan iklan digital Indonesia tahun 2017 ini sebesar US\$ 15,20 juta. Jumlah ini naik 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2019 jumlah iklannya ditaksir akan menjadi US\$19,5 juta, naik sekitar 20% lebih dari jumlah yang bisa didapat pada tahun ini. Jumlah ini akan terus meningkat dengan semakin besarnya penetrasi Internet di Indonesia.

Tabel I.8
Belanja Iklan Digital dan Mobile Internet Indonesia 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total belanja iklan (miliar)	US\$9,82	US\$11,39	US\$13,22	US\$15,20	US\$17,17	US\$19,58
%Perubahan	22,0%	16,0%	16,0%	15,0%	13,0%	14,0%
Belanja iklan digital (dalam miliar)	US\$0,46	US\$0,83	US\$1,42	US\$2,34	US\$3,51	US\$4,92
% perubahan	98,0%	80,0%	70,0%	65,0%	50,0%	40,0%
%dari total belanja iklan	4,7%	7,3%	10,7%	15,4%	20,4%	25,1%
Belanja mobile internet (dalam miliar)	US\$0,04	US\$0,14	US\$0,36	US\$0,82	US\$1,64	US\$2,94
%Perubahan	250,0%	230,0%	150,0%	130,0%	100,0%	80,0%
%Dari total belanja iklan	0,4%	1,2%	2,7%	5,4%	9,5%	15,0%

Bahan: emarketer.com

Melihat besarnya potensi pertumbuhan iklan digital ini, menarik pemain media konvensional bermigrasi ke digital. Tidak ada pilihan lain, karena bila tetap mempertahankan bisnis media konvensional, khususnya media cetak, baik harian maupun mingguan lambat dan pasti akan tutup. Media cetak diperkirakan hanya akan menyisakan sedikit media, dan sebagian besar akan gulung tikar bila tidak berubah mengikuti keinginan konsumen. Sementara, sejumlah media cetak yang bermigrasi ke media digital, gagal mendapatkan pendapatan iklan sebagaimana yang mereka peroleh sewaktu mengelola media cetak. Jumlah yang diterima sangat sedikit dan tidak bisa menutup operasional.

Isu krusial dalam bisnis media digital adalah iklan didominasi oleh pemain besar global, yakni Facebook dan Google. Kedua raksasa media digital berbasis platform ini, beserta aplikasi turunannya menguasai sekitar 70 persen iklan media digital. Artinya, hanya sisanya kurang dari 30 persen dari iklan media digital yang kemudian diperebutkan oleh puluhan media digital. Tantangan terbesar ke depan agar ekonomi digital di Indonesia tumbuh dan berkembang adalah memperbesar kue iklan digital terserap oleh media online nasional. Tantangan ke depan adalah, membangun ekonomi digital Indonesia bersaing dengan platform media internasional yang mendominasi pasar Internet Indonesia.

Saat ini Indonesia mengalami era banjir informasi ketika media dan jurnalisme bukan lagi pelaku tunggal dalam lalu-lintas informasi. Media bukan lagi the guardian angel informasi. Internet membuat siapapun yang ada di dalamnya memiliki akses terhadap penyebaran informasi. Kovach dan Rosenstiel (2012) menyebut kebenaran informasi di era digital ini blur, tidak jelas. Perubahan terbesar dari jurnalisme di era digital adalah ketika porsi tanggungjawab atas benar dan tidak, tak lagi berada di tangan media, juga di tangan individu.

Berkembangnya Jurnalisme 2.0 di era digital membuat pola produksi berita pun berubah. Media mulai menerapkan pola prosumer, yaitu pembaca tidak hanya berperan sebagai consumer tetapi juga producer. Pembaca secara aktif dalam berbagi pengetahuan, informasi, bahkan kebingungan mereka terhadap suatu kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Seiring dengan banjirnya fake news dan hoax, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakin tinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu atau pilkada. Sebagai portal berita yang tepercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, ini adalah kesempatan bagi media yang terverifikasi untuk menjawab kebutuhan itu.

Seiring dengan banjirnya pemberitaan palsu, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakin tinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu, pilkada hingga saat terjadi pertarungan politik yang semuanya menggunakan media untuk menyampaikan opini untuk mempengaruhi lawan dan kawan.

8. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola Perseroan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan merencanakan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Q. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

INDUSTRI INTERNET DAN MEDIA

Perkembangan internet di Indonesia, pada awalnya merupakan aktivitas para penggemar jaringan teknologi computer yang dimotori sejumlah pegiat teknologi computer di kampus. Koneksi pertama Internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UINet di kampus Universitas Indonesia. Joseph lalu mengembangkan University Network (Uninet) di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983, dengan membangun jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas, tidak hanya menjangkau Universitas Indonesia, namun juga Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Hasanudin, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Hingga pertengahan 1990an perkembangan Internet merupakan cerita tentang aktivitas para radio hobbyist yang antusias mengembangkan jaringan komputer menggunakan radio. Dari tangan akademisi dan hobbyist, Internet di Indonesia kemudian memasuki ranah komersial ketika Indonet, Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia, berdiri tahun 1994. Indonet adalah pijakan penting dalam sejarah Internet di Indonesia. Melalui jaringan Indonet, pengguna Internet di Indonesia mulai bertumbuh. Seiring dengan hadirnya Indonet, perkembangan konten Internet menggeliat pada pertengahan tahun 1990an. Pada tahun-tahun itu media-media cetak mulai menampilkan isi media mereka ke Internet. Media pertama yang tercatat hadir di Internet adalah Republika (www.republika.co.id) yang tayang perdana 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Setelah itu diikuti Kompas Online, Tempo Interaktif (tempointeraktif.com), Bisnis Indonesia (bisnis.com), dan Harian Waspada (waspada.co.id) di Medan, Sumatera Utara. Majalah Tempo yang dibredel tahun 1994 bertransformasi menjadi tempointeraktif pada 6 Maret 1996. Generasi pertama media online ini hanya memindahkan edisi cetak mereka ke Internet (Margianto & Syaefullah, 2012).

Selanjutnya, kehadiran detik.com pada Juli 1998 menandai perubahan wajah media online secara signifikan dari sisi konten. Detik hadir dengan langgam jurnalisme yang khas, yang kemudian menjadi kiblat bagi kelahiran “jurnalisme baru” di Indonesia yang berbeda dengan pakem jurnalisme tradisional. Kehadiran detik lantas diikuti kehadiran media-media lain yang tumbuh subur pada tahun 2000 seperti astaga.com atau satune.com, sebelum akhirnya kolaps pada tahun 2002. Atau yang dikenal dengan Nasdaq Crash.

Sejarah mencatat, media-media baru selalu hadir seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan media erat terkait dengan perkembangan teknologi. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg melahirkan media cetak pada abad ke 18. Pada tahun 1920an munculnya teknologi radio melahirkan jurnalisme radio. Begitu pula kehadiran televisi pada pertengahan abad ke 20 melahirkan jurnalisme broadcasting.

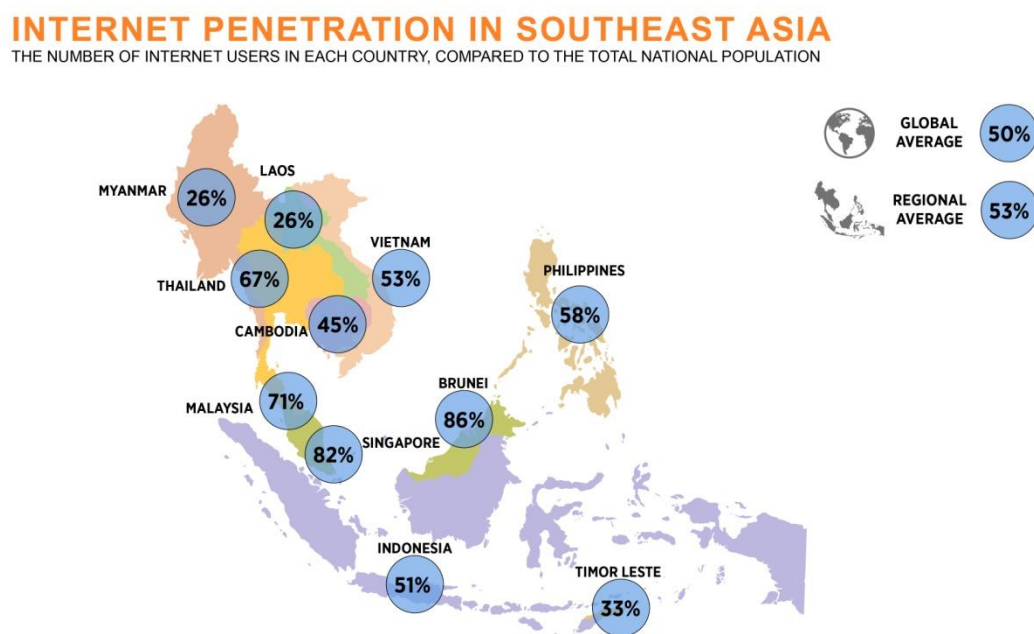
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), populasi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 sebesar 143,2 juta pengguna atau sekitar 54,8% dari total penduduk Indonesia sebesar 262 juta jiwa. Penetrasi pengguna internet ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2016 berjumlah 132,3 juta jiwa dan 81,1 juta pengguna pada tahun 2014. Penyebaran pengguna internet masih didominasi Pulau Jawa sebanyak 58%, disusul Sumatera sebesar 19%, Kalimantan 7,9% dan Sulawesi 6,7%. Sedangkan berdasarkan data We Are Social

menyebutkan pengguna media sosial aktif sebanyak 106 juta dan yang aktif sebanyak 92 juta diantaranya akses melalui mobile.

Pertumbuhan pengguna internet berkembang pesat ini diikuti oleh industri media. Hampir semua media, baik cetak radio televisi berbondong-bondong bertransformasi ke digital. Data Dewan Pers menyebutkan jumlah media online di Indonesia tahun 2017 mencapai 43 ribu. Dan baru sekitar 200 media yang terdata dan terverifikasi Dewan Pers. Transformasi media konvensional ke digital, selain kebutuhan pembaca juga karena bisnis media mulai bergeser ke digital. Keberadaan media digital yang tumbuh berkembang pesat ini melahirkan generasi baru yang disebut oleh Winograd dan Hais (2008) sebagai generasi milenial. Generasi ini adalah orang yang lahir tahun 1984 ke atas, dengan perilaku yang berbeda dalam mengakses informasi. Mereka mengandalkan teknologi internet untuk berbagai aktivitas, termasuk mencari informasi, baik melalui media berita maupun media sosial. Harga internet yang semakin murah dan penetrasi perangkat mobile phone yang membuat perpindahan cara masyarakat mencari informasi berubah drastis. Media sosial termasuk yang menjadi rujukan karena jumlah kenaikan sangat signifikan.

Data dari We Are Social menyebutkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berpeluang berkembang pesat mengingat baru sekitar 50% masyarakat Indonesia yang akses internet. Masih ada 45% lebih yang berpotensi untuk menjadi pengakses baru. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia bila dibandingkan dengan negara tetangga, penetrasi internet sedang, namun kalah dengan Brunai, Singapura, Malaysia dan lainnya.

Grafis 1.3
Penetrasi Internet di Asia Tenggara



Bahan: wearesocial.com

Dengan prosentase seperti ini terlihat bahwa penetrasi internet di negara kita lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dalam prosentase, Indonesia hanya lebih besar dari Timor Leste, Myanmar dan Laos. Namun jumlah ini masih di atas jumlah penetrasi rata-rata dunia yang 50%.

Namun, jika dilihat dari jumlah riil, penetrasi 51% ini besar karena penduduknya banyak. Dengan penetrasi lebih dari 50%, maka orang yang menikmati internet di Indonesia bisa lebih dari 130 juta. Sebab, populasi Indonesia ditaksir 260 juta pada tahun ini. Bandingkan dengan populasi negara lainnya: Filipina 103,7 juta, Vietnam 95,4 juta, Thailand

68,2 juta, Myanmar 54,8 juta, Malaysia 31,1 juta, Kamboja 16 juta, Laos 7 juta, Singapura 5,7 juta, Timor Leste 1,2 juta, dan Brunei Darussalam 0,43 juta.²

Tabel I.6
Pengguna Media Sosial dan Penetrasinya di Indonesia 2013-2019

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengguna Medsos (dalam jutaan)	55,9	64,5	72,3	82,0	92,1	100,8	109,8
% Perubahan	29,9%	15,4%	12,1%	13,5%	12,3%	9,4%	8,9%
% Pengguna internet	76,7%	77,0%	77,4%	79,8%	81,9%	82,0%	82,2%
% Penduduk	22,3%	25,4%	28,2%	31,8%	35,4%	38,4%	41,4%

Bahan: Diolah dari emarketer.com

Dengan postur digital semacam ini, Indonesia memimpin dalam potensi digital. Jika kita melihat pemanfaatan media sosial, seperti facebook dan twitter misalnya, Indonesia juga berada di peringkat paling atas. Pengguna Facebook Indonesia dua kali lebih banyak dari Filipina, dan 8 kali lebih banyak dari Malaysia. Dalam penggunaan twitter, Indonesia juga berada di posisi paling puncak. Dengan pengguna ditaksir mendekati 19 juta, maka jumlahnya dua kali dari pengguna twitter di Filipina atau tiga kali dari Vietnam, atau hampir 9 kali lebih banyak dari Malaysia.

Tabel I.7
Peringkat Pengguna Facebook dan Twitter Asia Tenggara 2017

	Penduduk	Facebook	Twitter
Indonesia	263,5	87,8	18,9
Filipina	103,7	46,6	8,5
Vietnam	95,4	36,0	6,1
Thailand	68,2	20,3	3,7
Malaysia	31,1	11,5	2,1
Singapura	5,7	3,2	0,5

Bahan: Diolah dari emarketer.com

Dengan potensi digital yang sangat besar, tak mengherankan jika prediksi soal pertumbuhan iklan digital Indonesia juga tergolong besar. Situs emarketer.com memprediksi perolehan iklan digital Indonesia tahun 2017 ini sebesar US\$ 15,20 juta. Jumlah ini naik 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2019 jumlah iklannya ditaksir akan menjadi US\$19,5 juta, naik sekitar 20 persen lebih dari jumlah yang bisa didapat pada tahun ini.

Tabel I.8
Belanja Iklan Digital dan Mobile Internet Indonesia 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total belanja iklan (miliar)	US\$9,82	US\$11,39	US\$13,22	US\$15,20	US\$17,17	US\$19,58
%Perubahan	22,0%	16,0%	16,0%	15,0%	13,0%	14,0%
Belanja iklan digital (dalam miliar)	US\$0,46	US\$0,83	US\$1,42	US\$2,34	US\$3,51	US\$4,92
% perubahan	98,0%	80,0%	70,0%	65,0%	50,0%	40,0%
%dari total belanja iklan	4,7%	7,3%	10,7%	15,4%	20,4%	25,1%
Belanja mobile internet (dalam miliar)	US\$0,04	US\$0,14	US\$0,36	US\$0,82	US\$1,64	US\$2,94
%Perubahan	250,0%	230,0%	150,0%	130,0%	100,0%	80,0%
%Dari total belanja iklan	0,4%	1,2%	2,7%	5,4%	9,5%	15,0%

Bahan: emarketer.com

Melihat besarnya potensi pertumbuhan iklan digital ini, menarik pemain media konvensional bermigrasi ke digital. Tidak ada pilihan lain, karena bila tetap mempertahankan bisnis media konvensional, khususnya media cetak, baik harian maupun mingguan lambat dan pasti akan tutup. Media cetak diperkirakan hanya akan menyisakan sedikit media, dan sebagian besar akan gulung tikar bila tidak berubah mengikuti keinginan konsumen. Sementara, sejumlah media cetak yang bermigrasi ke media digital, gagal mendapatkan pendapatan iklan sebagaimana yang mereka peroleh sewaktu mengelola media cetak. Jumlah yang diterima sangat sedikit dan tidak bisa menutup operasional.

Isu krusial dalam bisnis media digital adalah iklan didominasi oleh pemain besar global, yakni Facebook dan Google. Kedua raksasa media digital berbasis platform ini, beserta aplikasi turunannya menguasai sekitar 70% iklan media digital. Artinya, hanya sisanya kurang dari 30% dari iklan media digital yang kemudian diperebutkan oleh puluhan media digital. Tantangan terbesar ke depan agar ekonomi digital di Indonesia tumbuh dan berkembang adalah memperbesar kue iklan digital terserap oleh media online nasional. Tantangan ke depan adalah, membangun ekonomi digital Indonesia bersaing dengan platform media internasional yang mendominasi pasar Internet Indonesia.

Saat ini Indonesia mengalami era banjir informasi ketika media dan jurnalisme bukan lagi pelaku tunggal dalam lalu-lintas informasi. Media bukan lagi the guardian angel informasi. Internet membuat siapapun yang ada di dalamnya memiliki akses terhadap penyebaran informasi. Kovach dan Rosenstiel (2012) menyebut kebenaran informasi di era digital ini blur, tidak jelas. Perubahan terbesar dari jurnalisme di era digital adalah ketika porsi tanggungjawab atas benar dan tidak, tak lagi berada di tangan media, juga di tangan individu.

Berkembangnya Jurnalisme 2.0 di era digital membuat pola produksi berita pun berubah. Media mulai menerapkan pola prosumer, yaitu pembaca tidak hanya berperan sebagai consumer tetapi juga producer. Pembaca secara aktif dalam berbagi pengetahuan, informasi, bahkan kebingungan mereka terhadap suatu kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Seiring dengan banjirnya fake news dan hoax, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakintinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu ataupun pilkada. Sebagai portal berita yang tepercaya dan memiliki kredibilitas tinggi, ini adalah kesempatan bagi media yang terverifikasi untuk menjawab kebutuhan itu.

Seiring dengan banjirnya fake news dan hoax, kebutuhan pasar akan berita yang akurat semakin tinggi. Publik membutuhkan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran suatu informasi agar tak salah mengambil keputusan, terutama di masa pemilu, pilkada hingga saat terjadi pertarungan politik yang semuanya menggunakan media untuk menyampaikan opini untuk mempengaruhi lawan dan kawan.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015. Laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Talupan Lumban Gaol, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0986). dan 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0824).

(dalam Rp)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2018	2017	2016	2015
Modal Saham	17.500.000.000	12.600.000.000	12.600.000.000	600.000.000
Modal disetor lainnya	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-
Penghasilan komprehensif lain	259.241.052	218.979.811	(393.499.901)	(219.692.033)
Defisit	(7.038.516.715)	(7.187.362.341)	(7.640.085.615)	(9.106.712.247)
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk	10.810.724.337	5.721.617.470	4.656.414.484	(8.726.404.280)
Kepentingan Non-Pengendali	2.128.143	(6.034.483)	46.063.378	(86.406.104)
Jumlah Ekuitas	10.812.852.480	5.715.582.987	4.702.477.862	(8.812.810.384)

Berdasarkan Akta No. 02/2018, para pemegang saham telah menyetujui kenaikan modal dasar dari semula Rp 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) menjadi Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) dan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp 12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), perubahan nominal saham menjadi Rp 100 (seratus Rupiah) dan menyetujui pengalihan saham dari Aldrian Suwardi Chandra sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham kepada Wiliam Martaputra serta pengalihan saham dari Steven sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) lembar saham kepada Wiliam Martaputra, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	700.000.000	70.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Stephen K. Sulistyono	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
2. Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	5.687.500.000	32,50%
3. Wiliam Martaputra	26.250.000	2.625.000.000	15,00%
4. Suwarjono	17.500.000	1.750.000.000	10,00%
5. Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	875.000.000	5,00%
6. Steven	8.750.000	875.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000.000	17.500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	525.000.000	52.500.000.000	

Setelah RUPS tersebut hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, atau sebanyak 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 (Seratus Rupiah) setiap saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam Rupiah)

	Modal saham	Modal disetor lainnya	Penghasilan Komprehensif lain	Agio Saham	Saldo Laba (defisit)	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2018	17.500.000.000	90.000.000	259.241.052	-	(7.038.516.715)	2.128.143	10.812.852.480
Penawaran Umum sebanyak 150.000.000 lembar saham	15.000.000.000		-	11.600.000.000	-	-	26.600.000.000
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2018 setelah penawaran umum dilaksanakan	32.500.000.000	90.000.000	259.241.052	11.600.000.000	(7.038.516.715)	2.128.143	37.412.852.480

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak 30% dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan dimulai dari tahun buku 2018.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur

dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No. PER-24/P/J/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. SKD ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum PT Arkadia Digital Media Tbk No. 99 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 13 tanggal 5 September 2018. Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 150.000.000 (seratus juta) saham, sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Persentase (%)	Porsi Penjaminan	
		Lembar Saham	Nilai (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	99,8531%	149.780.000	29.956.000.000
Penjamin Emisi Efek			
PT Phillip Sekuritas Indonesia	0,0200%	30.000	6.000.000
PT Panin Sekuritas Tbk.	0,0200%	30.000	6.000.000
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	0,0200%	30.000	6.000.000
PT KGI Sekuritas Indonesia	0,0133%	20.000	4.000.000
PT Reliance Sekuritas	0,0133%	20.000	4.000.000
PT Profindo Sekuritas Indonesia	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Universal Broker Indonesia Sekuritas	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Onix Sekuritas	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Panca Global Sekuritas	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Wanteg Sekuritas	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Artha Sekuritas Indonesia	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	0,0067%	10.000	2.000.000
PT NISP Sekuritas	0,0067%	10.000	2.000.000
PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia	0,0067%	10.000	2.000.000
Total	100,000%	150.000.000	30.000.000.000

Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 30 Agustus 2018.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp 200,- sampai dengan Rp 400,- setiap saham. Dengan

mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 200,-.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
2. Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri Jasa Pelayanan Kesehatan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali

Menara Kuningan 11th floor
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 10210

STTD	:	Nomor AP-321/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Talupan Lumban Gaol, CPA
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor AP.0986
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	Nomor 13.040122018/EL/DBSDA tanggal 10 Januari 2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Imran Muntaz & Co

Office 8, Lantai 35
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

STTD	:	Nomor 495/PM/STTD-KH/2003
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200310.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
Surat Penunjukan	:	Nomor 0257/BI-LOE/IMCO/I/18 tanggal 16 Januari 2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara

obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn

Jl. Pengadilan No. 23A

Bogor Tengah 16121,

Jawa Barat

- STTD : Nomor STTD.N-10/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN.
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Nomor 012-020-083-080886
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Surat Penunjukan : Nomor 9/EKL/V/2018 tanggal 22 Mei 2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4

Kuningan, Setiabudi

Jakarta Selatan, 12950

- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014.
- Izin Usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.
- Surat Penunjukan : Nomor 420/BIMA/BID/V/2018 tanggal 28 Mei 2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian

saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADM No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018. (“**Akta No.127/2018**”). Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publikserta UUPT.

15.1 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam Bidang:
 - a. Perdagangan Umum;
 - b. Pembangunan;
 - c. Perindustrian;
 - d. Percetakan;
 - e. Multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
 - f. Jasa; dan
 - g. Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha utama:
 - (i) Menjalankan perdagangan umum baik atas perhitungan sendiri atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agen tunggal, leveransir, supplier dan frossier dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama:
 - (i) Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
 - (ii) Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;
 - (iii) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, kartu nama dan sejenisnya, baik dengan menggunakan mesin biasa maupun offset;
 - (iv) Menjalankan usaha dalam jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya
 - (v) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan; dan
 - (vi) Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan darat/laut, telekomunikasi, hiburan, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, usaha pers (yang meliputi kegiatan jurnalistik, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau media online, yang bertujuan untuk menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat), usaha dibidang pemberian jasa (kecuali jasa hukum dan perpajakan), dengan memperhatikan izin-izin yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

15.2 Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan Modal

Modal

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang**), peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar ini.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut **HMETD**) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (i) ditujukan kepada karyawan dan/atau manajemen Perseroan;
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau ;
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-

-
- masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
- e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 5. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan Modal Dasar Perseroan

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini.
3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

15.3 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa RUPS Tahunan

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha
-

-
- keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
- c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. jika perlu, melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

RUPS Luar Biasa

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
2. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS
 - b. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
 - c. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan;
 - (vi) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-penyelenggaraan RUPS diterima Direksi;
 - d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;
 - e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterima Dewan Komisaris;
 - f. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam huruf c dan huruf e, maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 - g. dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham

sebagaimana dimaksud huruf f, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 3.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
 - b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat:
 - (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (iv) tanggal pemanggilan RUPS;
 - c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham;
 - d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui:
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (ii) (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
 - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia;
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia;
 - g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS;
 - h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 4. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila:
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang
-

-
- bersangkutan dikeluarkan.
5. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 6.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
 - b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
 - c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan paling kurang melalui:
 - (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;
 - d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia;
 - e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS;
 - f. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat (5) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf h Pasal 9 anggaran dasar Perseroan.
 7. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
 8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara RUPS dapat berupa:
 - a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat
-

pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

15.4 Ketentuan Hak, Preferensi dan Pembatasan pada Masing-Masing Jenis Saham Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor urut saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

-
- dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Surat Saham Pengganti

1. a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan diadmnistrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
e. dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 2. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 4. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang
-

-
- Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
 8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut) Pasal ini.
 9. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

Penitipan Kolektif

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini, yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga

-
- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - l. manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
 - m. perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
-

dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak atas Saham

- a. bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan di administrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
- d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- e. dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- f. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- g. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
- j. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat

pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

- k. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
- l. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut) Pasal ini.
- m. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

15.5 Direksi

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Direktur Independen. Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Wiliam Martaputra
Direktur : Suwarjono
Direktur Independen : Fastabiqul Khair Algotot

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh

-
- persetujuan serta melaksanakannya.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan
 8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya perbuatan hukum tersebut.
 11. Selain yang tersebut dalam ayat (8) dan ayat (9) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
 12. a. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 13. Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka Direksi yang berhalangan hadir wajib untuk memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
 14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
-

15.6 Komisaris Dewan Komisaris

Komisaris

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama. Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyono

Komisaris : Iwa Sukresno Karunia

Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau

melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

15.7 Ketentuan Lainnya Terkait Pemegang Saham

Pengalihan Kekayaan Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

-
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Ketentuan Penutup

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
 - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam Penitipan Kolektif;
 - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau

domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 Hari Kerja, yaitu pada 12 September 2018 sampai dengan 13 September 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 September 2018.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mayapada International Tbk
Cabang Kantor Pusat Operasional Sudirman – Jakarta
Atas nama : PT Danatama Makmur Sekuritas
No. Rekening: 100.300.26551

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, pemesan retail dan pemesan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2018 pukul 16.00 WIB pada rekening tersebut di atas, kecuali bagi pemesan *retail* dan pemesan institusi yang menerima penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal pembayaran dana IPO kepada Emiten yaitu tanggal 14 September 2018. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Sedangkan untuk pemesan internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPSnya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjataan atas pemesanan pembelian saham. Bagi

pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
 - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.

Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.

- 2) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran

-
- Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat – lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada Gerai Penawaran Umum yang bertempat di:

Gerai Penawaran Umum
PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XIX. LAPORAN KEUANGAN

Jakarta, 7 September 2018

No. Ref.: 806 /IM-FG/LO/AMN-0002/VIII/18

Kepada Yth.

PT Arkadia Digital Media, Tbk.

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C

Jl Jend. Sudirman No.86 RT/RW 10/11

Karet Tengsin, Tanah Abang

Jakarta Pusat, 10220

U.p. : Direksi

Perihal : Pendapat Hukum Atas PT Arkadia Digital Media sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Arkadia Digital Media.

Dengan hormat,

Sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Imran Muntaz & Co. ("IMCO"), yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 495/PM/STTD-KH/2003, tanggal 16 Juni 2003, atas nama Firoz Gaffar, SH., MH. dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 200310, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), telah ditunjuk oleh PT Arkadia Digital Media ("Perseroan") untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) serta memberikan Pendapat Hukum ini ("Pendapat Hukum") atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak atas penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham (selanjutnya disebut sebagai "Penawaran Umum Perdana"), dimana saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor, Perseroan akan melaksanakan program opsi kepemilikan saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan dengan jumlah sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pelaksanaan program opsi kepemilikan saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan tersebut akan dilakukan terhitung 5 (lima) tahun sejak tanggal rapat umum pemegang saham yang menyetujui program opsi kepemilikan saham kepada karyawan dan manajemen Perseroan dan akan dilaksanakan setelah Penawaran Umum Perdana.

Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan perangkat keras di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Infrastruktur dan perangkat keras yang akan dibeli sebagian besar berupa Server yang diperlukan untuk melayani pengunjung dari portal-portal baru yang telah didirikan oleh Anak Perusahaan. Penjual adalah pihak ketiga, Anak Perusahaan akan melakukan tender untuk pengadaan infrastruktur dan perangkat keras yang berlaku umum di Anak Perusahaan, dimana akan dipilih vendor yang mampu menyediakan perangkat tersebut dengan harga terbaik. Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
- b) Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan platform dan perangkat lunak untuk kegiatan usaha di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
- c) Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk modal kerja. Dimana dari jumlah tersebut, sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Perseroan dan sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami yang hasilnya termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum atas Perseroan ("LUT"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan termasuk surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertanggal 30 Mei 2018 dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan (“**Surat Pernyataan Perseroan**”), yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana ini adalah pada tanggal 31 Maret 2018.
2. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum Negara lain.
3. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.
4. Pendapat Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
5. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini LUT. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.04/HKHPM/XI/2012 tentang Perubahan Standar Profesi dan dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.

6. Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan/atau perpajakan, data statistik maupun hal lainnya selain daripada pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.
2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Setiap dokumen dan/atau perjanjian-perjanjian dimana Perseroan dan Anak Perusahaan, dokumen tersebut sah dan mengikat para pihak, serta tidak melanggar ketentuan hukum diluar yurisdiksi Indonesia dan masih tetap berlaku sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan.
6. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta dengan tunduk pada ruang lingkup, asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan secara sah dan memiliki status sebagai badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

No. 5 tanggal 6 Maret 2012 (“**Akta Pendirian**”), dibuat di hadapan Arianly Triutomo, Notaris di Tangerang. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13641.AH.01.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012.

Perseroan melakukan perubahan nama dari yang sebelumnya PT Bukit Irama menjadi PT Arkadia Digital Media berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 08 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Frediyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, (“**Akta No. 2/2018**”) sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Februari 2018.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sejak tanggal Akta Pendirian dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 (“**Anggaran Dasar**”) yang mengatur mengenai (i) persetujuan sehubungan dengan penawaran umum saham perdana Perseroan; (ii) persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi kepemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perseroan melalui program *employee and management stock ownership program* (“**EMSOP**”); (iii) menyetujui dan memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk proses penawaran umum perdana; (iv) mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direktur Utama Perseroan untuk melaksanakan keputusan para pemegang saham; (v) menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; dan (vi) menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan peraturan OJK.

Dimana perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018 tersebut adalah merupakan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Selanjutnya, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan guna mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tercantum pada LUT kami.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan perdagangan umum baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau/daerah, menjadi agen dan/atau distributor (kecuali agen perjalanan) dari badan-badan lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, agen tunggal, leveransir, supplier dan frossier dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- i. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pembangunan gedung, jalanan, jembatan (kontraktor), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi;
- ii. Mendirikan dan mengusahakan industri kimia dan peralatan telekomunikasi;
- iii. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan buku, kartu nama dan sejenisnya, baik dengan menggunakan mesin biasa maupun offset;
- iv. Menjalankan usaha dalam jasa penyediaan dan pemanfaatan multi media melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya;
- v. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan; dan
- vi. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, yang menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, telekomunikasi, hiburan, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, usaha pers (yang meliputi kegiatan jurnalistik, antara lain mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau media online, yang bertujuan untuk menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi kepada masyarakat, usaha dibidang pemberian jasa lainnya (kecuali jasa hukum dan perpajakan), dengan memperhatikan izin-izin yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya, dalam hal Perseroan hendak melaksanakan suatu kegiatan usaha utama maupun penunjang, dimana kegiatan usaha utama maupun penunjang yang akan dijalankan tersebut memerlukan suatu perijinan operasional khusus maka kegiatan usaha tersebut wajib mendapatkan perijinan yang relevan sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

3. Bahwa Sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan perangkat keras di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Infrastruktur dan perangkat keras yang akan dibeli sebagian besar berupa Server yang diperlukan untuk melayani pengunjung dari portal-portal baru yang telah didirikan oleh Anak Perusahaan. Penjual adalah pihak ketiga, Anak Perusahaan akan melakukan tender untuk pengadaan infrastruktur dan perangkat keras yang berlaku umum di Anak Perusahaan, dimana akan dipilih vendor yang mampu menyediakan perangkat tersebut dengan harga terbaik. Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
 - b. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan platform dan perangkat lunak untuk kegiatan usaha di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.
 - c. Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan untuk modal kerja. Dimana dari jumlah tersebut, sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Perseroan dan sekitar 1% (satu persen) akan digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN). Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang digunakan di Anak Perusahaan (AMN dan MMN) akan diberikan sebagai penyertaan modal.

Transaksi sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan transaksi material yang dikecualikan berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. kep-614/BL/2011 ("Peraturan IX.E.2") disebabkan transaksi tersebut dilaksanakan dengan Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada seluruh Anak Perusahaan tersebut, dan merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan peraturan IX.E.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 ("Peraturan IX.E.1")

disebabkan transaksi tersebut adalah suatu transaksi dengan Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) namun berdasarkan peraturan IX.E.1 butir 5 hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 sehingga Perseroan tidak perlu untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan IX.E.1, namun Perseroan tetap wajib untuk melakukan laporan kepada OJK pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi tersebut dilaksanakan.

4. Berdasarkan Anggaran Dasar, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.70.000.000.000,- terbagi atas 700.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp.17.500.000.000,- terbagi atas 175.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per lembar saham

Sesuai dengan Akta No. 2/2018, dimana Perseroan menerbitkan saham baru kepada masing-masing pemegang saham yaitu Iwa Sukresno Karunia mengambil bagian sebanyak 15.925.000 saham, Stephen K Sulistyو sebanyak 15.925.000 saham, Wiliam Martaputra sebanyak 7.350.000 saham, Suwarjono sebanyak 4.900.000 saham yang telah dibayarkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham tersebut, sehingga susunan pemegang saham Perseroan sejak Akta No. 2/2018 sampai dengan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Stephen K. Sulistyو	5.687.500.000	56.875.000	32,5%
2.	Iwa Sukresno Karunia	5.687.500.000	56.875.000	32,5%
3.	Wiliam Martaputra	2.625.000.000	26.250.000	15%
4.	Suwarjono	1.750.000.000	17.500.000	10%
5.	Aldrian Suwardi Chandra	875.000.000	8.750.000	5%
6.	Steven	875.000.000	8.750.000	5%
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		17.500.000.000	175.000.000	100
Saham dalam Portepel		52.500.000.000	525.000.000	-

Susunan pemegang saham, struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam 3 tahun terakhir dan struktur terakhir kali sebagaimana dimaksud diatas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan.

5. Sehubungan dengan terjadinya pengalihan saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dimana hal tersebut terjadi

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dan dimana harga pelaksanaan pengalihan saham tersebut di bawah harga Penawaran Umum Perdana, maka berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum seluruh pemegang saham Perseroan tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

6. Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan terkini dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyono
Komisaris : Iwa Sukresno Karunia
Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

Direksi

Direktur Utama : Wiliam Martaputra
Direktur : Suwarjono
Direktur Independen : Fastabiqul Khair Algotot

Pengangkatan anggota komisaris dan direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/ADM/BOC/V/2018, tanggal 30 Mei 2018, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua : Ariyo Ali Suprpto
Anggota : Oky Darmawan
Anggota : Nurrachman Hidayat

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Mei 2018, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Sebagai pemenuhan dan sesuai dengan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Erfan Suryono sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, dimana penunjukan ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan keputusan Direksi Perseroan No. 003/ADM/BOD/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disahkan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Mei 2018, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/ADM/BOC/V/2018, tanggal 30 Mei 2018, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ariyo Ali Suprpto
Anggota : Stephen Kurniawan Sulistyio
Anggota : Iwa Sukresno Karunia

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan, AMN, MMN dan IAM telah memperoleh ijin-ijin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ijin-ijin penting tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

AMN telah memenuhi seluruh ijin operasional yang diperlukan, sedangkan untuk Perseroan dan MMN, dalam kegiatan usahanya saat ini tidak memerlukan suatu perijinan operasional khusus, dan IAM sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini belum memiliki perijinan operasional disebabkan belum menjalankan operasional usaha.

8. Pendirian, perubahan anggaran dasar, struktur permodalan, termasuk setiap pengalihan atau pengeluaran saham baru, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas kewajiban untuk dilakukannya pengumuman koran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:
 - a. pengumuman koran atas perubahan pengendalian AMN berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.43 tanggal 28 November 2013, yang dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H, Notaris di Jakarta;
 - b. pengumuman koran atas perubahan pengendalian MMN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 1 April 2014, yang dibuat dihadapan Mustangin, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta; dan

- c. pengumuman koran atas perubahan pengendalian IAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 27 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H, MK.n, Notaris di Kota Cirebon.

Dengan tidak dilakukannya pengumuman pada surat kabar sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para kreditur dapat menuntut kepada masing-masing Anak Perusahaan yang relevan agar melakukan ganti rugi kepada kreditur atas setiap kerugian yang dialami oleh kreditur sehubungan dengan perubahan pengendalian tersebut.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat tuntutan hukum, baik yang telah terjadi maupun sedang berlangsung, dari masing-masing kreditur Anak Perusahaan sehubungan tidak lakukannya pengumuman pada surat kabar atas perubahan pengendalian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas.

9. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Mata Media Nusantara ("MMN") sebanyak 31.990.000 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing memiliki nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp.3.199.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang mewakili 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada MMN;
 - b. PT Arkadia Media Nusantara ("AMN") sebanyak 121.190.000 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing memiliki nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp.12.119.000.000,- (dua belas miliar seratus sembilan belas juta Rupiah), yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada AMN; dan
 - c. PT Integra Archipelago Media ("IAM") sebanyak 9.990.000 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham, masing-masing memiliki nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp.999.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang disetor dan ditempatkan pada IAM.

(MMN, AMN dan IAM secara bersama-sama dalam Pendapat Hukum ini disebut sebagai "Anak Perusahaan")

Penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali atas pengumuman koran sehubungan dengan perubahan pengendalian pada MMN, AMN dan IAM yang telah kami sebutkan pada pendapat angka 7.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, selain daripada penyertaan pada masing-masing anak Perusahaan, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material baik tanah, bangunan dan/atau kendaraan bermotor.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, AMN telah memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah atas harta kekayaan material tersebut, dan aset material AMN tersebut pada saat ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, sedangkan MMN dan IAM tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material dalam bentuk apapun.

Selanjutnya MMN dan AMN juga telah mengajukan permohonan atas hak atas kekayaan intelektual sehubungan dengan merek yang digunakan baik oleh MMN dan AMN.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pembayaran upah minimum regional, kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") dan Wajib Laport Tenaga Kerja ("WLTk"), kecuali atas:
- IAM belum melaksanakan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dan belum melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan WLTk; dan
 - Perseroan, MMN dan AMN telah memiliki Peraturan Perusahaan ("PP") namun masih dalam proses untuk disahkan oleh instansi yang berwenang, sedangkan IAM belum memiliki PP.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada suatu perusahaan dalam hal tidak mendaftarkan dirinya dan pegawainya pada kepesertaan BPJS, dimana sanksi tersebut berupa:

- teguran tertulis;
- denda; dan/atau
- tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang tidak memiliki PP dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan, Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi WLTk sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Disebabkan sampai dengan tanggal PSH ini IAM belum memiliki karyawan, maka IAM dapat dikecualikan untuk memenuhi kepesertaan BPJS, pelaporan WLTK dan memiliki PP.

12. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini Perseroan tidak memiliki dan terikat dengan suatu perjanjian tertentu yang bersifat material dengan pihak lainnya dan perjanjian-perjanjian material yang mengikat AMN dan MMN masih berlaku, sah, serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar AMN dan MMN dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerjasama layanan penyedia konten dan perjanjian kerjasama layanan jaringan telekomunikasi, sedangkan IAM tidak memiliki dan/atau menandatangani perjanjian apapun dengan pihak manapun.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan maupun Anak Perusahaan yang dapat merugikan dan yang dapat menghalangi atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana ini dan/atau merugikan pemegang saham publik.

13. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Arkadia Digital Media No. 99 tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Arkadia Digital Media No. 13 tanggal 5 September 2018, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Arkadia Digital Media No. 143 tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Arkadia Digital Media Tbk. No. 73 tanggal 25 Juni 2018 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Arkadia Digital Media Tbk. No. 100 tanggal 27 Agustus 2018 dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 - c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 28 Juni 2018, antara Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Nomor SP-054/SHM/KSEI/0518 tanggal 2 Juli 2018, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas sah dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut diatas, para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan diluar rapat yang disetujui oleh seluruh pemegang saham

Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 87 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor (“Akta No. 87/2018”), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. mengubah jumlah dan cara pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dan menyetujui untuk menegaskan kembali jumlah dan cara pengeluaran saham baru yang akan ditawarkan kepada karyawan serta manajemen Perseroan melalui program EMSOP, sebagaimana telah diputuskan sebelumnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 25 Juni 2018 keduanya di hadapan Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 - b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dengan pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai Rp.100 (seratus Rupiah), atau sebesar 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana;
 - c. rencana Perseroan untuk menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi kepemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perseroan melalui program EMSOP dengan mengalokasikan sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham atau sebesar-besarnya 3,56% (tiga koma lima enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan ketentuan:
 - i. pelaksanaan program EMSOP bukan merupakan bagian dari saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan
 - ii. pelaksanaan program EMSOP akan dilaksanakan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang pelaksanaannya akan dilakukan kemudian setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan oleh Perseroan.
14. Berdasarkan Pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, baik Perseroan, Anak Perusahaan dan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan

mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

15. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana ini.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dan terdaftar pada OJK, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Imran Muntaz & Co.



Firoz Gaffar, SH., MH
STTD No. 495/PM/STTD-KH/2003

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk
(d/h PT BUKIT IRAMA)
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(MATA UANG RUPIAH)**

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK
DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016
DAN 2015

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015**

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiliam Martaputra
Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center Lt 19, Jl Jend. Sudirman Kav.86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Domisili : Jl Pembangunan II No 16 A, Rt 009 Rw 002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : 021-7241888
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

- 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan;
- 2) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3) a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Juli 2018

Direktur Utama



Wiliam Martaputra

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : R.11.1/005/07/18

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Arkadia Digital Media Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Arkadia Digital Media Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2018, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arkadia Digital Media Tbk dan entitas anak tanggal 31 Maret 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R.11.1/005/07/18 tertanggal 10 Juli 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Arkadia Digital Media Tbk dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Entitas dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana disajikan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian PT Arkadia Digital Media Tbk dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.

Laporan keuangan konsolidasian PT Arkadia Digital Media Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017, 2016, 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. R.13.1390618 bertanggal 13 Juni 2018 yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Arkadia Digital Media Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Talupan L. Gaol
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0986

18 Juli 2018

Branch Office :

Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7
Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi 17132 - Indonesia
Phone : (62-21) 88866199 (Hunting)
Fax : (62-21) 88865750
Email : admin@kapdbstda-bekasi.com

An independent member of **BKR** International,
with offices throughout the World

Head Office :
Menara Kuningan 11th floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 10210

Laporan No : R.13.1390618

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Kepada Yth,
Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Arkadia Digital Media (d/h PT Bukit Irama)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian **PT Arkadia Digital Media (d/h PT Bukit Irama) dan Entitas Anak** terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar perikatan audit. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, namun tidak untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

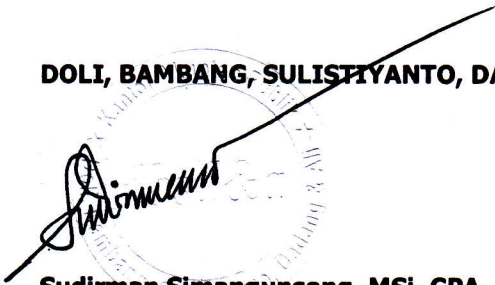
Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT Arkadia Digital Media (d/h PT Bukit Irama) dan Entitas Anak** tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana **PT Arkadia Digital Media (d/h PT Bukit Irama) dan Entitas Anak**, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Sudirman Simangunsong, MSi, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP. 0824

13 Juni 2018

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2018 SERTA 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember			
	Catatan	31 Maret 2018	2017	2016	2015
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2f,2r,4	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404
Piutang usaha - pihak ketiga	2g,2r,5	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048
Piutang lain-lain		-	-	-	-
Pihak berelasi	2e,2g,2r,6	-	5.021.200.000	4.321.200.000	-
Pihak ketiga	2g,2r,6	11.000.000	118.750.000	171.360.000	600.000
Pajak dibayar dimuka	2n	146.003.493	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	2h,7	4.005.394.764	2.187.450.464	680.727.008	1.234.929.450
Pendapatan masih harus diterima		26.500.000	-	-	-
Uang muka	8	237.192.435	119.288.566	73.167.830	522.625.350
Jumlah Aset Lancar		<u>11.264.609.262</u>	<u>13.937.021.426</u>	<u>10.937.561.821</u>	<u>6.326.517.252</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - bersih	2i,9	1.646.833.489	1.491.109.713	1.728.615.189	1.430.085.963
Aset lain-lain	10	167.600.000	157.600.000	77.600.000	77.600.000
Aset pajak tangguhan	2n,23	444.018.598	541.086.023	511.882.505	247.647.759
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.258.452.087</u>	<u>2.189.795.736</u>	<u>2.318.097.694</u>	<u>1.755.333.722</u>
JUMLAH ASET		<u>13.523.061.349</u>	<u>16.126.817.162</u>	<u>13.255.659.515</u>	<u>8.081.850.974</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha - pihak ketiga	2k,2r,11	208.138.569	5.715.942.358	4.475.602.243	2.404.280.254
Utang lain-lain		-	-	-	-
Pihak berelasi	2e,2r,12	-	321.199.000	-	12.099.644.618
Pihak ketiga	2r,12	-	701.593.330	697.758.330	667.798.330
Biaya yang masih harus dibayar	13	197.610.055	155.321.951	654.614.653	-
Utang pajak	2n,23	672.200.093	1.467.873.894	619.389.452	627.430.589
Sewa pembiayaan jatuh tempo kurang dari satu tahun	2l,2r,14	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.155.997.597</u>	<u>8.453.717.205</u>	<u>6.486.879.721</u>	<u>15.835.715.321</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Sewa pembiayaan jatuh tempo lebih dari satu tahun	2l,14	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000
Liabilitas imbalan kerja	2m,15	1.554.211.272	1.942.480.970	2.047.530.021	990.591.037
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>1.554.211.272</u>	<u>1.957.516.970</u>	<u>2.066.301.932</u>	<u>1.058.946.037</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>2.710.208.869</u>	<u>10.411.234.175</u>	<u>8.553.181.653</u>	<u>16.894.661.358</u>
EKUITAS					
Modal dasar :					
31 Maret 2018 sebesar 700.000.000					
saham tahun 2017 dan 2016 masing-masing					
sebesar 480.000 saham					
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing					
sebesar 15.000 saham					
Nilai nominal Rp.100.000 per saham					
Modal ditempatkan dan disetor :					
31 Maret 2018 sebesar 175.000.000 saham					
Tahun 2017 dan 2016 masing-masing					
sebesar 126.000 saham					
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing					
sebesar 6.000 saham					
Tambahan modal disetor	2q,17	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-
Komponen penghasilan komprehensif lain	2m	259.241.052	218.979.811	(393.499.901)	(219.692.033)
Saldo laba (defisit)		(7.038.516.715)	(7.187.362.341)	(7.640.085.615)	(9.106.712.247)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		10.810.724.337	5.721.617.470	4.656.414.484	(8.726.404.280)
Kepentingan nonpengendali	2c,18	2.128.143	(6.034.483)	46.063.378	(86.406.104)
JUMLAH EKUITAS		<u>10.812.852.480</u>	<u>5.715.582.987</u>	<u>4.702.477.862</u>	<u>(8.812.810.384)</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>13.523.061.349</u>	<u>16.126.817.162</u>	<u>13.255.659.515</u>	<u>8.081.850.974</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Maret		31 Desember		
		2018 (3 Bulan)	2017 (3 Bulan)	2017 (1 Tahun)	2016 (1 Tahun)	2015 (1 Tahun)
PENDAPATAN	2o,19	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
BIAYA LANGSUNG	2o,20	(3.470.680.473)	(3.814.975.144)	(17.002.508.196)	(23.075.169.345)	(18.381.239.466)
LABA BRUTO		3.339.013.843	2.638.989.554	10.871.179.094	9.625.045.542	5.527.213.160
BEBAN USAHA						
Beban usaha	2o,21	(2.820.917.297)	(2.481.403.360)	(9.928.065.951)	(7.647.044.780)	(5.968.153.297)
LABA (RUGI) USAHA		518.096.546	157.586.194	943.113.143	1.978.000.762	(440.940.137)
Pendapatan (beban) lain-lain	2o,22	(3.152.739)	(11.129.399)	(173.640.273)	(31.572.668)	(35.112.450)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		514.943.807	146.456.795	769.472.870	1.946.428.094	(476.052.587)
PAJAK PENGHASILAN	2n,23					
Pajak kini		(271.324.258)	(100.375.560)	(488.077.185)	(670.689.923)	(54.719.904)
Pajak tangguhan		(83.637.833)	46.373.580	235.129.748	205.713.578	117.113.097
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		(354.962.091)	(54.001.980)	(252.947.437)	(464.976.345)	62.393.193
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN		159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2m,15					
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti		53.718.369	511.672.242	823.704.923	(234.084.671)	(295.881.525)
Manfaat pajak penghasilan terkait		(13.429.592)	(127.918.061)	(205.926.231)	58.521.168	73.970.381
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		40.288.777	383.754.181	617.778.692	(175.563.503)	(221.911.144)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		160.003.690	92.784.758	518.927.827	1.466.626.632	(409.522.800)
Kepentingan nonpengendali		(21.974)	(329.943)	(2.402.394)	14.825.117	(4.136.594)
Jumlah		159.981.716	92.454.815	516.525.433	1.481.451.749	(413.659.394)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		200.289.143	476.538.907	1.136.707.225	1.292.818.764	(629.214.833)
Kepentingan nonpengendali		(18.650)	(329.911)	(2.403.100)	13.069.482	(6.355.705)
Jumlah		200.270.493	476.208.996	1.134.304.125	1.305.888.246	(635.570.538)
LABA (RUGI) PER SAHAM - DASAR	2p,24	0,94	0,74	4,12	26,19	(68,25)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
	Modal saham	Komponen ekuitas lainnya	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba (Defisit)			
Saldo 1 Januari 2015	600.000.000	-	-	(8.697.189.447)	(8.097.189.447)	(80.050.399)	(8.177.239.846)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(219.692.033)	(409.522.800)	(629.214.833)	(6.355.705)	(635.570.538)
Saldo per 31 Desember 2015	600.000.000	-	(219.692.033)	(9.106.712.247)	(8.726.404.280)	(86.406.104)	(8.812.810.384)
Tambahan Modal disetor	16	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	119.400.000	12.119.400.000
Tambahan modal disetor lainnya	17	-	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(173.807.868)	1.466.626.632	1.292.818.764	13.069.482	1.305.888.246
Saldo per 31 Desember 2016	12.600.000.000	90.000.000	(393.499.901)	(7.640.085.615)	4.656.414.484	46.063.378	4.702.477.862
Pengaruh perubahan kepemilikan non pengendali atas entitas anak	-	-	(5.299.686)	(66.204.553)	(71.504.239)	(49.694.761)	(121.199.000)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	617.779.398	518.927.827	1.136.707.225	(2.403.100)	1.134.304.125
Saldo per 31 Desember 2017	12.600.000.000	90.000.000	218.979.811	(7.187.362.341)	5.721.617.470	(6.034.483)	5.715.582.987
Tambahan modal disetor	16	4.900.000.000	-	-	4.900.000.000	-	4.900.000.000
Pengaruh perubahan kepemilikan non pengendali atas entitas anak	-	-	(24.212)	(11.158.064)	(11.182.276)	8.181.276	(3.001.000)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	-	-	40.285.453	160.003.690	200.289.143	(18.650)	200.270.493
Saldo per 31 Maret 2018	<u>17.500.000.000</u>	<u>90.000.000</u>	<u>259.241.052</u>	<u>(7.038.516.715)</u>	<u>10.810.724.337</u>	<u>2.128.143</u>	<u>10.812.852.480</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	31 Maret		31 Desember			
	2018 (3 Bulan)	2017 (3 Bulan)	2017 (1 Tahun)	2016 (1 Tahun)	2015 (1 Tahun)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	5,19	8.043.153.759	6.994.100.648	25.129.127.256	33.252.854.971	22.600.629.477
Pembayaran kas kepada pemasok	7,11,20	(10.573.845.981)	(4.289.167.449)	(9.444.346.350)	(15.399.185.059)	(12.497.247.350)
Pembayaran karyawan	20,21	(3.161.127.270)	(3.000.668.105)	(12.089.230.664)	(7.989.361.095)	(7.776.983.813)
Penerimaan lainnya	22,23	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Pembayaran lainnya	22,23	(1.303.267.169)	(1.262.343.426)	(4.465.003.697)	(2.817.596.977)	(3.686.050.495)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(6.994.255.166)	(1.557.681.641)	(868.637.429)	7.066.250.984	(1.359.652.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	9	(367.173.889)	(281.305.014)	(561.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
Perolehan aset lainnya	10	(10.000.000)	(100.000.000)	(80.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(377.173.889)	(381.305.014)	(641.066.538)	(938.825.731)	(643.667.236)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Setoran modal saham	16	-	-	-	12.119.400.000	119.400.000
Tambahan modal disetor	17	4.900.000.000	-	-	90.000.000	-
Penerimaan utang lain-lain	6	-	521.199.000	325.034.000	29.960.000	2.457.617.900
Pembayaran utang lain-lain	6	(1.022.792.330)	(565.000)	-	(12.099.644.618)	(171.715.000)
Penerimaan piutang lain-lain	12	5.128.950.000	1.460.000	52.610.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	12	-	(700.000.000)	(700.000.000)	(4.491.960.000)	(600.000)
Pembayaran leasing	14	(26.582.998)	(34.070.085)	(113.274.654)	(99.796.020)	(73.932.973)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		8.979.574.672	(211.976.085)	(435.630.654)	(4.452.040.638)	2.330.769.927
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK		1.608.145.617	(2.150.962.740)	(1.945.334.621)	1.675.384.615	327.450.510
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN		813.930.398	2.759.265.019	2.759.265.019	1.083.880.404	756.429.894
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN		2.422.076.015	608.302.279	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Arkadia Digital Media Tbk (dahulu PT Bukit Irama) ("**Perusahaan**") didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 6 Maret 2012 dari notaris Arianly Triutomo, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 2 tanggal 8 Februari 2018 dari notaris Oscar Fredyan Iqbalutama, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di kota Cirebon dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0019749.AH.01.11 Tahun 2018, tanggal 10 Februari 2018. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut antara lain berkaitan dengan; a) perubahan nama Perusahaan dari PT Bukit Irama menjadi PT Arkadia Digital Media, b) perubahan kedudukan Perusahaan yang semula di kota Jakarta Selatan menjadi di kota Jakarta Pusat, c) penambahan bidang usaha Perusahaan, d) penjualan sebagian saham Perusahaan, e) penurunan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000 menjadi Rp 100, f) peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 48.000.000.000 menjadi Rp 70.000.000.000 dan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 12.600.000.000 menjadi Rp 17.500.000.000, g) menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Perseroan saat ini dikendalikan oleh Stephen K. Sulisty, selaku pemegang saham dari Perseroan. Perseroan tidak memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum. Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Perusahaan dan Entitas Anak dalam menjalankan usahanya, memiliki izin-izin sebagai berikut:

- Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten.
Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Arkadia Media Nusantara (AMN) No. 207 Tahun 2014 tanggal 5 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Izin ini diberikan sebagai izin prinsip penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan/atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Izin prinsip ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak izin ini ditetapkan.
- Penetapan Kode Akses Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas.
Penetapan Kode Akses Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas No: 1151/kominfo/DJPPI/PI.02.03/8/2014 tanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penetapan Kode Akses 99156 dan 99155 diberikan kepada AMN untuk penyelenggaraan jasa penyediaan konten. AMN diwajibkan untuk melaporkan penggunaan Kode Akses 99156 dan 99155 setiap 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya kode akses tersebut.

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten.
Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten AMN No. 289 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Izin ini diberikan sebagai izin prinsip penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan/atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat Gedung Sahid Sudirman Center, Lt. 19, Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya secara komersial sejak tahun 2017.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Sesuai dengan akta notaris No. 2 tanggal 8 Februari 2018 dari Oscar Fredyan Iqbalutama, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Cirebon, susunan pengurus pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K Sulisty
Komisaris : Iwa Sukresno Karunia

Dewan Direksi

Direktur Utama : Wiliam Martaputra
Direktur : Suwarjono

Sesuai dengan akta notaris No. 13 tanggal 15 Juli 2016 dari Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur, susunan pengurus pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Stephen K Sulisty

Direktur : Iwa Sukresno Karunia

Sesuai dengan akta notaris No. 5 tanggal 6 Maret 2012 dari Arianly Triutomo, S.H., notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, susunan pengurus pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Welly Yusuf

Direktur : Iwa Sukresno Karunia

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Jumlah karyawan tetap tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 48, 51, 47 dan 28 (tidak diaudit).

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan mempunyai Entitas Anak yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa portal web dan penyedia konten dalam bidang media. Adapun nama Entitas Anak, lokasi usaha, persentase kepemilikan saham dan jumlah aset per tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Mulai operasi	Tempat kedudukan	Jenis usaha	kepemilikan (%)			Total Aset (Disajikan dalam jutaan Rupiah)			
				31 Maret 2018	31 Desember 2017	2015-2016	31 Maret 2018	31 Desember 2017	2016	2015
PT Arkadia Media Nusantara	2010	Jakarta	Penyediaan jasa portal web dan penyedia konten dalam bidang media	99,99	99,99	99,00	11.897	15.988	12.876	7.577
PT. Mata Media Nusantara	Belum operasi	Jakarta	Jasa multimedia	99,97	99,00	99,00	1.889	114	354	497
PT. Integra Archipelago Media	Belum operasi	Jakarta	Jasa multimedia	99,90	-	-	973	-	-	-

PT Arkadia Media Nusantara

PT. Arkadia Media Nusantara (AMN) didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 10 November 2010 dari notaris Mirawati S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-55465.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010 tentang pengesahan Badan Hukum Perusahaan. Akta AMN telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 04 tanggal 21 Februari 2018 dari notaris Oscar Fredyan Iqbal Utama, SH., M.Kn., tentang perubahan anggaran dasar. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0079305. Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang perubahan anggaran dasar.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar AMN, maksud dan tujuan AMN ini adalah menjalankan usaha jasa portal web. Pada saat ini kegiatan AMN adalah bidang penyediaan jasa portal web.

AMN berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. AMN telah beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

PT Mata Media Nusantara

PT Mata Media Nusantara (MMN) didirikan berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 November 2013 dibuat oleh Franciska Susi Setiawati, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-58284.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 tentang pengesahan Badan Hukum Perusahaan. MMN mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 1 tanggal 27 Maret 2018 dari Oscar Fredyan Iqbalutama, S.H., M.kn., notaris yang berkedudukan di Cirebon, tentang persetujuan peningkatan modal dasar dan modal disetorkan. Akta ini telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0044720.AH.01.11. tanggal 29 Maret 2018.

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar MMN, maksud dan tujuan MMN ini adalah menjalankan usaha dibidang perdagangan, jasa multimedia. MMN diperkirakan akan beroperasi secara komersial selambat-lambatnya bulan September tahun 2018.

MMN berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 19 JL. Jend. Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

PT Integra Archipelago Media

PT Integra Archipelago Media (IAM) didirikan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 23 Oktober 2013 dari Francisca Susi Setiawati, S.H., notaris berkedudukan di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61327.AH.01.01 tanggal 26 November 2013 tentang pengesahan badan hukum Perusahaan. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 02 tanggal 27 Maret 2018 dari Oscar Fredyan Iqbal Utama, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Cirebon, mengenai perubahan anggaran dasar IAM. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0129255 tanggal 29 Maret 2018 tentang perihal pemberitahuan perubahan data IAM.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan IAM adalah berusaha dalam bidang jasa multimedia.

IAM berkedudukan dan berdomisili di The Bellezza Shopping Arcade Lt. 2 Unit.08 Jl. Letjend Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Kebayoran Lama Jakarta Selatan. IAM diperkirakan akan beroperasi secara komersial selambat-lambatnya akhir tahun 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain. Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto*. Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

c. Prinsip konsolidasian

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perusahaan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Perusahaan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif.

Prinsip konsolidasian

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", definisi Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- i Kekuasaan atas Entitas Anak;
- ii Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- iii Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika hak suara Entitas atas investee kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari investee. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak, suara Entitas atas investee cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a. Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya;
- b. Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya;
- c. Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya; dan
- d. Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada, saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

d. Transaksi dan saldo mata uang asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	Rp 13.276,-	Rp 13.548,-	Rp. 13.436,-	Rp 13.795,-

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

- (i) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (b) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (ii) Suatu pihak adalah perusahaan asosiasi Perusahaan;
- (iii) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;
- (iv) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;
- (v) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
- (vi) Suatu pihak adalah Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa perusahaan, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau
- (vii) Suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Kas dan bank

Berdasarkan arus kas terdiri dari kas dan bank yang mana tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat ekonomi masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Komputer	4	25%
Peralatan dan perlengkapan	4	25%
Kendaraan	4	25%

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masa pembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

k. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dalam kegiatan usaha dari pemasok.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Sewa

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Perusahaan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika terdapat kepastian memadai bahwa Perusahaan akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif secara garis lurus selama masa sewa.

m. Imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

n. Pajak penghasilan

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan ditinjau kembali pada setiap

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari jasa diakui saat penyerahan jasa kepada pelanggan, sedangkan beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

p. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

q. Aset dan liabilitas pengampunan pajak

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

Pilihan akuntansi alternatif adalah :

- Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK No. 70; atau
- Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional).

Pada awalnya entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor (APIC). Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

Entitas mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendekatan umum

Pengakuan dan pengukuran

Entitas mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajian mengikuti masing-masing SAK terkait yang relevan.

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraf 41-53 dari PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" harus diterapkan.

Pengakuan

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan pada aset dan liabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum. Pendekatan ini memberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 10-23 pada PSAK No. 70.

Pengukuran awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlah yang dilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (*deemed cost*).

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengukuran kembali setelah pengakuan awal

Entitas dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP). Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal SKPP dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas *investee* sesuai dengan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan konsolidasian", entitas disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal SKPP, selama periode pengukuran kembali yaitu dimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejak dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan, entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

Dalam hal *investee* bukan merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" pada tanggal SKPP.

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Jika *investee* merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" pada tanggal SKPP.

Penghentian pengakuan

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset dan liabilitas lain) dalam laporan posisi keuangan.

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka entitas menyajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Jika Entitas menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupun pengukuran kembali *mandatory*, maka entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa. Entitas menyajikan kembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus Antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara prospektif dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

Entitas telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak dan menyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas *investee*, kombinasi bisnis ataupun kombinasi bisnis entitas sepengendali yang timbul dari pengampunan pajak.

r. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang yang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Perusahaan tidak berniat untuk menjual segera atau dalam waktu dekat.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan

Perusahaan pada awalnya mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontraktual instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim diakui pada tanggal perdagangan dimana Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif setelah pengakuan awal) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

Piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang" yang diukur pada biaya Perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika :

- a). Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b). Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau.
- c). Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

Saling hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini, dan perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi :

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

s. Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

t. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam keuangan.

u. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

2018

- Amandemen PSAK 2, "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan", berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Amandemen PSAK 13 – Properti Investasi: Pengalihan Properti Investasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan aset mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi.

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per- investasi.

- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi", berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa Persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP10-PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK 58.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73 : Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- ISAK 33 – Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2, pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan signifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

- Nilai wajar asset
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai tercatat atas aset tetap per 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah diungkapkan dalam catatan 9.

- Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yang diharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersial dan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

- Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

- Imbalan kerja jangka panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Kas	59.669.048	99.684.233	98.604.600	14.459.720
Bank				
PT Bank Central Asia Tbk	2.357.582.478	709.078.676	2.650.434.657	1.067.107.044
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.192.078	2.442.078	10.225.762	2.313.640
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.632.411	2.725.411	-	-
Jumlah	2.362.406.967	714.246.165	2.660.660.419	1.069.420.684
Jumlah	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404

Suku bunga jasa giro per tahun yang berlaku selama periode berjalan adalah berkisar 0,25%-0,5%. Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

5. PIUTANG USAHA-PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha-pihak ketiga berdasarkan pelanggan antara lain :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Pihak ketiga				
PT Anugrah Sentosa Utama	2.834.150.000	2.880.000.000	-	-
PT Indosat	965.230.725	1.253.646.579	1.556.728.223	2.904.838.437
PT XL Axiata	229.913.959	243.359.924	10.835.492	71.668.229
PT Anugerah Bumina Bunda	212.850.000	212.850.000	212.850.000	213.850.000
PT Cipta Karya Sukses Bersama	121.000.000	-	110.000.000	-
CV Gemintang	57.500.000	72.000.000	-	22.000.000
CV Kejora Komunika	38.940.000	16.940.000	-	-
CV Sulaya Media	30.000.000	30.000.000	26.033.334	-
PT Ambient Digital Indonesia	22.241.317	78.060.236	63.195.182	-
PT Freak Out Dewina Indonesia	16.482.550	7.651.820	21.044.760	-
PT Big Mobile	3.593.439	3.593.439	10.044.650	-
PT Pratama Prima Cipta	-	990.000.000	-	-
PT Ibo Makmur Agung	-	49.500.000	-	-
PT Epic Visi Internasional	-	-	250.024.500	-
PT Swara Gansing	-	-	185.625.000	-
PT Sumber Karya Imajinasi	-	-	135.000.000	-
PT Daffa Auratama	-	-	100.000.000	-
PT Revalino Agung Pratama	-	-	78.000.000	-
PT Portal Bursa Digital	-	-	37.499.072	-
PT ADPLUS Digital Solusindo	-	-	28.052.229	88.530.147
US Mobile New World Limited	-	-	20.271.403	-
Flipit.Com	-	-	20.000.000	-
PT Anak Muda Indonesia	-	-	5.500.000	126.500.000
PT Vidha Inti Prajapti	-	-	-	2.500.000
Lain-lain dibawah Rp 20 juta	106.403.684	60.663.119	61.138.119	54.595.235
Jumlah	4.638.305.674	5.898.265.117	2.931.841.964	3.484.482.048
Cadangan penurunan nilai piutang	(221.863.119)	(221.863.119)	-	-
Jumlah Piutang-bersih	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang antara lain :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	2.913.284.601	3.086.620.162	2.007.915.192	1.707.949.246
Jatuh tempo:				
1-30 hari	1.304.219.460	1.474.952.708	97.344.267	940.810.153
31-60 hari	41.504.097	1.035.121.941	240.036.386	585.779.076
31-90 hari	157.434.397	6.259.759	364.683.000	180.253.932
> 91 hari	221.863.119	295.310.547	221.863.119	69.689.641
Jumlah	4.638.305.674	5.898.265.117	2.931.841.964	3.484.482.048
Dikurangi penurunan nilai piutang	(221.863.119)	(221.863.119)	-	-
	<u>4.416.442.555</u>	<u>5.676.401.998</u>	<u>2.931.841.964</u>	<u>3.484.482.048</u>

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Saldo awal	221.863.119	-	-	-
Mutasi tahun berjalan :				
Penambahan cadangan	-	221.863.119	-	-
Pemulihan cadangan	-	-	-	-
Saldo akhir	<u>221.863.119</u>	<u>221.863.119</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Manajemen berpendapat bahwa nilai cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk dapat menutupi segala kemungkinan kerugian atas nilai piutang usaha yang belum tertagih.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain terdiri dari :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
<u>Pihak berelasi</u>				
Wiliam Martaputra	-	5.021.200.000	4.321.200.000	-
<u>Pihak ketiga</u>				
Karyawan	11.000.000	118.750.000	171.360.000	600.000

Piutang lain-lain pihak berelasi merupakan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi tanpa dikenakan bunga, memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan tidak terdapat pembatasan untuk pemberian pinjaman tersebut. Pada bulan Januari 2018 dan Februari 2018, seluruh piutang lain-lain kepada pihak berelasi tersebut telah dilunasi.

Piutang lain-lain pihak ketiga (karyawan) merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan dengan mekanisme pengembalian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dengan cara pengembalian sekaligus atau pemotongan gaji.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian biaya dibayar dimuka terdiri dari :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Sewa	3.921.728.396	2.074.074.078	673.869.061	1.022.630.434
Asuransi	83.666.368	113.376.386	6.857.947	209.549.016
Lain-lain	-	-	-	2.750.000
Jumlah	4.005.394.764	2.187.450.464	680.727.008	1.234.929.450

Biaya sewa dibayar dimuka merupakan biaya sewa kantor yang dibayar oleh PT Arkadia Media Nusantara (Entitas Anak) kepada Fuad Faisal untuk periode sampai dengan 30 April 2021 dan PT Mata Media Nusantara (Entitas Anak) Kepada Sri Hartanto untuk periode sampai dengan 12 Februari 2020.

8. UANG MUKA

Rincian uang muka terdiri dari :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Uang muka perjalanan dinas	152.230.141	59.091.500	46.863.000	-
Uang muka pembelian aset	-	-	-	522.625.350
Uang muka lainnya	84.962.294	60.197.066	26.304.830	-
Jumlah	237.192.435	119.288.566	73.167.830	522.625.350

Uang muka perjalanan dinas merupakan biaya reportase dalam kota dan luar kota dalam rangka peliputan peristiwa dan berita.

Uang muka lainnya terutama pembayaran ke kantor berita ANTARA untuk memperoleh akses berita.

9. ASET TETAP-BERSIH

	31 Maret 2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung					
Komputer	1.612.944.281	95.160.900	-	-	1.708.105.181
Peralatan dan perlengkapan	1.375.277.446	272.012.989	-	-	1.647.290.435
Kendaraan	222.950.000	-	-	-	222.950.000
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	381.800.000	-	-	-	381.800.000
Jumlah	3.592.971.727	367.173.889	-	-	3.960.145.616
Akumulasi penyusutan:					
Kepemilikan langsung					
Komputer	873.294.214	97.198.618	-	-	970.492.832
Peralatan dan perlengkapan	849.739.682	76.454.622	-	-	926.194.304
Kendaraan	209.015.625	13.934.375	-	-	222.950.000
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	169.812.493	23.862.498	-	-	193.674.991
Jumlah	2.101.862.014	211.450.113	-	-	2.313.312.127
Nilai buku	1.491.109.713				1.646.833.489

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2017				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung					
Komputer	1.437.937.281	175.007.000	-	-	1.612.944.281
Peralatan dan perlengkapan	1.291.842.296	334.034.273	250.599.123	-	1.375.277.446
Kendaraan	-	-	-	222.950.000	222.950.000
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	402.550.000	202.200.000	-	(222.950.000)	381.800.000
Jumlah	3.132.329.577	711.241.273	250.599.123	-	3.592.971.727
Akumulasi penyusutan:					
Kepemilikan langsung					
Komputer	481.813.133	391.481.081	-	-	873.294.214
Peralatan dan perlengkapan	690.048.133	260.115.937	100.424.388	-	849.739.682
Kendaraan	-	-	-	209.015.625	209.015.625
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	231.853.122	146.974.996	-	(209.015.625)	169.812.493
Jumlah	1.403.714.388	798.572.014	100.424.388	-	2.101.862.014
Nilai buku	<u>1.728.615.189</u>				<u>1.491.109.713</u>

	31 Desember 2016				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung					
Komputer	703.331.251	734.606.031	-	-	1.437.937.282
Peralatan dan perlengkapan	1.087.622.601	204.219.700	-	-	1.291.842.301
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	402.550.000	-	-	-	402.550.000
Jumlah	2.193.503.852	938.825.731	-	-	3.132.329.583
Akumulasi penyusutan:					
Kepemilikan langsung					
Komputer	215.826.485	265.986.647	-	-	481.813.132
Peralatan dan perlengkapan	416.375.779	273.672.362	-	-	690.048.141
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	131.215.625	100.637.496	-	-	231.853.121
Jumlah	763.417.889	640.296.505	-	-	1.403.714.394
Nilai buku	<u>1.430.085.963</u>				<u>1.728.615.189</u>

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2015				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya perolehan :					
Kepemilikan langsung					
Komputer	438.542.291	264.788.959	-	-	703.331.250
Peralatan dan perlengkapan	888.344.319	199.278.277	-	-	1.087.622.596
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	222.950.000	179.600.000	-	-	402.550.000
Jumlah	1.549.836.610	643.667.236	-	-	2.193.503.846
Akumulasi penyusutan:					
Kepemilikan langsung					
Komputer	69.263.796	146.562.686	-	-	215.826.482
Peralatan dan perlengkapan	175.808.995	240.566.780	-	-	416.375.775
Sewa Pembiayaan					
Kendaraan	41.803.126	89.412.500	-	-	131.215.626
Jumlah	286.875.917	476.541.966	-	-	763.417.883
Nilai buku	1.262.960.693				1.430.085.963

Beban penyusutan dicatat pada beban usaha dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Beban umum dan administrasi	211.450.113	798.572.014	640.296.505	476.541.966

Pada tanggal 31 Maret 2018 aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada PT. Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi Cigna dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 381.300.000 dan Rp 156.065.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Pengurangan peralatan dan perlengkapan pada tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp 250.599.123 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 100.424.388 merupakan penghapusan aset berupa perlengkapan dan peralatan yang tidak dapat dimanfaatkan ketika perusahaan pindah kantor. Kerugian akibat penghapusan aset tersebut sebesar Rp 150.174.735 telah dicatat pada Pendapatan (biaya) lain-lain sebagai "Rugi pelepasan aset" (Catatan 22).

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan uang muka (deposit) kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Deposit sewa	110.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000
Deposit penyedia konten	57.600.000	57.600.000	57.600.000	57.600.000
Jumlah	167.600.000	157.600.000	77.600.000	77.600.000

Deposit sewa merupakan uang jaminan sehubungan dengan sewa kantor oleh PT Arkadia Media Nusantara dan PT Mata Media Nusantara.

Deposit penyedia konten merupakan uang jaminan sehubungan dengan penyediaan konten kepada kantor berita Reuters.

11. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
PT Indosis Intergrasi	108.000.000	432.000.000	-	100.000.000
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	48.924.000	17.820.000	21.450.000	-
CV Graha Mas	22.928.169	137.307.585	-	-
PT Prime Link Communication	17.820.000	17.820.000	-	-
PT Aplikanusa Lintasarta	8.646.000	-	-	-
PT Supra Primatama Nusantara	1.820.400	1.518.000	-	-
PT Berkah Alam Indonesia	-	3.800.000.000	3.800.000.000	-
Buzzcity	-	409.849.849	-	-
PT Anugrah Sindo Perdana	-	337.500.000	-	-
MSISDN dnn	-	304.558.320	-	-
PT Redtree Indonesia	-	246.768.604	183.868.604	1.510.925.968
PT Mobilink Komunika Media	-	10.800.000	-	-
PT Internetindo Data Centra	-	-	9.504.000	3.000.000
PT Sumisho E-Commerce Indonesia	-	-	1.693.900	-
PT The Net/Millennium Internindo	-	-	19.636.364	20.000.000
Perusahaan Facebook Indonesia	-	-	439.449.375	697.229.286
Agus Sudarma / Advertise Co Id	-	-	-	73.125.000
Jumlah	208.138.569	5.715.942.358	4.475.602.243	2.404.280.254

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
<u>Pihak berelasi :</u>				
Iwa Sukresno Karunia	-	-	-	11.885.458.835
Wiliam Martaputra	-	221.199.000	-	-
Aldrian Suwardi Chandra	-	100.000.000	-	214.185.783
Jumlah	-	321.199.000	-	12.099.644.618
<u>Pihak ketiga :</u>				
Heru Setiawan	-	697.193.330	697.193.330	667.313.330
Fadka Agency	-	-	565.000	485.000
Lain-lain	-	4.400.000	-	-
Jumlah	-	701.593.330	697.758.330	667.798.330
Jumlah	-	1.022.792.330	697.758.330	12.767.442.948

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tanpa dikenakan bunga, memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan tidak terdapat pembatasan penerimaan utang tersebut

13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian biaya yang masih harus dibayar terdiri dari :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Biaya konsultan teknologi	81.382.121	64.138.523	75.817.263	-
Jamsostek	69.183.743	37.146.346	27.552.720	-
Biaya jasa profesional	32.296.388	18.437.500	-	-
Biaya gaji	14.747.803	35.599.582	-	-
Biaya promosi	-	-	550.621.475	-
Lain-lain	-	-	623.195	-
Jumlah	197.610.055	155.321.951	654.614.653	-

14. SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan dan entitas anak melakukan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services, dengan jangka waktu tiga (3) tahun dengan tingkat bunga 5,19% sampai dengan 10,00% per tahun.

Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease payments*) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
PT. Toyota Astra Financial Service	78.048.880	106.822.672	58.286.954	104.916.530
	78.048.880	106.822.672	58.286.954	104.916.530
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Bagian jangka panjang	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran sewa minimum masa mendatang dalam perjanjian sewa pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Utang pembiayaan	82.384.576	113.833.744	62.619.945	121.126.916
Bagian Bunga	4.335.696	7.011.072	4.332.991	16.210.386
Neto	78.048.880	106.822.672	58.286.954	104.916.530
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	78.048.880	91.786.672	39.515.043	36.561.530
Bagian jangka panjang	-	15.036.000	18.771.911	68.355.000

Pembatasan – pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah Perusahaan tidak diperkenankan untuk menyewakan, menyewagunakannya, menjaminkan, memindahtangankan, menjual atau mengalihkan kendaraan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun dan dengan cara apapun selama Masa Sewa Pembiayaan belum selesai.

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah karyawan	48	51	47	28

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui laporan laba rugi komprehensif adalah :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Biaya jasa kini	113.289.765	545.434.832	732.314.290	449.899.300
Biaya bunga	35.158.906	173.221.040	90.540.021	18.553.085
Biaya jasa lalu	-	-	-	-
Jumlah	148.448.671	718.655.872	822.854.311	468.452.385

Pengukuran kembali liabilitas dan aset imbalan pasti keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Perubahan asumsi aktuarial	(24.016.674)	(325.154.797)	129.728.429	361.449.077
Penyesuaian	(29.701.695)	(498.550.126)	104.356.242	(65.567.552)
Jumlah	(53.718.369)	(823.704.923)	234.084.671	295.881.525

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mutasi cadangan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Saldo awal	(1.942.480.970)	(2.047.530.021)	(990.591.037)	(226.257.127)
Beban manfaat karyawan	(148.448.671)	(718.655.872)	(822.854.313)	(468.452.385)
Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	53.718.369	823.704.923	(234.084.671)	(295.881.525)
Pembayaran manfaat	483.000.000	-	-	-
Jumlah	<u>(1.554.211.272)</u>	<u>(1.942.480.970)</u>	<u>(2.047.530.021)</u>	<u>(990.591.037)</u>

Nilai sekarang liabilitas masa lalu dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember	
		2017	2016, 2015 dan 2014
Aktuaris	PT Binaputra Jaga Hikmah	PT Binaputra Jaga Hikmah	PT Adi Langgeng Rahayu
Tanggal laporan aktuaris	09 Mei 2018	29 Januari 2018	15 November 2017
Nomor laporan aktuaris	349/PSAK-BJH/I-2018	078/PSAK-BJH/I-2018	145/IPK/ALR/XI/2017

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Tingkat diskonto	7,39%	8,46%	9,14%	9,14%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	7%	7%	10%	10%
Tingkat kematian	100% /TMI 3	100% /TMI 3	100% /TMI 3	100% /TMI 3
Tingkat cacat/sakit berkepanjangan	5% TMI 3	5% TMI 3	5% TMI 3	5% TMI 3
Tingkat pengunduran diri	1% p.a	1% p.a	1% p.a	1% p.a
Normal tingkat pensiun	55	55	55	55

16. MODAL SAHAM

- Sesuai dengan akta notaris No. 02 tanggal 8 Februari 2018 dari Oscar Fredyan Iqbalutama, S.H., notaris di Kota Cirebon dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0019749.AH.01.11 Tahun 2018, tanggal 10 Februari 2018, para pemegang saham menyatakan sebagai berikut :
 - a) Penjualan sebagian saham :
 - Aldrian Suwardi Chandra menjual 6.300 saham kepada Wiliam Martaputra.
 - Steven menjual 6.300 saham kepada Wiliam Martaputra.
 - b) Perubahan nilai nominal saham dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 100 (seratus rupiah).
 - c) Penambahan modal disetor dari 126.000.000 saham menjadi 175.000.000 saham yang diambil bagian masing-masing oleh :
 - Stephen K. Sulistyono sebesar 15.925.000 saham,
 - Iwa Sukresno Karunia sebesar 15.925.000 saham,
 - Wiliam Martaputra sebesar 7.350.000 saham,
 - Suwarjono sebesar 4.900.000 saham,
 - Aldrian Suwardi Chandra sebesar 2.450.000 saham, dan

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Steven sebesar 2.450.000 saham.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor Rp
Stephen K. Sulistyono	56.875.000	32,50	5.687.500.000
Iwa Sukresno Karunia	56.875.000	32,50	5.687.500.000
Wiliam Martaputra	26.250.000	15,00	2.625.000.000
Suwarjono	17.500.000	10,00	1.750.000.000
Aldrian Suwardi Chandra	8.750.000	5,00	875.000.000
Steven	8.750.000	5,00	875.000.000
Jumlah	175.000.000	100,00	17.500.000.000

- Sesuai dengan akta notaris No. 30 tanggal 29 Maret 2017 dari Amastasia Dau, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0126616 Tahun 2017, tanggal 12 April 2017 para pemegang saham menyatakan sebagai berikut :
 - a) Stephen K Sulistyono menjual 43.050 (empat puluh tiga ribu lima puluh) saham dalam Perusahaan atau 34,17% kepada :
 - Pihak Aldrian Suwardi Chandra sebesar 12.600 (dua belas ribu enam ratus) saham atau Rp 1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) atau sebesar 10%.
 - Pihak Steven sebesar 12.600 (dua belas ribu enam ratus) saham atau Rp 1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) atau sebesar 10%.
 - Pihak Suwarjono sebesar 12.600 (dua belas ribu enam ratus) saham atau Rp 1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) atau sebesar 10%.
 - Pihak Wiliam Martaputra sebesar 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) saham atau Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 4,17%.
 - b) Iwa Sukresno Karunia menjual 1.050 (seribu lima puluh) saham atau Rp.105.000.000 atau sebesar 0,83% kepada Wiliam Martaputra.

Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor Rp
Stephen K. Sulistyono	40.950	32,50	4.095.000.000
Iwa Sukresno Karunia	40.950	32,50	4.095.000.000
Aldrian Suwardi Chandra	12.600	10,00	1.260.000.000
Steven	12.600	10,00	1.260.000.000
Suwarjono	12.600	10,00	1.260.000.000
Wiliam Martaputra	6.300	5,00	630.000.000
Jumlah	126.000	100,00	12.600.000.000

- Sesuai dengan akta notaris No. 3 tanggal 6 Desember 2016 dari Amastasia Dau, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0109834 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 para pemegang saham mengambil keputusan menyetujui Aryana Pramana menjual 42.000 (empat puluh dua ribu) saham dalam

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perusahaan yang mewakili 33,33% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada Stephen K. Sulistyو.

Susunan pemegang saham setelah adanya perubahan penambahan modal disetor tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor Rp
Stephen K. Sulistyو	84.000	66,67	8.400.000.000
Iwa Sukresno Karunia	42.000	33,33	4.200.000.000
Jumlah	<u>126.000</u>	<u>100,00</u>	<u>12.600.000.000</u>

- Sesuai dengan akta notaris No. 14 tanggal 20 Juli 2016 dari Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn., notaris yang berkedudukan di Kabupaten Cianjur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0013239.AH.01.02 Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016, para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut :
 - a) Persetujuan peningkatan modal dasar yang semula 15.000 (lima belas ribu) saham menjadi 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham .
 - b) Persetujuan peningkatan modal disetor yang semula 6.000 (enam ribu) saham menjadi 12.600 (dua belas ribu enam ratus) saham.

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor Rp
Stephen K. Sulistyو	42.000	33,33	4.200.000.000
Iwa Sukresno Karunia	42.000	33,33	4.200.000.000
Aryana Pramana	42.000	33,33	4.200.000.000
Jumlah	<u>126.000</u>	<u>100,00</u>	<u>12.600.000.000</u>

- Sesuai dengan akta notaris No. 5 tanggal 6 Maret 2012 dari Arianly Triutomo, S.H., notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-13641.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 14 Maret 2012 disebutkan jumlah modal dasar Perusahaan berjumlah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 15.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 40% atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham.

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor Rp
Iwa Sukresno Karunia	5.400	90,00	540.000.000
Welly Yusuf	600	10,00	60.000.000
Jumlah	<u>6.000</u>	<u>100,00</u>	<u>600.000.000</u>

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Perusahaan dan entitas anak telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Perusahaan dan entitas anak telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP) dengan No. KET-16416/PP/WPJ.30/2016 tertanggal 22 Desember 2016.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Perusahaan dan entitas anak mendeklarasikan aset pengampunan pajak berupa Kas sebesar Rp 90.000.000 dengan uang tebusan (jumlah yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp 2.700.000.

Rincian aset pengampunan pajak entitas adalah sebagai berikut :

	Bentuk Aset	31 Maret 2018	31 Desember	
			2017	2016
PT Arkadia Media Nusantara	Kas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
PT Arkadia Digital Media d/h PT Bukit Irama	Kas	20.000.000	20.000.000	20.000.000
PT Mata Media Nusantara	Kas	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Jumlah		<u>90.000.000</u>	<u>90.000.000</u>	<u>90.000.000</u>

18. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasikan terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
PT Arkadia Media Nusantara	572.083	523	49.695.238	(84.704.132)
PT Mata Media Nusantara	583.676	(6.035.006)	(3.631.860)	(1.701.972)
PT Integra Archipelago Media	972.384	-	-	-
Jumlah	<u>2.128.143</u>	<u>(6.034.483)</u>	<u>46.063.378</u>	<u>(86.406.104)</u>

19. PENDAPATAN

Rincian pendapatan terdiri dari :

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Jasa penyedia konten dan portal web	6.736.694.316	6.453.964.698	27.853.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Jasa <i>design</i>	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Jumlah	<u>6.809.694.316</u>	<u>6.453.964.698</u>	<u>27.873.687.290</u>	<u>32.700.214.887</u>	<u>23.908.452.626</u>

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi dari 10 % dari pendapatan:

Nama pelanggan	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
PT. Indosat Tbk	2.723.791.721	4.840.156.307	16.204.136.366	27.418.740.248	21.175.804.775
PT Anugrah Sentosa Utama	2.550.000.000	-	-	-	-
% terhadap pendapatan	77	75	58	84	89

Rincian pelanggan utama terdiri dari:

Nama pelanggan	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret				Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2018		2017		2017		2016		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PT. Indosat Tbk	2.723.791.721	40,0	4.840.156.307	75,0	16.204.136.366	58,1	27.418.740.248	83,8	21.175.804.775	88,6
PT XL Axiata Tbk	380.893.600	5,6	14.014.399	0,2	256.029.599	0,9	666.770.600	2,0	127.890.888	0,5
PT Anugrah Sentosa Utama	2.550.000.000	37,4	-	-	-	-	-	-	-	-

Pendapatan jasa penyedia konten dan portal web berasal dari penyediaan jasa data transfer, *download ringtones*, logo, kuis, polling, dan lain sebagainya untuk aplikasi mobile dengan bekerjasama dengan provider telekomunikasi, serta pendapatan jasa iklan berbasis website di suara.com.

Pendapatan jasa penyedia konten diperoleh dari PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk.

20. BIAYA LANGSUNG

Rincian biaya langsung terdiri dari :

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Biaya penyedia konten dan portal web	3.425.055.973	3.814.975.144	16.990.008.196	23.075.169.345	18.381.239.466
Biaya <i>design</i>	45.624.500	-	12.500.000	-	-
Jumlah	<u>3.470.680.473</u>	<u>3.814.975.144</u>	<u>17.002.508.196</u>	<u>23.075.169.345</u>	<u>18.381.239.466</u>

Beban portal web terdiri dari biaya iklan di Facebook, Google.com, promo Suara.com, *Shutterstock* dan lain-lain.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha terdiri dari:

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Beban pemasaran					
Perjalanan dinas	34.256.209	-	54.926.776	505.763.116	1.250.000
Kontribusi dan partnership	15.348.688	24.843.490	82.266.719	42.099.000	29.770.503
Jamuan	3.556.400	3.650.000	81.380.894	82.364.142	18.854.439
Sub jumlah	<u>53.161.297</u>	<u>28.493.490</u>	<u>218.574.389</u>	<u>630.226.258</u>	<u>49.874.942</u>
Beban administrasi dan umum					
Gaji karyawan	1.185.217.552	1.260.280.604	5.077.476.879	3.311.393.605	3.188.563.363
Kantor dan perlengkapan	379.730.301	107.715.214	381.736.398	379.440.015	260.083.509
Sewa	377.527.767	243.437.270	1.257.167.950	1.025.348.181	842.104.096
Penyusutan	211.450.113	191.427.186	798.572.014	640.296.505	476.541.966
Imbalan kerja	148.448.671	185.494.318	718.655.872	822.854.313	468.452.385
Jasa profesional	130.000.000	81.632.654	197.882.654	65.000.000	-
Legal dan perizinan	129.188.461	186.083.575	298.960.575	49.726.000	4.250.000
Listrik, telepon dan internet	118.644.081	127.121.564	534.103.807	490.265.169	447.262.665
Perbaikan dan pemeliharaan	36.674.110	12.286.296	93.673.771	15.753.587	52.463.043
Makan dan minum	32.421.349	36.655.801	46.366.348	112.710.439	30.319.507
Transport dan perjalanan	12.756.147	17.793.653	60.066.124	43.145.111	28.109.011
Asuransi dan kesehatan	2.450.772	2.981.735	10.334.051	11.265.597	8.441.523
Beban penurunan nilai piutang	-	-	221.863.119	-	-
Pendidikan dan pelatihan	-	-	12.632.000	16.390.000	67.329.207
Lain-lain	3.246.676	-	-	33.230.000	44.358.080
Sub jumlah	<u>2.767.756.000</u>	<u>2.452.909.870</u>	<u>9.709.491.562</u>	<u>7.016.818.522</u>	<u>5.918.278.355</u>
Jumlah	<u>2.820.917.297</u>	<u>2.481.403.360</u>	<u>9.928.065.951</u>	<u>7.647.044.780</u>	<u>5.968.153.297</u>

22. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Pendapatan lain-lain					
Laba selisih kurs	1.303.805	-	6.031.022	4.026.757	-
Pendapatan bunga	831.495	396.691	816.026	19.539.144	-
Lain-lain	350.020	701	471.536	-	432.812
Sub jumlah	<u>2.485.320</u>	<u>397.393</u>	<u>7.318.584</u>	<u>23.565.901</u>	<u>432.812</u>
Beban lain-lain					
Beban bunga	2.894.208	4.778.988	16.614.799	-	-
Beban administrasi Bank	2.567.500	4.425.530	8.359.277	23.747.744	26.551.402
Beban pajak	90.726	79.339	2.543.315	30.746.961	515.139
Rugi selisih kurs	-	2.190.533	-	-	5.069.525
Rugi pelepasan aset	-	-	150.174.735	-	-
Lain-lain	85.625	52.401	3.266.731	643.864	3.409.196
Sub jumlah	<u>5.638.059</u>	<u>11.526.792</u>	<u>180.958.857</u>	<u>55.138.569</u>	<u>35.545.262</u>
Jumlah	<u>(3.152.739)</u>	<u>(11.129.399)</u>	<u>(173.640.273)</u>	<u>(31.572.668)</u>	<u>(35.112.450)</u>

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERPAJAKAN

Utang Pajak

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Entitas induk				
Pajak penghasilan:				
Pasal 21	19.851.214	312.500	-	-
Pasal 23	1.000.000	-	-	-
Pasal 29	-	200.000	-	-
PP 46	530.000	-	-	-
Pajak pertambahan nilai	2.650.000	-	-	-
Sub jumlah	24.031.214	512.500	-	-
Entitas anak				
Pajak penghasilan:				
Pasal 21	9.557.496	128.053.986	150.341.690	363.690.348
Pasal 23	10.099.035	18.179.950	216.587.552	4.384.000
Pasal 4 (2)	-	488.888.889	-	-
Pasal 29	270.594.258	59.648.284	70.275.981	1.351.962
Pajak pertambahan nilai	357.918.090	772.590.285	182.184.229	258.004.279
Sub jumlah	648.168.879	1.467.361.394	619.389.452	627.430.589
Jumlah	672.200.093	1.467.873.894	619.389.452	627.430.589

Pajak Kini

	Periode tiga bulan yang berakhir		Periode satu tahun yang berakhir		
	31 Maret		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Pendapatan konsolidasi	6.809.694.316	6.453.964.698	27.873.687.290	32.700.214.887	23.908.452.626
Pendapatan entitas anak	(6.736.694.316)	(6.453.964.698)	(27.853.687.290)	(32.700.214.887)	(23.908.452.626)
Pendapatan induk	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Pajak kini entitas induk					
Tarif 1 % sesuai PP 46	(730.000)	-	(200.000)	-	-
Pajak kini entitas anak	272.054.258	(100.375.560)	(487.877.185)	(670.689.923)	(54.719.904)
Jumlah	271.324.258	(100.375.560)	(488.077.185)	(670.689.923)	(54.719.904)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diatas menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Tangguhan

	1 Januari 2018	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam	31 Maret 2018
			penghasilan komprehensif lain	
Imbalan kerja karyawan	485.620.243	(83.637.833)	(13.429.592)	388.552.818
Cadangan penurunan nilai piutang	55.465.780			55.465.780
Jumlah	541.086.023	(83.637.833)	(13.429.592)	444.018.598

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	1 Januari 2017	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2017
Imbalan kerja karyawan	511.882.505	179.663.968	(205.926.231)	485.620.243
Cadangan penurunan nilai piutang	-	55.465.780	-	55.465.780
Jumlah	<u>511.882.505</u>	<u>235.129.748</u>	<u>(205.926.231)</u>	<u>541.086.023</u>
	1 Januari 2016	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2016
Imbalan kerja karyawan	247.647.759	205.713.578	58.521.168	511.882.505
Jumlah	<u>247.647.759</u>	<u>205.713.578</u>	<u>58.521.168</u>	<u>511.882.505</u>
	1 Januari 2015	Diakui dalam laba rugi	Diakui dalam penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2015
Imbalan kerja karyawan	56.564.281	117.113.097	73.970.381	247.647.759
Jumlah	<u>56.564.281</u>	<u>117.113.097</u>	<u>73.970.381</u>	<u>247.647.759</u>

24. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret		Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Nilai nominal semula	100	100.000	100.000	100.000	100.000
Nilai nominal yang disajikan kembali	100	100	100	100	100
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula	170.916.667	126.000	126.000	56.000	6.000
Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali	170.916.667	126.000.000	126.000.000	56.000.000	6.000.000
Laba (rugi) bersih entitas induk	160.003.690	92.784.758	518.927.827	1.466.626.632	(409.522.800)
Laba (rugi) per saham	<u>0,94</u>	<u>0,74</u>	<u>4,12</u>	<u>26,19</u>	<u>(68,25)</u>

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat *dilutive* pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi yang berkelanjutan dengan pihak berelasi.

Saldo dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi, tanpa jaminan, tidak dikenakan beban bunga, memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6.

Perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak-pihak berelasi, tanpa jaminan, tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti sebagaimana diungkapkan pada Catatan 12.

Sifat Transaksi dan Hubungan Pihak-pihak Berelasi

Wiliam Martaputra adalah salah satu Direktur Perusahaan dan pemegang saham pada entitas anak, Aldrian Suwardi Chandra merupakan salah satu Direktur di entitas anak dan Iwa Sukresno Karunia adalah salah satu pemegang saham dan Komisaris di Perusahaan.

26. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Keseluruhan aktivitas usaha Grup berasal dari pasar lokal. Grup mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri atas pendapatan dari jasa penyedia konten, portal web dan lain-lain.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak penghasilan Grup dikelola secara Kelompok Usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

	31 Maret		31 Desember		
	2018	2017	2017	2016	2015
Penghasilan bersih					
Jasa penyedia konten	3.104.685.321	4.854.170.706	16.460.165.965	28.085.510.848	21.426.745.763
Portal web	3.632.008.995	1.599.793.992	11.393.521.325	4.614.704.039	2.481.706.863
Lain-lain	73.000.000	-	20.000.000	-	-
Sub jumlah	<u>6.809.694.316</u>	<u>6.453.964.698</u>	<u>27.873.687.290</u>	<u>32.700.214.887</u>	<u>23.908.452.626</u>
Beban pokok penghasilan					
Jasa penyedia konten	930.967.988	1.404.184.044	5.884.163.389	10.799.889.422	2.246.463.581
Portal web	2.494.087.985	2.410.791.100	11.105.844.807	12.275.279.923	16.134.775.885
Lain-lain	45.624.500	-	12.500.000	-	-
Sub jumlah	<u>3.470.680.473</u>	<u>3.814.975.144</u>	<u>17.002.508.196</u>	<u>23.075.169.345</u>	<u>18.381.239.466</u>
Laba Kotor					
Jasa penyedia konten	2.173.717.333	3.449.986.662	10.576.002.576	17.285.621.426	19.180.282.182
Portal web	1.137.921.010	(810.997.108)	287.676.518	(7.660.575.884)	(13.653.069.022)
Lain-lain	27.375.500	-	7.500.000	-	-
Jumlah	<u>3.339.013.843</u>	<u>2.638.989.554</u>	<u>10.871.179.094</u>	<u>9.625.045.542</u>	<u>5.527.213.160</u>

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Segmen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian:

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Jumlah Aset				
Jasa penyedia konten	2.120.813.086	2.061.862.788	4.159.163.768	3.933.700.830
Portal web	11.346.598.262	14.064.954.374	9.096.495.747	4.148.150.144
Lain-lain	55.650.000	-	-	-
Sub jumlah	<u>13.523.061.348</u>	<u>16.126.817.162</u>	<u>13.255.659.515</u>	<u>8.081.850.974</u>
Jumlah Liabilitas				
Jasa penyedia konten	185.771.677	1.532.888.065	157.389.772	344.076.222
Portal web	2.524.437.190	8.878.346.108	8.395.791.881	16.550.585.136
Lain-lain	-	-	-	-
Sub jumlah	<u>2.710.208.867</u>	<u>10.411.234.173</u>	<u>8.553.181.653</u>	<u>16.894.661.358</u>

27. PERJANJIAN PENTING

a. Pada tanggal 18 Juli 2012 PT Arkadia Media Nusantara sebagai entitas anak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyedia Layanan Informasi Berbentuk Data dengan PT Indosat Tbk sesuai dengan surat perjanjian kerja sama No. Indosat : 007/B00-B0FD/2012 dan No. CP : 010/PKS/AMN-IND/VII/2012, atas Perjanjian ini telah dilakukan addendum pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan surat perjanjian kerja sama No. Indosat : 071/B00-B0P/LGL/2014 dan No. CP : 001/PKS/AMN-IND/XI/2014, dalam perjanjian ini terdapat Ketentuan Pendapatan Minimum (*Minimum Revenue*) yang berisikan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua (PT Arkadia Media Nusantara) berkewajiban untuk dapat memenuhi Pendapatan Minimum sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2. Jika Pendapatan Minimum sampai bulan ke- 12 tidak tercapai, maka pada bulan ke- 13 para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan Perjanjian ini.
3. Sebaliknya, jika pihak kedua (PT Arkadia Media Nusantara) memenuhi Pendapatan Minimum sejak bulan ke- 1 hingga bulan ke- 12 maka para pihak sepakat untuk tetap melanjutkan perjanjian.

Atas addendum perjanjian tersebut telah dibuat amandemen pertama dengan nomor 086/AM0-AMB/LGL/2017 yang mengubah ketentuan pasal 12 (Tarif dan Pembagian Pendapatan) yang berisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan atas layanan akan dibagi oleh para pihak dengan pola *revenue sharing*.
2. Para pihak sepakat untuk melakukan *review* terhadap tarif dan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) setiap 6 bulan sekali jika dibutuhkan.
3. Para pihak akan mencatat dan menyediakan hasil pencatatan penerimaan Data Trafik layanan Konten yang akan menjadi dasar untuk penghitungan bagi hasil. Data yang menjadi acuan penagihan adalah data milik pihak pertama (PT Indosat, Tbk) dengan ketentuan jika selisih Data Trafik para pihak kurang dari 5%.

b. Pada tanggal 1 Desember 2015, PT Arkadia Media Nusantara sebagai entitas anak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang penggunaan jaringan telekomunikasi XL untuk penyediaan konten dengan PT XL Axiata, Tbk dengan surat perjanjian no. XL : 1151/DS.L1.1151/XL/III/2016, perjanjian in berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2015 dan akan berlaku terus menerus sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak tanpa terikat pada ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan pemberitahuan secara tertulis 30 hari kalender sebelum berakhirnya perjanjian, tanpa dikenakan biaya penalti apapun kepada pihak yang meminta dilakukannya pengakhiran perjanjian; dan/atau

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila pihak yang lain melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ("pihak wanprestasi"), dengan syarat pihak wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan gagal untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya dalam waktu 30 hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang lain mengenai pelanggarannya; dan/atau
3. Diakhiri secara seketika berdasarkan ketentuan dalam perjanjian; dan/atau
4. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkan perjanjian.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko modal, dan risiko operasional. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	31 Maret 2018	31 Desember		
		2017	2016	2015
Kas dan bank	2.422.076.015	813.930.398	2.759.265.019	1.083.880.404
Piutang usaha - pihak ketiga	4.416.442.555	5.676.401.998	2.931.841.964	3.484.482.048
Piutang lain-lain	11.000.000	5.139.950.000	4.492.560.000	600.000
Jumlah	<u>6.849.518.570</u>	<u>11.630.282.396</u>	<u>10.183.666.983</u>	<u>4.568.962.452</u>

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas Keuangan	31 Maret 2018		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Utang usaha - pihak ketiga	208.138.569	-	208.138.569
Biaya yang masih harus dibayar	197.610.055	-	197.610.055
Utang pajak	672.200.093	-	672.200.093
Sewa pembiayaan	78.048.880	-	78.048.880
Jumlah	1.155.997.597	-	1.155.997.597

Liabilitas Keuangan	31 Desember 2017		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Utang usaha - pihak ketiga	5.715.942.358	-	5.715.942.358
Utang lain-lain			-
Pihak berelasi	321.199.000	-	321.199.000
Pihak ketiga	701.593.330	-	701.593.330
Biaya yang masih harus dibayar	155.321.951	-	155.321.951
Utang pajak	1.467.873.894	-	1.467.873.894
Sewa pembiayaan	91.786.672	15.036.000	106.822.672
Jumlah	8.453.717.205	15.036.000	8.468.753.205

Liabilitas Keuangan	31 Desember 2016		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Utang usaha - pihak ketiga	4.475.602.243	-	4.475.602.243
Utang lain-lain - Pihak ketiga	697.758.330	-	697.758.330
Biaya yang masih harus dibayar	654.614.653	-	654.614.653
Utang pajak	619.389.452	-	619.389.452
Sewa pembiayaan	39.515.043	18.771.911	58.286.954
Jumlah	6.486.879.721	18.771.911	6.505.651.632

Liabilitas Keuangan	31 Desember 2015		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Utang usaha - pihak ketiga	2.404.280.254	-	2.404.280.254
Utang lain-lain			-
Pihak berelasi	12.099.644.618	-	12.099.644.618
Pihak ketiga	667.798.330	-	667.798.330
Utang pajak	627.430.589	-	627.430.589
Sewa pembiayaan	36.561.530	68.355.000	104.916.530
Jumlah	15.835.715.321	68.355.000	15.904.070.321

Risiko Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bagi pemegang saham. Perusahaan mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Dalam rangka pemeliharaan dan mengelola struktur permodalan, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal dimasa yang akan datang.

Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mempertahankan akses terhadap berbagai alternative pendanaan pada biaya yang wajar.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada Perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Perusahaan.

Kebijakan manajemen yaitu menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, pemeliharaan ataupun melakukan backup atas aplikasi utama perusahaan baik dari sisi hardware dan software untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga menanamkan nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan sehingga dapat menghindari/mengurangi potensi penyimpangan, serta penilaian kinerja yang fair dan transparan dalam pengembangan karir.

29. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

	31 Maret 2018	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan bank	2.422.076.015	2.422.076.015
Piutang usaha – pihak ketiga	4.416.442.555	4.416.442.555
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	208.138.569	208.138.569
Utang pajak	672.200.093	672.200.093
Sewa pembiayaan	78.048.880	78.048.880

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2017	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan bank	813.930.398	813.930.398
Piutang usaha – pihak ketiga	5.676.401.998	5.676.401.998
Piutang lain-lain	5.139.950.000	5.139.950.000
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	5.715.942.358	5.715.942.358
Utang lain-lain	1.022.792.330	1.022.792.330
Utang pajak	1.467.873.894	1.467.873.894
Sewa pembiayaan	106.822.672	106.822.672
	31 Desember 2016	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan bank	2.759.265.019	2.759.265.019
Piutang usaha – pihak ketiga	2.931.841.964	2.931.841.964
Piutang lain-lain	4.492.560.000	4.492.560.000
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	4.475.602.243	4.475.602.243
Utang lain-lain	697.758.330	697.758.330
Utang pajak	619.389.452	619.389.452
Sewa pembiayaan	58.286.954	58.286.954
	31 Desember 2015	
	Nilai tercatat	Nilai wajar
<u>Aset keuangan</u>		
Kas dan bank	1.083.880.404	1.083.880.404
Piutang usaha – pihak ketiga	3.484.482.048	3.484.482.048
Piutang lain-lain	600.000	600.000
<u>Liabilitas keuangan</u>		
Utang usaha	2.404.280.254	2.404.280.254
Utang lain-lain	12.767.442.948	12.767.442.948
Utang pajak	627.430.589	627.430.589
Sewa pembiayaan	104.916.530	104.916.530

30. TRANSAKSI NON-KAS

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian berupa sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp 139.888.712 dan Rp 161.810.372.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. SALDO DEFISIT

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan Perseroan dan entitas anaknya akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan dan tidak mencakup adanya penyesuaian sebagai akibat adanya ketidakpastian tentang kelangsungan hidup Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya mengalami defisit pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp 7.038.516.715, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 7.187.362.341, Rp 7.640.085.615 dan Rp 9.106.712.247. Perseroan mengalami saldo defisit atas laba ditahan dikarenakan pada tahun 2014 Perseroan baru mendirikan portal web SUARA.COM yang merupakan portal web pertama milik Perseroan sehingga Perseroan banyak menanggung biaya-biaya untuk pendirian portal web SUARA.COM seperti biaya-biaya promosi yang dibayarkan kepada Facebook, Google dan promosi lainnya dalam usaha memperkenalkan portal web Perseroan. Namun untuk Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Perseroan telah memperoleh laba bersih masing-masing sebesar Rp 159.981.716, Rp 516.525.433 dan Rp 1.481.451.749.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan dan entitas anaknya memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya dalam waktu mendatang yang dapat diduga secara pantas. Oleh karena itu, dasar kelangsungan usaha tetap digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan telah dan akan terus menerapkan strategi- strategi pokok sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas konten untuk memperkuat posisi sebagai media rujukan
- Fokus menggarap iklan kreatif untuk menaikkan pendapatan perseroan.
- Pengembangan portal vertical.
- Pengembangan media lokal dengan konten lokal.
- Membership, komunitas dan *artificial intelegencia* (kecerdasan buatan).
- Pengembangan bisnis berbasis komunitas.

32. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Berdasarkan keputusan para pemegang saham sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris No. 127 tanggal 25 Mei 2018 dari Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., notaris di kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk:

- 1) Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) sejumlah sebanyak-banyaknya 162.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100.
- 2) Menyetujui rencana Perusahaan menerbitkan dan mengeluarkan hak opsi pemilikan saham baru kepada karyawan dan manajemen Perusahaan melalui program *Employee and Management Stock Ownership Programe (EMSOP)* dengan mengalokasikan saham baru kepada karyawan sebanyak-banyaknya 12.000.000 saham biasa dalam IPO yang ditawarkan kepada karyawan dan manajemen Perusahaan.
- 3) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
- 4) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direktur Utama Perusahaan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham.
- 5) Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- 6) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris No. 49 tanggal 10 Juli 2018 dari Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., notaris di kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk :
1. Memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 2. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan selama mereka menjabat pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas.
 3. Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham dan menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan:

- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah disajikan kembali seperti tabel di bawah ini. Penyajian kembali ini disebabkan kesalahan perhitungan "Manfaat pajak penghasilan terkait" untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 masing-masing sebelumnya Rp 13.429.592 dan Rp 127.918.061 yang seharusnya Rp (13.429.592) dan Rp (127.918.061) serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebelumnya Rp 205.926.231 yang seharusnya sebesar Rp (205.926.231). "Manfaat pajak penghasilan terkait" tersebut sebelumnya disajikan pada "Pajak Tangguhan". Penyajian kembali tersebut tidak mempunyai dampak perubahan terhadap "Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan" dan "Jumlah Ekuitas Konsolidasian".

	31 Maret 2018		31 Maret 2017		31 Desember 2017	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
PAJAK PENGHASILAN						
Pajak tangguhan	(110.497.017)	(83.637.833)	(209.462.542)	46.373.580	(176.722.714)	235.129.748
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN	133.122.532	159.981.716	(163.381.307)	92.454.815	104.672.971	516.525.433
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Manfaat pajak penghasilan terkait	13.429.592	(13.429.592)	127.918.061	(127.918.061)	205.926.231	(205.926.231)
LABA (RUGI) NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	133.146.722	160.003.690	(163.051.344)	92.784.758	107.075.777	518.927.827
Keperentingan nonpengendali	(24.190)	(21.974)	(329.964)	(329.943)	(2.402.805)	(2.402.394)
Jumlah	133.122.532	159.981.716	(163.381.308)	92.454.815	104.672.972	516.525.433
LABA (RUGI) PER SAHAM - DASAR	0,78	0,94	(1,29)	0,74	0,85	4,12

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Komponen penghasilan Komprehensif lain dan saldo laba (defisit) per 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah disajikan kembali seperti tabel di bawah ini. Penyajian kembali ini disebabkan oleh dampak perubahan "Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian". Penyajian kembali tersebut tidak mempunyai dampak perubahan terhadap "Jumlah Ekuitas Konsolidasian".

	31 Maret 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
EKUITAS								
Komponen penghasilan komprehensif lain	347.428.429	259.241.052	293.738.703	218.979.811	(524.666.534)	(393.499.901)	(292.922.710)	(219.692.033)
Saldo laba (defisit)	(7.126.704.091)	(7.038.516.715)	(7.262.121.232)	(7.187.362.341)	(7.508.918.982)	(7.640.085.615)	(9.033.481.570)	(9.106.712.247)

- Laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah dikelompokkan kembali seperti tabel di bawah ini.
 - Pengelompokan kembali tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 terdiri dari Pembayaran kas kepada pemasok bertambah sebesar Rp 797.464.523, Perolehan aset tetap bertambah Rp 8, Penerimaan kas dari pelanggan berkurang Rp 221.863.119, Pembayaran karyawan berkurang Rp 483.000.000 dan Penerimaan (pembayaran) lainnya berkurang Rp 92.601.412.
 - Pengelompokan kembali untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 terdiri dari Pembayaran kas kepada pemasok bertambah Rp 749.719.216, Penerimaan (pembayaran) lainnya berkurang Rp 749.154.207 dan Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing berkurang Rp 565.000.
 - Pengelompokan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari Penerimaan kas dari pelanggan bertambah Rp 221.863.119, Pembayaran kas kepada pemasok bertambah Rp 3.623.767.203, Penerimaan (pembayaran) lainnya berkurang Rp 3.833.429.685, Perolehan aset tetap berkurang Rp 11.635.637 dan Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing berkurang Rp 565.000.
 - Pengelompokan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari Pembayaran kas kepada pemasok bertambah Rp 2.417.606.541, Pembayaran karyawan berkurang Rp 119.400.000, Penerimaan (pembayaran) lainnya berkurang Rp 2.417.686.541, Setoran modal saham bertambah Rp 119.400.000 dan Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing bertambah Rp 80.000.
 - Pengelompokan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari Pembayaran kas kepada pemasok bertambah Rp 3.675.747.293, Penerimaan (pembayaran) lainnya berkurang Rp 3.655.143.581, Perolehan aset tetap berkurang Rp 139.888.712, Setoran modal saham bertambah Rp 119.400.000, Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi berkurang Rp 600.000 dan Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing bertambah Rp 485.000.

Pengelompokan kembali tersebut tidak mempunyai dampak terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2018		31 Maret 2017	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	8.265.016.878	8.043.153.759	-	-
Pembayaran kas kepada pemasok	(11.371.310.504)	(10.573.845.981)	(5.038.886.665)	(4.289.167.449)
Pembayaran karyawan	(2.678.127.270)	(3.161.127.270)	-	-
Penerimaan (pembayaran) lainnya	(1.209.834.262)	(1.302.435.674)	(512.792.528)	(1.261.946.735)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(6.994.255.158)	(6.994.255.166)	(1.558.246.650)	(1.557.681.641)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	(367.173.897)	(367.173.889)	(281.305.005)	(281.305.014)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(377.173.897)	(377.173.889)	(381.305.005)	(381.305.014)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing	-	-	521.199.000	520.634.000
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-	(211.411.085)	(211.976.085)

	31 Desember 2017		31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	24.907.264.137	25.129.127.256	-	-	-	-
Pembayaran kas kepada pemasok	(13.068.113.553)	(9.444.346.350)	(17.816.791.600)	(15.399.185.059)	(16.172.994.643)	(12.497.247.350)
Pembayaran karyawan	-	-	(7.869.961.095)	(7.989.361.095)	-	-
Penerimaan (pembayaran) lainnya	(630.757.986)	(4.464.187.671)	(380.371.292)	(2.798.057.833)	(30.906.914)	(3.686.050.495)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(880.838.066)	(868.637.429)	7.185.730.984	7.066.250.984	(1.380.255.893)	(1.359.652.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	(549.430.901)	(561.066.538)	-	-	(503.778.524)	(643.667.236)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(629.430.901)	(641.066.538)	(938.825.731)	(938.825.731)	(503.778.524)	(643.667.236)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Setoran modal saham	-	-	12.000.000.000	12.119.400.000	-	119.400.000
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	-	-	-	-	-	(600.000)
Penerimaan (pembayaran) pinjaman leasing	325.599.000	325.034.000	(12.069.764.618)	(12.069.684.618)	2.285.417.900	2.285.902.900
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(435.065.654)	(435.630.654)	(4.571.520.638)	(4.452.040.638)	2.211.484.927	2.330.769.927

- Biaya kantor dan perlengkapan tahun 2017 yang sebelumnya dicatat pada Beban administrasi dan umum sebesar Rp 150.174.735 direklasifikasi menjadi "Rugi pelepasan aset pada akun Beban lain-lain".
- Tambahan pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut :
 - Catatan 1a, penambahan pengungkapan atas pengendalian Perseroan oleh Stephen K. Sulisty, selaku pemegang saham, dimana Perseroan tidak memiliki pemegang saham berbentuk badan hukum.
 - Catatan 1c, penambahan pengungkapan atas pendirian dari masing-masing entitas anak.
 - Catatan 2a, pengungkapan atas pernyataan kepatuhan
 - Catatan 2b, penambahan dan pengungkapan atas dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
 - Catatan 2c, pengungkapan prinsip konsolidasian
 - Catatan 2f dan 4, perubahan akun menjadi kas dan bank
 - Catatan 6, penambahan pengungkapan akun piutang lain-lain pihak ketiga (karyawan)
 - Catatan 7, penambahan pengungkapan akun biaya dibayar dimuka atas sewa kantor yang dibayar oleh entitas anak.
 - Catatan 8, penambahan pengungkapan akun uang muka perjalanan dinas dan uang muka lainnya
 - Catatan 9, penambahan pengungkapan mengenai pengurangan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Catatan 10. penambahan pengungkapan akun aset lain-lain deposit sewa dan penyedia konten

**PT ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk (d/h PT BUKIT IRAMA) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT) SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015-lanjutan**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Catatan 14, penambahan pengungkapan perjanjian sewa pembiayaan
- Catatan 16, penambahan pengungkapan tentang persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Catatan 19, penambahan pengungkapan rincian pelanggan utama
- Catatan 26, penambahan pengungkapan informasi segmen Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
- Catatan 28, penambahan pengungkapan risiko kredit dan risiko likuiditas
- Catatan 31, penambahan pengungkapan saldo defisit
- Catatan 32, penambahan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan

34. PENYUSUNAN DAN PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan ini yang diselesaikan tanggal 18 Juli 2018.
